



Sutiyo, S.S.T.P., M.Si., Ph.D.

Hasna Azmi Fadhilah, S.S.T.P., M.Res.

Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Sutiyo, S.S.T.P., M.Si., Ph.D.
Hasna Azmi Fadhilah, S.S.T.P., M.Res.



PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sutiyo, S.S.T.P., M.Si., Ph.D.
Hasna Azmi Fadhilah, S.S.T.P., M.Res.

Desain Cover :
Syaiful Anwar

Sumber :
<https://www.shutterstock.com> (arturtugur)

Tata Letak :
Salwa Alya Majid

Proofreader :
A. Timor Eldian

Ukuran :
xii, 119 hlm, Uk: 17,5 x 25 cm

ISBN :
978-623-02-8155-6

Cetakan Pertama :
Maret 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk hidup layak. Faktor pembentuknya selalu berhubungan erat dengan kurangnya keterampilan, kesehatan yang bermasalah, keterbatasan modal, tingginya risiko penghidupan, dan produktivitas yang rendah. Kemiskinan lalu bermanifestasi menjadi kerentanan, marginalitas, ketidakberdayaan, ketergantungan dan pengucilan sosial. Kompleksitas ini mengindikasikan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan upaya lintas sektor yang komprehensif.

Isi buku ini berangkat dari gagasan bahwa perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua hal yang paling penting bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Perlindungan sosial akan memperkuat kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam menghadapi berbagai risiko sosial dan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat akan membuat mereka mandiri, dan membantu menciptakan satu struktur politik dan sosial yang lebih mendukung penanggulangan kemiskinan.

Buku ini terdiri dari tiga bagian dengan tigabelas bab yang saling terkait. Bagian Pertama memaparkan konsep kemiskinan dan kerentanan sebagai upaya awal memberikan pemahaman konseptual dan operasional terhadap kedua fenomena ini. Bagian Kedua menjelaskan konsep perlindungan sosial, perkembangan kebijakan ini di tingkat global dan nasional, serta gagasan tentang perlindungan sosial yang ideal dan perlu dilakukan di Indonesia. Bagian Ketiga menjelaskan konsep, strategi dan aktor pemberdayaan masyarakat, serta *best practices* berbagai program sejenis yang telah dilaksanakan.

Kedua penulis adalah dosen dan peneliti yang mendalami isu kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan buku ini. Terima kasih tak terhingga ditujukan bagi saudara dan kawan yang pernah dijumpai selama penulis melakukan berbagai penelaahan, diskusi dan penulisan, yang pada akhirnya mengantarkan pada penyusunan buku ini.

Buku ini ditulis dengan target pembaca para mahasiswa program Sarjana dan Master, praktisi pemerintahan, aktivis dan sukarelawan pendamping

program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta masyarakat umum yang tertarik pada isu kemiskinan dan kerentanan sosial.

Substansi buku ini tentu masih memiliki banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan penulis, yang dapat dihubungi melalui email: sutiyo@ipdn.ac.id. Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat.

Salam hangat.

Jatinangor, 02 Maret 2024

Sutiyo, S.S.T.P., M.Si., Ph.D.
Hasna Azmi Fadhilah, S.S.T.P., M.Res

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _____	v
DAFTAR ISI _____	vii
DAFTAR TABEL _____	x
DAFTAR GAMBAR _____	xi
Bagian Pertama: Kemiskinan dan Kerentanan	1
Bab 1 Kemiskinan	2
1.1 Konsep Kemiskinan _____	2
1.2 Ukuran Kemiskinan _____	5
1.3 Perangkat Kemiskinan _____	9
1.4 Makna Pembangunan dari Perspektif Penanggulangan Kemiskinan _____	11
Bab 2 Kerentanan	13
2.1 Konsep Kerentanan _____	13
2.2 Jenis Kerentanan _____	16
2.3 Hubungan Kemiskinan dan Kerentanan Sosial Ekonomi _____	17
2.4 Perspektif dalam Memahami Kerentanan Sosial Ekonomi _____	18
Bab 3 Profil Kemiskinan dan Kerentanan di Indonesia	21
3.1 Perkembangan Angka Kemiskinan _____	21
3.2 Kemiskinan Ekstrem _____	23
3.3 Kemiskinan berdasarkan Wilayah _____	23
3.4 Profil Kelompok Miskin _____	24
3.5 Profil Kelompok Rentan _____	25
3.6 Urgensi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat _____	26
Bagian Kedua: Perlindungan Sosial	28
Bab 4 Perlindungan Sosial	29
4.1 Konsep Perlindungan Sosial _____	29
4.2 Bentuk Perlindungan Sosial _____	30
4.3 Fungsi Perlindungan Sosial _____	33

Bab 5 Perkembangan Kebijakan Perlindungan Sosial di Tingkat Global	35
5.1 Pada Masa Lalu _____	35
5.2 Dekade 1990-an _____	36
5.3 Advokasi di Tingkat Global _____	37
5.4 Isu Kontemporer Perlindungan Sosial _____	38
Bab 6 Perkembangan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia	43
6.1 Orde Lama (1945-1966) _____	43
6.2 Orde Baru (1966-1998) _____	43
6.3 Krisis Moneter 1998 _____	45
6.4 Sesudah Krisis Moneter 1998 _____	46
Bab 7 Idealisasi Program Perlindungan Sosial	49
7.1 Perspektif Keadilan Sosial _____	49
7.2 Pendekatan Keberhakan (<i>Entitlement</i>) _____	50
7.3 Efektivitas Program Perlindungan Sosial _____	52
7.4 Perpaduan Perlindungan Sosial dengan Skema Pembangunan Lain _____	55
Bagian Ketiga: Pemberdayaan Masyarakat	57
Bab 8 Konsep Pemberdayaan Masyarakat	58
8.1 Definisi _____	58
8.2 Level Pemberdayaan _____	59
8.3 Pemberdayaan Masyarakat dan Modal Sosial _____	63
Bab 9 Sejarah Pemberdayaan	65
9.1 Di Tingkat Global _____	65
9.2 Indonesia _____	66
9.3 Miskonsepsi Pemberdayaan di Indonesia _____	68
Bab 10 Prinsip, Tujuan, dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat	70
10.1 Prinsip Pemberdayaan _____	70
10.2 Tujuan Pemberdayaan _____	73
10.3 Strategi Pemberdayaan _____	74

Bab 11 Aktor dan Peranan dalam Pemberdayaan Masyarakat	80
11.1 Pemerintah _____	80
11.2 Organisasi Non Pemerintah _____	86
11.3 Masyarakat _____	87
Bab 12 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	90
12.1 Bidang Ekonomi _____	90
12.2 <i>Best Practices</i> Pemberdayaan di Bidang Ekonomi _____	92
12.3 Bidang Pendidikan _____	93
12.4 <i>Best Practices</i> Pemberdayaan di Bidang Pendidikan _____	94
12.5 Bidang Kesehatan _____	95
12.6 <i>Best Practices</i> Pemberdayaan di Bidang Kesehatan _____	98
12.7 Bidang Lingkungan Hidup _____	98
12.8 <i>Best Practices</i> Pemberdayaan di Bidang Lingkungan Hidup _____	100
Bab 13 Idealisasi Program Pemberdayaan Masyarakat	103
13.1 Tantangan _____	103
13.2 Peluang _____	105
13.3 Pekerjaan Prioritas _____	107
DAFTAR PUSTAKA _____	111
TENTANG PENULIS _____	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kemiskinan di Indonesia berdasarkan Berbagai Garis Kemiskinan, tahun 2021	7
Tabel 1.2	Dimensi, Indikator, dan Bobot dalam <i>Multidimensionality Poverty Measure</i>	8
Tabel 7.1	Dimensi dan Indikator Efektivitas Program Perlindungan Sosial	53
Tabel 8.1	Pemberdayaan berdasarkan Level dan Jenis Keegiatannya	60

DAFTAR GAMBAR

Figure 1.1	Ilustrasi Perangkap Kemiskinan	10
Figure 2.1	Hubungan antara Krisis, Risiko, Kerentanan dan Kapasitas	16
Figure 2.2	Model Dua Sisi Kerentanan	18
Figure 3.1	Angka Kemiskinan di Indonesia, 1984-Maret 2023	22
Figure 4.1	Klasifikasi Program Perlindungan Sosial	30
Figure 10.1	Prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat	70
Figure 12.1	Bidang Prioritas dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia	90

Untuk semua yang peduli terhadap kemiskinan

Bagian Pertama:



Bab 1 | Kemiskinan

1.1 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah kata yang sangat sering terdengar. Kinerja pemerintah selalu dinilai berdasarkan keberhasilannya menurunkan angka kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan juga menjadi janji utama kampanye para calon presiden, kepala daerah dan anggota DPR, DPD maupun DPRD. Berbagai laporan pelaksanaan pembangunan memaparkan data kemiskinan. Pada saat yang sama, masyarakat sering mendengar perbedaan angka kemiskinan yang dikeluarkan beberapa lembaga, seperti antara yang dikeluarkan oleh BPS dan *World Bank*. Publik juga sering melihat kekacauan dalam penyaluran berbagai bantuan sosial. Beberapa orang merasa dirinya miskin namun tidak masuk dalam data pemerintah, sedangkan sebagian lainnya yang dianggap tidak miskin oleh masyarakat justru menjadi penerima bantuan.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar supaya dapat hidup dengan layak. Definisi ini sifatnya sangat umum dan belum menyediakan perangkat teknis operasionalisasi. Meskipun hampir semua orang setuju dengan definisi ini, mereka memaknainya secara berbedatergantung padasituasi, tempat, latar belakang budaya dan pengalaman empiris masing-masing. Beberapa penelitian menemukan tingginya variabilitas persepsi dalam mengukur kemiskinan atau mengidentifikasi kelompok miskin pada suatu masyarakat (Sutiyo, 2022; 2023). Operasionalisasi konsep ini senantiasa memunculkan polemik teknis.

Polemik pertama adalah terkait dengan apa saja jenis kebutuhan dasar. Umumnya kita memahami kebutuhan dasar sebagai sandang, pangan, dan papan. Tetapi, apakah hanya itu? Kehidupan masyarakat yang semakin maju diiringi dengan munculnya berbagai jenis kebutuhan dasar yang lain, seperti listrik, air bersih, bahan bakar, pendidikan, kesehatan bahkan rekreasi. Semakin modern suatu masyarakat, tentu semakin banyak dan bervariasi kebutuhan mereka.

Polemik kedua adalah ukuran pemenuhan kebutuhan dasar yang seperti apa untuk dikatakan “hidup layak”? Sebagai contoh, berapa kali makan dalam

sehari, dan apa jenis konsumsinya, sehingga hidup seseorang dikatakan layak? Kondisi tempat tinggal yang seperti apa yang dikatakan layak? Memiliki rumah panggung dari kayu dianggap layak di satu masyarakat daerah tertentu, namun bisa jadi dianggap kurang layak di daerah lainnya.

Polemik ketiga terkait dengan aspek kemampuan. Kondisi tempat tinggal yang seperti apa yang dikatakan layak? Jika seseorang memilih untuk makan sekali sehari, padahal ia sebenarnya mampu untuk makan tiga kali sehari, maka apakah ia bisa dikategorikan miskin? Jika seseorang memilih tinggal di jalan, padahal ia memiliki rumah, apakah ia tetap dikategorikan sebagai orang miskin?

Berbagai pertanyaan di atas mengantarkan pada konsep dan operasionalisasi pengukuran yang berbeda-beda. Makna dan ukuran kemiskinan sangat tergantung pada siapa yang mengajukan pertanyaan, siapa yang menjawab, dan bagaimana pertanyaan tersebut dipahami. Chamber (2006) mengidentifikasi bermacam-macam definisi kemiskinan di dalam literatur, sebagai berikut:

1. Kemiskinan adalah rendahnya pendapatan. Definisi ini juga meliputi kemiskinan yang diukur berdasar tingkat konsumsi atau pengeluaran, sebagai alternatif dari sulitnya mengukur pendapatan seseorang secara akurat. Definisi ini memungkinkan kemiskinan dihitung dan diperbandingkan antar waktu dan antar wilayah. Lembaga statistik menggunakan definisi ini untuk mengukur kemiskinan, dengan cara menetapkan Garis Kemiskinan sebagai satu batas minimum pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup layak. Ketika pemerintah memaparkan jumlah orang miskin secara statistik, sebenarnya informasi tersebut merujuk pada definisi kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan atau konsumsi.
2. Kemiskinan adalah kekurangan material. Aspek material yang dilihat bukan hanya terkait pendapatan, tetapi juga kurangnya faktor material lain seperti tempat tinggal, pakaian, sarana transportasi dan komunikasi, maupun akses ke pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya.
3. Kemiskinan adalah kurangnya kemampuan seseorang bukan hanya secara material namun juga non-material seperti pendidikan, keterampilan, kondisi fisik dan psikologis. Seseorang dianggap miskin jika dia tidak mampu hidup secara produktif dan kreatif sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Konsep ini merujuk pada pemikiran Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf peraih penghargaan Nobel. Sen (2001)

mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya kemampuan individu untuk menjadi “sesuatu” atau menjalani “fungsi” tertentu yang bermakna bagi dirinya dan bagi masyarakat. Menurut Sen, seseorang tidak memiliki kemampuan karena banyak faktor, seperti pendidikannya rendah, kesehatannya buruk, atau karena ditindas oleh sistem sosial yang tidak adil. Penyebab orang menjadi miskin bukanlah karena kekurangan uang semata, tetapi karena ketidakmampuannya mengubah uang yang dimiliki menjadi berfungsi seperti kesehatan, pendidikan, sumber daya produktif dan berbagai kesempatan lain. Seluruh pemikiran Sen dalam memahami kemiskinan ini dikenal dengan pendekatan kapabilitas (*capability approach*). Dari pendekatan inilah, konsep kemiskinan tidak hanya dipahami secara moneter, namun juga meliputi banyak dimensi non moneter seperti kesehatan, pendidikan, kesetaraan, kebebasan, bahkan harga diri.

4. Kemiskinan adalah deprivasi atau kekurangan dan keterampasan multidimensional. Kekurangan material hanyalah salah satu dari beberapa dimensi yang saling terkait, antara lain kurangnya keadilan atau persamaan hak, ketidaksiapan menghadapi situasi darurat seperti krisis dan bencana alam, ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain, keterasingan secara geografis dari pusat pertumbuhan ekonom maupun keterasingan sosial dari masyarakat pada umumnya.

Keempat konsep kemiskinan di atas disusun berdasarkan perspektif eksternal dari para ahli dan lembaga pemerintah. Setiap konsep merupakan abstraksi dari pandangan normatif dengan tingkat reduksionis yang berbeda-beda dari orang yang mungkin tidak pernah mengalami kemiskinan.

Chambers (2006) berpendapat bahwa konsep kemiskinan juga perlu digali dari perspektif orang miskin itu sendiri. *World Bank* pernah melakukan sebuah penelitian partisipatif berjudul “*Voices of the Poor*” pada tahun 1990-2000, di mana lebih dari 20.000 orang miskin dari 23 negara diwawancarai untuk mengungkapkan realitas mereka. Merujuk pada penelitian tersebut, Chamber (2006) menyimpulkan bahwa orang miskin melihat realitas kemiskinan sebagai kekurangan pendapatan, kesehatan tidak baik, pekerjaan tidak layak, hubungan sosial yang buruk, serta ketidakamanan, kecemasan, dan ketidakberdayaan. Mereka menginginkan satu kondisi yang relatif sama, dalam bahasa apapun, yang meliputi kecukupan material, kesehatan, kemampuan menyekolahkan anak, kemampuan membantu orang lain, keamanan, dan kebebasan memilih dan bertindak.

1.2 Ukuran Kemiskinan

Data tentang kemiskinan selalu dibutuhkan bagi perencanaan maupun evaluasi kinerja pembangunan. Karena itu, pemerintah dituntut untuk melakukan pengukuran kemiskinan secara periodik dan konsisten.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kemiskinan didefinisikan secara berbeda-beda sesuai dengan perspektif masing-masing. Perbedaan tersebut mengantarkan pada metode pengukuran yang bermacam-macam, yang akhirnya menghasilkan data yang variatif pula.

Metode pengukuran kemiskinan idealnya memenuhi beberapa prinsip, yaitu: dapat dipahami; mudah dijelaskan; sesuai dengan akal sehat; solid secara teknis; layak secara operasional; mudah ditiru. Perbedaan metode pengukuran sebenarnya bukanlah masalah. Sepanjang pengukurannya dilakukan secara periodik dengan metode yang konsisten, kondisi kemiskinan akan dapat diperbandingkan antar waktu dan antar wilayah, sehingga menjadi informasi penting bagi *stakeholders* dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat.

Disini diuraikan dua metode pengukuran kemiskinan yang cukup banyak digunakan, yaitu pengukuran kemiskinan moneter dan pengukuran kemiskinan multidimensional.

1. Kemiskinan Moneter

Kemiskinan secara moneter dihitung berdasarkan garis kemiskinan, yaitu tingkat pendapatan minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memperoleh asupan kalori dan layanan publik sehingga dapat hidup layak. Terdapat dua jenis garis kemiskinan, yaitu Garis Kemiskinan Internasional dan Garis Kemiskinan Nasional.

Garis Kemiskinan Internasional ditetapkan oleh *World Bank* dengan mempertimbangkan besarnya uang yang dibutuhkan seseorang untuk hidup secara layak di setiap negara. Pengukuran dilakukan pada harga barang tertentu, lalu dibandingkan terhadap daya beli mata uang antar negara. Hasilnya adalah Garis Kemiskinan Internasional berdasarkan Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*, PPP). PPP adalah konversi berbagai mata uang menjadi satu unit umum yang dapat dibandingkan dengan memperhitungkan perbedaan harga antar negara.

Sejak tahun 1990an, Bank Dunia telah menetapkan Garis Kemiskinan Internasional yang terus diperbarui. Mulai tahun 2022, Bank Dunia menetapkan Garis Kemiskinan Internasional sebesar US\$ 2,15 PPP per orang per hari untuk mengukur kemiskinan ekstrem. Untuk negara berpenghasilan

menengah bawah, garis kemiskinan ditetapkan US\$3,65, sedangkan untuk negara berpenghasilan menengah atas ditetapkan sebesar US\$6,85 (Jolliffe *et al.*, 2022).

Garis Kemiskinan Nasional di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok selama sebulan. Garis Kemiskinan Nasional terdiri dari dua jenis, yaitu Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Garis Kemiskinan Makanan adalah jumlah pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan pangan setara 2.100 kilokalori per orang per hari. Bahan pangan yang dijadikan dasar perhitungan terdiri dari 52 jenis, meliputi padi-padian, umbi-umbian, daging, ikan, telur, sayur, buah, susu, minyak dan lain-lain.
- b. Garis Kemiskinan Non-Makanan adalah jumlah pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan non pangan seperti perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jumlahnya adalah 47 jenis di wilayah pedesaan dan 51 jenis di perkotaan

Garis kemiskinan diperbarui pada bulan Maret dan September setiap tahunnya. Pada Maret 2023, BPS menetapkan Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp. 550.458,00 per orang per bulan, terdiri dari Rp. 408.522,00 untuk pengeluaran makanan, dan Rp. 141.936,00 untuk pengeluaran non-makanan. Artinya, jika konsumsi seseorang dalam sebulan kurang dari jumlah ini, maka secara statistik ia dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selanjutnya, garis kemiskinan ini dapat juga dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu garis kemiskinan perkotaan sebesar Rp. 569.299,00, dan garis kemiskinan perdesaan sebesar Rp. 525.050,00 (BPS, 2023). Terlihat bahwa garis kemiskinan perkotaan lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa orang membutuhkan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar di perkotaan.

Angka kemiskinan di Indonesia akan berbeda, tergantung pada garis kemiskinan yang digunakan dalam perhitungan. Sebagai contoh, perbandingan angka kemiskinan pada tahun 2021 berdasarkan beberapa garis kemiskinan adalah sebagai berikut (Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Data Kemiskinan di Indonesia berdasarkan Berbagai Garis Kemiskinan, tahun 2021

No	Standar	Jumlah Orang Miskin	Angka Kemiskinan
1	Garis Kemiskinan Nasional [September 2021 sebesar Rp 486.168,00 per orang per bulan]	26,50 Juta	9,71%
2	Garis Kemiskinan Internasional [US\$2.15 PPP per orang per hari]	9,8 Juta	3,6%
3	Garis Kemiskinan Negara Penghasilan Menengah Bawah [US\$3.65 PPP per orang per hari]	62 Juta	22,4%
4	Garis Kemiskinan Negara Penghasilan Menengah Atas [US\$6.85 PPP per orang per hari]	167,8 Juta	60,7%

Sumber: diolah dari BPS (2022) dan World Bank (2022)

Informasi di atas menunjukkan bahwa angka kemiskinan akan naik jika standar pengukurannya diubah dari Garis Kemiskinan Nasional menjadi Garis Kemiskinan Negara Penghasilan Menengah Bawah dan atau Menengah Atas.

Bentuk ukuran kemiskinan moneter lainnya adalah indeks kesejahteraan yang diukur berdasarkan indikator yang dapat mencerminkan pendapatan, atau disebut sebagai indikator proksi. Pemerintah Indonesia menghitung Indeks Kesejahteraan berdasarkan beberapa indikator, antara lain luas rumah, jenis lantai, jenis dinding, kepemilikan sanitasi, akses listrik, akses air bersih, dan kepemilikan aset. Pengumpulan data dan perhitungan indeks dilakukan secara periodik tiga tahun sekali oleh BPS melalui Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS). Hasil pendataan ini disimpan dalam satu database bernama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berisi nilai indeks kesejahteraan rumah tangga. DTKS dijadikan sebagai rujukan dalam pembagian berbagai program perlindungan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

2. Kemiskinan Multidimensional

Pengukuran yang disederhanakan hanya berdasarkan pendapatan sering dikritik karena tidak mampu menjelaskan sifat multidimensionalitas dari kemiskinan. Pengukuran kemiskinan multidimensional merupakan alternatif selain pengukuran kemiskinan moneter yang dianggap kurang komprehensif. Pengukuran ini menempatkan indikator pendidikan, kesehatan, akses ke layanan publik, aset dan pendapatan sebagai faktor penting dalam menggambarkan kondisi kemiskinan.

Multidimensionalitas kemiskinan diringkas dalam satu indeks melalui pembobotan setiap indikator. Berbagai metode pembobotan telah diajukan. Lembaga UNDP dan *Oxford Poverty and Human Development Initiative* mulai tahun 2010 mengembangkan ukuran *Multidimensional Poverty Index*. Pada saat yang sama, *World Bank* mengembangkan ukuran *Multidimensional Poverty Measure*. Perbedaan kedua metode ini terletak pada jenis dimensi kemiskinan yang dianalisa. Di bagian ini akan dijelaskan metode pengukuran kemiskinan multidimensi yang dikembangkan oleh *World Bank*, yaitu *Multidimensional Poverty Measure*.

Multidimensional Poverty Measure (MPM) adalah sebuah indeks yang menggambarkan persentase rumah tangga di suatu negara yang mengalami kekurangan tiga dimensi kesejahteraan: kemiskinan moneter; pendidikan; layanan infrastruktur dasar. Ketiga dimensi ini dijabarkan lagi menjadi enam indikator, yaitu: konsumsi atau pendapatan; tingkat pendidikan; partisipasi pendidikan; akses air bersih; akses sanitasi; akses listrik. Setiap dimensi dan indikator ini lalu diberi bobot (Tabel 1.2).

Tabel 1.2 Dimensi, Indikator, dan Bobot dalam *Multidimensionality Poverty Measure*

Dimensi	Indikator	Bobot
Moneter, atau Pendapatan	Konsumsi atau pendapatan harian kurang dari US\$ 2,15 PPP per orang	1/3
Pendidikan	Setidaknya satu anak usia sekolah (sampai dengan usia kelas 8) tidak terdaftar di sekolah	1/6
	Tidak ada orang dewasa (usia kelas 9 atau lebih) dalam rumah tangga yang menyelesaikan pendidikan dasar	1/6

Dimensi	Indikator	Bobot
Akses ke infrastruktur dasar	Rumah tangga tidak memiliki akses air minum	1/9
	Rumah tangga tidak memiliki akses sanitasi	1/9
	Rumah tangga tidak memiliki akses listrik	1/9

Sumber: World Bank (2022).

Menurut metode ini, seseorang dianggap miskin multidimensi jika ia tidak memenuhi ambang batas setidaknya dalam satu dimensi atau dalam kombinasi indikator yang bobotnya setara dengan satu dimensi. Rumah tangga akan dianggap miskin jika kekurangan indikator yang bobotnya mencapai sepertiga atau lebih. Karena dimensi pendapatan diukur hanya dengan satu indikator, maka siapa saja yang miskin pendapatan secara otomatis juga miskin menurut ukuran kemiskinan multidimensi.

Multidimensionality Poverty Measure satu negara setidaknya sama, atau bahkan akan lebih tinggi dari kemiskinan moneter. Dibandingkan dengan dimensi moneter, jumlah orang miskin di tingkat global naik 60% ketika dimensi pendidikan dan infrastruktur ditambahkan bersamaan. Hal ini mencerminkan peran dimensi non-moneter dalam pengukuran kemiskinan.

1.3 Perangkap Kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsekuensi dari rendahnya pendidikan dan keterampilan, kesehatan yang buruk, dan atau kekurangan modal. Namun, akar masalahnya tidak terbatas pada faktor-faktor tersebut. Kemiskinan sering diperparah oleh kemalasan, kebiasaan pasrah pada nasib, serta sikap tidak ingin berprestasi atau kurangnya *need of achievement*. Kombinasi faktor ini menyebabkan kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh nilai, kebiasaan dan budaya yang salah pada suatu masyarakat.

Kemiskinan sulit dihilangkan pada kondisi struktural yang dicirikan dengan sistem ekonomi yang tidak adil, stratifikasi sosial yang kaku, sistem pemerintahan yang korup, maupun kebijakan yang terlalu memihak para pemilik modal dan tidak memperhatikan masyarakat kecil. Hal ini melahirkan kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang tercipta karena salah kebijakan pemerintah atau karena struktur sosial, ekonomi dan politik yang terlalu timpang pada suatu negara.

Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan telah dilakukan oleh berbagai pemerintah dan lembaga internasional selama bertahun-tahun.

Kenyataannya, sangat sulit bagi seseorang untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini dipahami sebagai perangkap kemiskinan (*Poverty Trap*), yaitu suatu mekanisme yang membuat seseorang tetap miskin terus-menerus. Konsep perangkap kemiskinan menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi sekarang adalah karena kemiskinan di masa lalu, dan kemiskinan sekarang akan terus melahirkan kemiskinan di masa depan.

Perangkap kemiskinan dapat diilustrasikan sebagai berikut. Orang yang memiliki pendapat rendah akan sulit meraih pendidikan yang tinggi karena mereka tidak memiliki biaya untuk sekolah. Mereka juga memiliki kesehatan yang buruk karena kekurangan nutrisi atau tidak mampu berobat. Rendahnya pendidikan dan kesehatan ini akan menghambat produktivitasnya dalam bekerja, atau kesempatannya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Konsekuensinya, mereka hanya mendapatkan sedikit penghasilan. Dengan pendapatan yang rendah, seseorang hanya mampu atau bahkan pas-pasan untuk membiayai hidup sehari-hari. Mereka tidak memiliki tabungan dan tidak mampu berinvestasi saat berkeluarga. Mereka akan terus-menerus berada dalam kemiskinan dan tidak mampu keluar dari lingkaran tersebut, bahkan akan mewariskan kondisi yang sama kepada keturunannya (Figure 1.1).

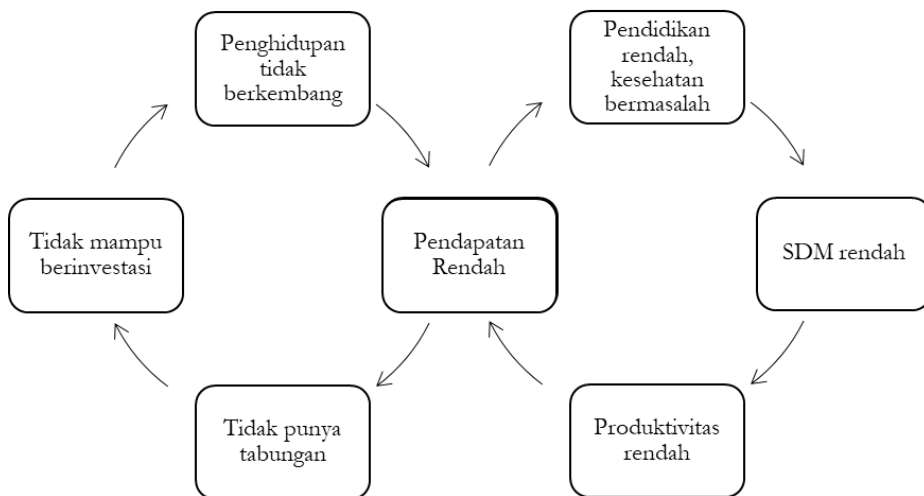


Figure 1.1 Ilustrasi Perangkap Kemiskinan

Sumber: dimodifikasi dari <https://mrbrackrog.wordpress.com/>

Perangkap kemiskinan tercipta karena secara teoritis sistem ekonomi mempersyaratkan modal yang besar untuk keluar dari kemiskinan, misalnya untuk memulai usaha baru sampai dengan menghasilkan pendapatan yang memadai dan stabil. Orang miskin tidak akan pernah mampu mengumpulkan modal tersebut tanpa ada bantuan dari pihak luar. Berbagai faktor dapat memperkuat perangkap kemiskinan pada sebuah negara, seperti pelayanan publik yang diskriminatif, pemerintahan yang korup, liberalisasi ekonomi, hingga pelarian modal ke luar negeri.

1.4 Makna Pembangunan dari Perspektif Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan sering diartikan secara sempit di Indonesia. Pembangunan diidentikkan dengan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan per kapita. Pembangunan juga sering diartikan sebagai upaya meningkatkan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan dan gedung, maupun industrialisasi dan penerapan teknologi terbaru.

Pembangunan sebenarnya memiliki makna yang lebih luas dari sekadar pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur. Sen (2021) berpendapat bahwa pembangunan sebaiknya dimaknai sebagai upaya meningkatkan kapasitas seseorang dan memberikan kebebasan untuk menjalani hidup yang bermakna bagi mereka.

Bagi masyarakat miskin, pembangunan adalah penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, banyak masyarakat miskin terperangkap dalam siklus atau rantai kemiskinan yang tidak ada akhirnya. Hakikat pembangunan bagi mereka adalah pembebasan dari perangkap kemiskinan melalui dua dimensi, yaitu:

1. Pembebasan dari kondisi buruk yang menyebabkan dan menyertai kemiskinan. Pembangunan berarti melepaskan seseorang dari kondisi pendapatan yang rendah, pendidikan dan keterampilan yang rendah, kesehatan yang buruk, serta pekerjaan yang tidak layak. Termasuk di sini adalah pembebasan dari konsekuensi negatif yang diakibatkan oleh kemiskinan seperti ketidakberdayaan, ketergantungan, diskriminasi, dan pengucilan sosial.
2. Pembebasan untuk menjalani hidup yang lebih baik, yang diyakininya bermakna. Pembangunan berarti memberi kesempatan bagi orang miskin untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, penghasilan yang

cukup, penerimaan secara sosial, dan pembebasan untuk menikmati suatu sistem sosial dan politik yang lebih setara.

Sulit bagi orang miskin untuk dengan sendirinya keluar dari jerat kehidupan yang membelenggu mereka. Kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah harus mampu membantu masyarakat keluar dari perangkap kemiskinan. Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dalam perumusan strategi penanggulangan kemiskinan. Perlindungan sosial akan membantu masyarakat miskin keluar dari himpitan penghidupan mereka, serta memperkuat kapasitasnya dalam menghadapi berbagai risiko sosial dan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat akan membuat mereka mandiri dan mampu menjalani kehidupan yang berarti. Pada skala yang lebih luas, pemberdayaan juga membantu menciptakan satu struktur politik dan sosial yang lebih adil.

Bab 2 | Kerentanan

2.1 Konsep Kerentanan

Istilah “Kerentanan” telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang, seperti psikologis, sosial, ekonomi, kesehatan, kebencanaan, lingkungan, pertahanan, keamanan, teknologi dan dunia siber. Variabilitas penggunaan untuk mengulas isu-isu yang berbeda dan bersifat khusus mengakibatkan konsep kerentanan menjadi sangat beragam dalam berbagai literatur.

Sampai saat ini belum ada definisi universal dari kerentanan. Kerentanan secara umum menggambarkan ketidakmampuan menghadapi bahaya, mencerminkan ketidakberdayaan dan keterpinggiran, juga lemahnya perlindungan fisik dan sosial-ekologis. Konsep kerentanan sangat terkait dan bahkan tidak bisa dipisahkan dari beberapa konsep lainnya, yaitu Krisis, Risiko, dan Kapasitas. Hal ini akan diuraikan satu persatu, sebagai berikut.

1. Krisis

Krisis adalah peristiwa besar yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap seseorang, organisasi, atau masyarakat. Krisis dapat juga didefinisikan sebagai ancaman serius terhadap struktur, nilai, kebiasaan, dan sistem yang normal dan sedang berlaku, yang muncul tanpa prediksi dan memerlukan pengambilan keputusan yang cepat untuk mengatasinya.

Bahaya yang tidak dimitigasi dengan efektif akan menciptakan krisis. Ketika intensitasnya memuncak, sistem yang ada tidak lagi mampu menghadapinya. Akibatnya, sistem runtuh dan menimbulkan kekacauan. Peristiwa krisis biasanya terjadi secara mendadak, dengan sedikit atau tanpa peringatan, dan menciptakan hal negatif yang tidak mampu diatasi dengan prosedur rutin dan normal.

Krisis dapat terjadi pada berbagai bidang, seperti lingkungan, politik, sosial dan ekonomi. Contohnya, kerusakan alam, bencana, dan polusi adalah bentuk dari krisis lingkungan. Pergantian rezim atau penguasa secara mendadak dapat menimbulkan krisis politik. Keadaan hidup tidak kondusif dan keresahan publik yang terus-menerus adalah bentuk dari krisis sosial. Penurunan nilai

tukar mata uang sebuah negara secara drastis dan kenaikan harga barang-barang yang tidak terkendali adalah contoh krisis di bidang ekonomi.

Krisis ekonomi adalah bentuk ancaman yang paling sering terjadi dewasa ini dan paling merugikan masyarakat miskin. Krisis ditunjukkan dari penurunan ekonomi suatu negara secara tiba-tiba, disertai dengan kekacauan indikator makro seperti kontraksi produk domestik bruto, inflasi, penurunan nilai tukar mata uang, atau terjadinya pengangguran massal. Krisis seperti ini biasanya mengakibatkan penambahan jumlah penduduk miskin, penurunan derajat kesehatan dan pendidikan publik, serta hilangnya mata pencaharian sebagian besar masyarakat.

2. Risiko

Krisis mendatangkan risiko, atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk. Risiko adalah ketidakpastian akibat atau konsekuensi negatif dari suatu peristiwa terhadap hal yang bernilai atau dihargai manusia. Risiko meliputi segala kemungkinan merugikan seperti kematian atau cedera, kehilangan harta benda, penurunan penghasilan, mata pencaharian dan penghidupan, atau kerusakan bangunan dan lingkungan.

Masyarakat miskin berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai jenis risiko. Kehidupan mereka disibukkan dengan upaya menghindari dan mengatasi risiko. *Asian Development Bank* (2003) mengidentifikasi empat jenis risiko utama yang harus dihadapi masyarakat miskin, yaitu:

- a. risiko yang terkait dengan siklus hidup, yang dapat terjadi semenjak lahir sampai dengan meninggal dunia. Risiko ini misalnya adalah kelaparan, kurang gizi, *stunting*, sakit, kecelakaan, disabilitas, menua dan meninggal;
- b. risiko ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan, gagal panen, maupun penghasilan yang rendah;
- c. risiko lingkungan, seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, atau gempa bumi;
- d. risiko sosial atau yang terkait tata kelola/*governance*, seperti pengucilan, diskriminasi, kekerasan rumah tangga, perbudakan atau eksploitasi.

3. Kapasitas

Kemampuan seseorang atau masyarakat untuk menghadapi risiko ditentukan oleh berbagai faktor, terutama kapasitas mereka. Dalam konteks ini, kapasitas adalah kekuatan, sumber daya, dan cara yang dimiliki oleh

negara, masyarakat atau seseorang, yang memungkinkan mereka untuk mencegah, mempersiapkan diri, menanggulangi, bertahan atau dengan cepat memulihkan diri dari krisis. Kapasitas juga merupakan kombinasi dari semua kekuatan yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang dapat mengurangi dampak negatif dari suatu krisis. Kapasitas dalam menghadapi krisis merujuk pada cara seseorang atau masyarakat menggunakan sumber daya yang tersedia sebelum, selama, dan setelah terjadi krisis.

CADRI (2011) mengklasifikasikan kapasitas ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

a. Lingkungan.

Level ini berkaitan dengan sistem yang menentukan aturan main dalam satu masyarakat. Kapasitas lingkungan dibentuk oleh kebijakan dan perundangan, kelembagaan, kepemimpinan, proses politik dan hubungan kekuasaan serta norma-norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat.

b. Organisasi.

Level ini berkaitan dengan strategi internal, prosedur dan kerangka kerja organisasi dalam mengelola situasi yang terjadi.

c. Individu.

Kapasitas pada level ini dibentuk oleh tingkat pendidikan, pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh seseorang.

4. Kerentanan

Kerentanan adalah kondisi yang melekat secara fisik, perilaku, sosial, ekonomi, atau lingkungan, yang melemahkan kapasitas seseorang atau masyarakat untuk menerima risiko yang diakibatkan oleh suatu krisis. Kerentanan juga merupakan ketidakmampuan sebuah sistem untuk bertahan terhadap gangguan yang datang dari eksternal. Ia diukur dari sejauh mana seseorang, masyarakat atau sebuah sistem mampu bereaksi, menghadapi dan atau bertahan selama terjadinya krisis.

Kerentanan adalah penyebab seseorang menjadi tidak optimal dalam menghadapi risiko yang tercipta dari suatu krisis. Besar kecilnya risiko ditentukan oleh derajat krisis dan kapasitas seseorang untuk menghadapinya. Hal ini dijelaskan dalam hubungan sebagai berikut:

a. Krisis menciptakan risiko. Semakin besar krisis, semakin tinggi risiko;

b. Kapasitas menurunkan kerentanan. Semakin tinggi kapasitas, semakin rendah kerentanan;

- c. Kerentanan memperburuk risiko. Semakin tinggi kerentanan, semakin tinggi risiko.

Hubungan antar konsep tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar berikut.

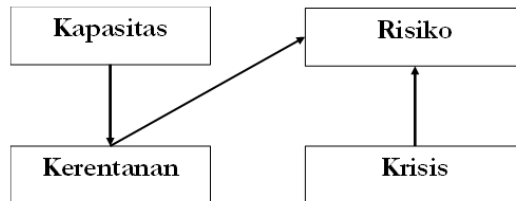


Figure 2.1 Hubungan antara Krisis, Risiko, Kerentanan dan Kapasitas

Berdasarkan hubungan di atas, maka kerentanan dapat diturunkan dengan cara menambah kapasitas, dan atau mengelola krisis. Kapasitas adalah hal yang dapat dimodifikasi, atau dapat dinaikkan maupun diturunkan melalui intervensi tertentu. Dengan demikian, kerentanan seseorang atau masyarakat dapat diturunkan dengan cara menaikkan kapasitas mereka supaya mampu menghadapi krisis yang mungkin terjadi.

2.2 Jenis Kerentanan

Berdasarkan jenis kerugian yang ditimbulkan ketika menghadapi risiko, kerentanan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Kerentanan fisik, yaitu ketidakmampuan tubuh seseorang maupun bangunan fisik dan infrastruktur untuk menghadapi dampak bahaya tertentu;
2. Kerentanan lingkungan, yaitu ketidakmampuan sistem lingkungan seperti flora, fauna, ekosistem, atau keanekaragaman hayati untuk menghadapi dampak bahaya tertentu;
3. Kerentanan sosial, yaitu ketidakmampuan kelompok tertentu yang memiliki kapasitas terbatas, seperti masyarakat miskin, pekerja informal, anak-anak, kelompok lanjut usia, atau penyandang disabilitas untuk merespon bahaya atau krisis tertentu.
4. Kerentanan ekonomi, yaitu ketidakmampuan suatu sistem ekonomi seperti mata pencaharian, kegiatan bisnis, atau tingkat kesejahteraan untuk menghadapi krisis tertentu.

Kerentanan sosial dan kerentanan ekonomi adalah dua kondisi yang saling terkait. Kerentanan sosial ekonomi merujuk pada ketidakmampuan seseorang atau masyarakat untuk merespon berbagai tekanan dan guncangan yang mengancam kesejahteraan, pendapatan, pekerjaan dan kehidupan mereka. Kerentanan sosial ekonomi adalah konsekuensi negatif dari kesenjangan ekonomi, yang diperparah oleh faktor sosial yang kurang mendukung, seperti pendidikan yang rendah, akses yang terbatas terhadap sumber daya, serta posisi seseorang yang termarginalkan dalam struktur sosial masyarakat. Kondisi ini mengurangi kapasitas mereka untuk mengantisipasi, menghadapi dan pulih dari dampak krisis.

2.3 Hubungan Kemiskinan dan Kerentanan Sosial Ekonomi

Konsep kerentanan berbeda dari konsep kemiskinan, namun keduanya saling terkait. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk hidup layak, sedangkan kerentanan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai kemungkinan seseorang untuk jatuh miskin karena adanya guncangan dan tekanan ekonomi.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, kerentanan sosial ekonomi mencerminkan kondisi di mana rumah tangga saat ini tidak miskin namun besar kemungkinan akan jatuh miskin jika krisis terjadi. Jika definisi ini diperluas, kerentanan sosial ekonomi dapat juga meliputi rumah tangga miskin yang kemungkinan besar akan tetap miskin bahkan jika tidak terjadi krisis.

Kemiskinan merupakan kondisi yang dinamis dan peka terhadap perubahan. Perbedaan derajat kerentanan adalah faktor yang menyebabkan apakah seseorang akan tetap miskin, jatuh miskin atau keluar dari kemiskinan.

Kerentanan sosial ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang kuat dengan krisis atau bencana, serta ketahanan dan kemampuan merespon dan beradaptasi. Dalam konteks krisis sosial ekonomi, terdapat dua istilah yang perlu dipahami, yaitu guncangan (*shocks*) dan tekanan (*stress*). Guncangan adalah peristiwa merugikan yang tidak terprediksi dan tiba-tiba terjadi seperti gempa bumi, kebakaran, epidemi, dan krisis ekonomi. Tekanan adalah peristiwa merugikan yang berkelanjutan dan kumulatif dalam jangka panjang, seperti kekeringan atau penurunan sumber daya yang terus-menerus.

Terdapat sangat banyak peristiwa guncangan dan tekanan sosial ekonomi yang membawa risiko bagi kehidupan masyarakat. Inflasi yang tidak terkendali, kondisi makro ekonomi yang tidak stabil, atau pemutusan hubungan kerja akan menurunkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Bencana alam, kekeringan, serangan hama membawa risiko gagal panen, yang membuat petani tidak memiliki pendapatan. Sakit atau kematian satu anggota keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi dapat membuat rumah tangga tersebut kehilangan sumber pendapatan, sehingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup.

2.4 Perspektif dalam Memahami Kerentanan Sosial Ekonomi

Bohle dalam De León (2006) berpendapat bahwa kerentanan terdiri dari dua sisi, yaitu eksternal dan internal. Sisi eksternal berfokus pada paparan (*exposure*) yang datang dari lingkungan, sedangkan sisi internal berfokus pada tindakan mengatasi (*Coping*) dampak negatif dari sebuah krisis. Kerentanan dipandang sebagai konsep multidimensional yang ditentukan oleh derajat paparan yang terjadi dan kapasitas politik, ekonomi, dan kelembagaan seseorang untuk menghadapinya pada situasi dan waktu tertentu (Figure 2.2).

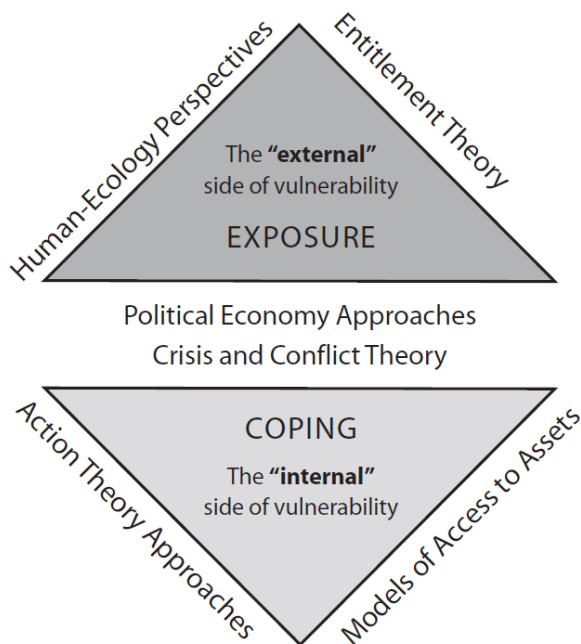


Figure 2.2 Model Dua Sisi Kerentanan

Sumber: Bohle dalam De León (2006)

Penjelasan dari model dua sisi kerentanan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sisi eksternal kerentanan mengacu pada guncangan dan tekanan sosial ekonomi yang dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu:

a. Perspektif human-ekologi.

Menurut perspektif ini, bencana atau krisis dipandang sebagai konsekuensi langsung dari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Sebagai contoh, kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi tidak terelakan dari ekstraksi sumber daya alam yang berlebihan di satu wilayah. Kerentanan seseorang atau masyarakat akan semakin meningkat jika mereka memperlakukan alam dan lingkungannya dengan cara-cara yang tidak bijaksana.

b. Teori Keberhakan (*Entitlement*)

Kerentanan dipandang sebagai implikasi dari tidak adanya akses seseorang terhadap sumber daya, bukan karena kelangkaan sumber daya itu sendiri. Sebagai contoh, kasus kelaparan massal terjadi bukan karena tidak ada bahan pangan di satu negara. Produksi pertanian mungkin sedang meningkat dan bahan pangan tersedia, namun komoditas yang ada dikuasai oleh sekelompok orang tertentu yang memainkan harga. Hal ini membuat orang miskin tidak mampu membelinya, dan menjadi rentan terhadap kelaparan. Contoh lainnya, rendahnya derajat kesehatan terjadi bukan karena tidak ada fasilitas kesehatan. Prasarana kesehatan seperti Puskesmas atau Poliklinik Desa mungkin saja tersedia di setiap wilayah, tapi masyarakat miskin tidak mampu mengaksesnya karena mereka tidak memiliki biaya. Akibatnya, mereka rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan. Dalam perspektif ini, seseorang menjadi semakin rentan jika dia tidak memiliki akses terhadap sumber daya.

Berdasarkan pendekatan keberhakan (*entitlement*), dapat dipahami bahwa pengentasan kemiskinan dan kerentanan tidak akan berhasil hanya melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Harus ada upaya untuk memastikan bahwa masyarakat rentan dan miskin memiliki akses terhadap barang dan jasa untuk mempertahankan taraf hidup mereka (Sutiyo, Riyani & Meltarini, 2018).

c. Pendekatan ekonomi politik

Kerentanan dipandang sebagai akibat dari ketimpangan sosial, ekonomi dan politik. Dalam satu sistem sosial yang timpang, selalu terdapat sebagian kelompok yang lebih rentan dibandingkan lainnya. Kelompok ini biasanya

meliputi komunitas minoritas, termarginalkan dan terpinggirkan dalam sistem politik, yang merupakan objek penderita dari ketimpangan tersebut. Semakin timpang suatu sistem sosial, ekonomi dan politik, maka akan semakin banyak orang yang rentan secara sosial ekonomi di tengah masyarakat.

2. Sisi internal kerentanan mengacu pada tindakan menghadapi krisis, yang dapat dilihat dari beberapa perspektif:

a. Pendekatan teori aksi

Perspektif ini berpandangan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kesadaran dan selalu berusaha memahami kondisi struktural di lingkungannya. Mereka akan menyesuaikan tindakannya berdasarkan pada pemahaman mereka yang terus berkembang terhadap lingkungannya. Kerentanan seseorang dipengaruhi oleh pilihan tindakannya dalam menghadapi krisis.

b. Model akses terhadap sumber daya atau aset

Aset yang dimaksud di sini dapat berupa aset ekonomi, keuangan, sosial-politik, infrastruktur dan lain-lain. Aset berfungsi untuk mengurangi kerentanan, di mana semakin banyak aset (termasuk aset sosial dan politik) yang dimiliki maka akan semakin besar kapasitas seseorang untuk mengatasi risiko, tekanan maupun guncangan.

c. Teori konflik dan krisis

Menurut perspektif ini, kapasitas seseorang untuk mengelola konflik dan menyelesaikan situasi krisis dianggap sebagai faktor penentu keberhasilan dalam mengatasi perubahan dan risiko yang menyertainya.

Bab 3 | Profil Kemiskinan dan Kerentanan di Indonesia

3.1 Perkembangan Angka Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melakukan penghitungan angka kemiskinan di Indonesia sejak tahun 1980an. Saat ini perhitungan dilakukan secara periodik dua kali setahun, yaitu setiap bulan Maret dan September. Data yang diolah didapatkan dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pada tahun 2023, jumlah responden Susenas adalah 345.000 rumah tangga yang tersebar di 514 kabupaten/kota pada 34 provinsi di Indonesia (BPS, 2023).

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs method*) dalam melakukan perhitungan jumlah orang miskin. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2023). Seseorang dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pemerintah mulai gencar mengurangi kemiskinan pada masa pemerintahan Presiden Suharto (Sutiyo & Maharjan, 2011; 2017a). Pada awal masa kepemimpinannya, Indonesia sedang mengalami kemiskinan parah di mana pendapatan per kapita hanya US\$ 50 dan angka kemiskinan absolut 65%. Indonesia juga mengalami kelangkaan pangan sehingga harus mengimpor 1,5 juta ton beras per tahun (BPS, Bappenas & UNDP, 2001). Melalui berbagai program pembangunan pertanian dan pedesaan serta subsidi dan stabilisasi kondisi makro ekonomi, pemerintah mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan sampai tahun 1990an.

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997/1998 telah menaikkan kembali jumlah orang miskin. Angka kemiskinan secara umum terus menurun pada periode pemerintahan selanjutnya atau selama masa reformasi. Kenaikan terjadi pada tahun 2006 setelah pencabutan subsidi bahan bakar, dan pada tahun 2020 saat terjadi pandemi. Sampai Maret 2023, jumlah penduduk

miskin yang dihitung berdasarkan Garis Kemiskinan Nasional adalah 25,90 juta orang, atau sekitar 9,36 persen dari populasi (Figure 3.1).

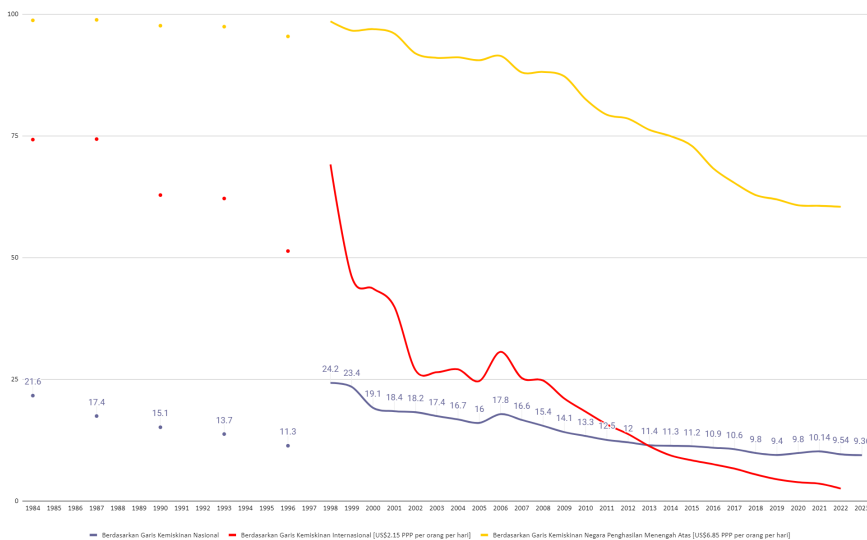


Figure 3.1 Angka Kemiskinan di Indonesia, 1984-Maret 2023
Sumber: diolah dari data BPS dan World Bank

Penurunan kemiskinan pasca Krisis Moneter 1997/1998 berlangsung relatif lambat. Hal ini menunjukkan bahwa profil dan karakteristik kemiskinan saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan masa lalu. Di masa awal Orde Baru, kemiskinan memiliki akar masalah yang relatif sama, yaitu rendahnya produktivitas pertanian. Program yang dibutuhkan untuk mengentaskan mereka juga relatif seragam, yaitu pembangunan pertanian. Sebagian besar dari penduduk miskin pada masa itu telah dapat dituntaskan dengan program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian (Revolusi Hijau). Kemiskinan yang ada saat ini dapat dikatakan sebagai kemiskinan sisa yang sulit dituntaskan dengan program yang seragam secara nasional. Mereka memiliki penyebab, permasalahan, dan kebutuhan yang bervariasi antar orang dan antar lokasi. Jenis program yang diperlukan mungkin saja berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Salah satu karakteristik khas dari kemiskinan di Indonesia adalah tingginya kerentanan (Sutiyo & Maharjan, 2011). Jumlah orang miskin di Indonesia mudah naik jika terjadi krisis atau gejolak ekonomi. Hal ini dapat

diamati dari fluktuasi angka kemiskinan pada tahun 1998, 2006 dan 2020 yang masing-masing mengiringi krisis moneter, pencabutan subsidi bahan bakar, dan pandemi.

3.2 Kemiskinan Ekstrem

Sebagian dari penduduk miskin diklasifikasikan dalam kategori kemiskinan ekstrem. BPS mendefinisikan miskin ekstrem sebagai penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$ 1,9 per hari yang diukur berdasarkan Paritas Daya Beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP). Angka ini setara dengan Rp. 351.957,4 per orang per bulan pada Maret 2023. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pangan, air bersih, sanitasi, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Terdapat sejumlah 1,12% penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada tahun 2023 (BPS, 2023).

Negara-negara di dunia berkomitmen untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem paling lambat tahun 2030, sebagaimana telah disepakati bersama dalam dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pemerintah Indonesia sendiri memiliki target untuk menghilangkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada akhir tahun 2024. Target ini menjadi enam tahun lebih cepat dibandingkan dengan SDGs.

3.3 Kemiskinan berdasarkan Wilayah

Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dengan demikian maka sebagian besar kelompok miskin juga tinggal di wilayah ini. Hampir separuh dari penduduk miskin Indonesia tinggal di tiga provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (BPS, 2023). Meski demikian, angka kemiskinan di wilayah ini umumnya lebih rendah dari rata-rata nasional.

Tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional biasanya ditemukan di Indonesia bagian timur. Pemerintah daerah di wilayah ini umumnya sangat luas, berpenduduk sedikit, dan memiliki persoalan ketertinggalan infrastruktur sosial-ekonomi. Menurut Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 62 Kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Mereka tersebar di sejumlah wilayah seperti Papua, NTT, Maluku dan Nias. Wilayah ini juga menjadi tempat bagi fenomena kemiskinan ekstrem. Provinsi dengan kemiskinan ekstrem tertinggi pada tahun 2023 adalah Papua Barat (7,67%), Papua (6,43%), dan NTT (3,94%),

sedangkan provinsi dengan persentase terendah Kaltim (0,1%), Bali (0,19%), dan Bangka Belitung (0,24%) (BPS, 2023).

Kemiskinan di Indonesia juga dapat diperbandingkan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan desa yang dilakukan pemerintah telah memungkinkan desa untuk mengejar ketertinggalannya. Sebagai ilustrasi, menurut perhitungan World Bank (2023), jumlah penduduk miskin yang tinggal di pedesaan menurun dari 82 juta pada tahun 2002 menjadi 19 juta orang pada tahun 2022. Pada periode yang sama di wilayah perkotaan jumlahnya menurun dari 41 juta menjadi 24 juta orang. Artinya, angka kemiskinan di wilayah pedesaan selama ini menurun lebih cepat dibandingkan dari wilayah perkotaan. Pada tahun 2022, terdapat sejumlah 2,5 juta penduduk miskin ekstrem di perkotaan, dan 1,7 juta penduduk miskin ekstrem di pedesaan (World Bank, 2023).

3.4 Profil Kelompok Miskin

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh BPS (2023), ditemukan bahwa rumah tangga miskin cenderung mempunyai anggota keluarga yang lebih banyak, usia kepala keluarga yang lebih tua dan pendidikan yang lebih rendah dibanding rumah tangga tidak miskin. Mereka umumnya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (48,86%). Sebagian besar termasuk kategori petani gurem, yaitu petani yang menyewa atau memiliki lahan pertanian kurang dari setengah hektar.

Analisis dari World Bank (2023) menunjukkan bahwa satu dari enam rumah tangga miskin di Indonesia pada tahun 2023 dikategorikan miskin struktural. Di sini, miskin struktural didefinisikan sebagai mereka yang memiliki kemungkinan lebih dari 10 persen untuk tetap miskin pada tahun berikutnya. Kelompok ini umumnya tidak memiliki aset atau modal yang cukup untuk membuat mereka keluar dari kemiskinan. Sumber daya pada rumah tangga mereka terlalu rendah sehingga tidak mampu menghasilkan pendapatan yang memadai.

Berbagai laporan BPS menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar penduduk miskin digunakan untuk membeli beras. Pengeluaran cukup besar selanjutnya adalah rokok atau produk tembakau. Patut disayangkan bahwa keluarga miskin yang membeli rokok justru mengkompensasinya dengan mengeluarkan uang lebih sedikit untuk membeli sumber protein dan makanan bergizi seperti telur dan susu.

3.5 Profil Kelompok Rentan

Pengukuran terhadap kerentanan dapat dilakukan mulai dari level rumah tangga, komunitas, desa, kabupaten sampai dengan negara. Seseorang diklasifikasikan sebagai kelompok rentan jika dia memiliki kondisi tertentu yang menjadikannya tidak mampu menghadapi bahaya, bencana, gejala sosial ekonomi dan atau krisis karena adanya keterbatasan tertentu.

Unsur pembentuk kerentanan meliputi kekurangan fisik, pengetahuan, pendapatan, aset, dan sumber daya lainnya. Perpaduan unsur ini biasa ditemukan pada kelompok anak-anak, lanjut usia, ibu hamil dan menyusui, atau penyandang disabilitas. Kelompok rentan selanjutnya adalah para pekerja sektor informal. Sektor ini meliputi semua kegiatan ekonomi yang tidak memiliki pengaturan formal serta tanpa perlindungan sosial seperti para pekerja mandiri, pedagang kaki lima dan asisten rumah tangga.

Kelompok rentan lainnya adalah kelompok minoritas atau kelompok yang termarginalkan secara politik, sosial dan ekonomi. Contohnya adalah kelompok masyarakat adat, suku terasing, dan penghayat kepercayaan tertentu. Kerentanan mereka semakin bertambah karena pelayanan publik sering mendiskriminasikan kelompok ini. Penelitian menemukan bahwa kebijakan pemerintah kurang memperhatikan kepentingan mereka karena lemahnya akses terhadap proses pengambilan keputusan publik. Karakteristik lingkungan tempat tinggal beberapa masyarakat adat biasanya cukup terisolir, bahkan rawan bencana atau minim infrastruktur, sehingga menciptakan keterbatasan dalam merespon berbagai risiko yang mungkin terjadi (Fadhilah, Sutiyo, & Ilyas, 2018).

Segmen kelompok rentan yang paling besar di Indonesia adalah masyarakat miskin. Meskipun jumlah kelompok miskin saat ini sudah di bawah 10% dari populasi (BPS, 2023), berbagai studi juga menemukan bahwa sekitar 30% penduduk Indonesia merupakan mereka yang tidak dikategorikan miskin namun berada hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Jumlah ini relatif tidak berubah sejak tahun 2011 (World Bank, 2023). Mereka hidup dengan penghasilan yang pas-pasan diatas garis kemiskinan, yang membuatnya rentan kembali jatuh miskin saat terjadi krisis.

Naiknya angka kemiskinan saat krisis moneter 1998, pencabutan subsidi bahan bakar tahun 2006 dan pandemi tahun 2020 adalah bukti dari tingginya kerentanan sosial ekonomi di Indonesia (Sutiyo & Maharjan, 2011; Sutiyo, 2023). Krisis dapat dengan mudah menghapus atau membalikkan kinerja penurunan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Ketika terjadi krisis,

masyarakat rentan terpaksa menerapkan strategi bertahan dengan menguras tabungan atau menjual aset produktif. Hal ini akan merugikan mereka dalam jangka panjang karena menurunkan produktivitas dan peluang mereka untuk menambah pendapatan.

3.6 Urgensi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Perkembangan global dan nasional dewasa ini menunjukkan semakin sering terjadi peristiwa yang menciptakan guncangan dan tekanan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selama dua dekade terakhir telah terjadi berbagai krisis seperti krisis moneter Asia tahun 1998, krisis ekonomi global tahun 2008, pandemi coronavirus (Covid-19) tahun 2020-2022, konflik Rusia-Ukraina, serta resesi ekonomi tahun 2023. Gejolak ekonomi diprediksi masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang sebagai implikasi dari perang dagang antara China dan Amerika Serikat, Konflik Rusia dengan Ukraina serta peperangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah yang tidak kunjung selesai.

Krisis menciptakan instabilitas ekonomi makro seperti penurunan nilai tukar rupiah, inflasi, dan kelangkaan barang. Hal ini akan membawa dampak negatif berupa penurunan pendapatan dan daya beli, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

Dampak negatif krisis akan dirasakan oleh semua masyarakat. Kemampuan untuk menghadapi krisis sangat tergantung pada berbagai faktor pembentuk kapasitas, antara lain kualitas sumber daya manusia, kemampuan beradaptasi, kepemilikan modal, dan keluasan jaringan sosial.

Masalahnya adalah kepemilikan terhadap faktor-faktor ini tidak merata di tengah masyarakat. Beberapa kelompok memiliki kapasitas yang terbatas, antara lain: masyarakat miskin; petani gurem yang mengandalkan lahan sempit atau bahkan tidak memiliki lahan; pekerja informal tanpa jaminan ketenagakerjaan; kelompok adat yang tercerabut dari ruang penghidupannya; kelompok minoritas yang terpinggirkan atau tanpa akses kekuasaan. Mereka memiliki berbagai keterbatasan yang melemahkan kemampuannya menghadapi berbagai konsekuensi negatif dari krisis, baik yang muncul dari bencana alam, pergolakan politik, ekonomi maupun sosial.

Berdasarkan pengalaman selama ini, kemiskinan di Indonesia sangat rentan untuk meningkat ketika terjadi guncangan ekonomi. Hal ini bisa diamati pada masa krisis moneter 1998, setelah pencabutan subsidi BBM tahun 2006, dan selama pandemi sejak tahun 2020. Selama beberapa tahun, pemerintah

telah mampu mengurangi angka kemiskinan hingga mencapai 9,22% pada akhir tahun 2019. Namun, pandemi Covid-19 membuat kemiskinan kembali meningkat menjadi 10,14% pada tahun 2021 (BPS, 2021). Pandemi juga memperbesar ketimpangan, di mana Indeks Gini meningkat dari angka 0,380 pada tahun 2019 menjadi 0,381 pada September 2021 (BPS, 2021). Semua hal ini menunjukkan tingginya kerentanan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Di mata warga negara, pemerintah adalah pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan kehidupan yang layak. Tugas negara yang utama adalah untuk merangkul mereka semua, dengan prinsip *No One Left Behind* atau tidak ada satupun yang boleh tertinggal dalam proses pembangunan. Perhatian lebih besar harus diberikan oleh negara kepada masyarakat rentan melalui berbagai upaya perlindungan sosial, peningkatan kapasitas dan kemandirian. Kerentananlah yang membuat mereka miskin dan atau jatuh miskin kembali meskipun pernah mengalami kemajuan ekonomi.

Bagian Kedua:



Bab 4 | Perlindungan Sosial

4.1 Konsep Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial secara umum didefinisikan sebagai semua inisiatif yang berasal dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah untuk menyalurkan bantuan barang, uang/cash, asuransi kesehatan maupun jaminan pelayanan dan hak-hak warga negara kepada kelompok masyarakat rentan dan miskin guna meningkatkan standar hidup dan melindungi mereka dari peristiwa yang berdampak buruk terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Konsep perlindungan sosial lebih luas dari sekadar jaminan sosial, asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial. Konsep ini masih terus berkembang, dan definisi operasional yang digunakan mungkin berbeda di setiap negara.

Program perlindungan sosial selalu berkaitan dengan upaya mencegah, mengatasi, dan mengelola dampak buruk dari sebuah krisis. Berbagai jenis krisis biasanya memiliki konsekuensi yang lebih merusak terhadap masyarakat miskin dibandingkan pada kelompok masyarakat lainnya. Program perlindungan sosial berupaya meminimalisir dampak risiko bagi para penerimanya.

Masyarakat atau komunitas biasanya telah mengembangkan sistem informal untuk melindungi anggota. Sistem ini juga bertujuan membantu mengurangi dampak buruk dari risiko, jika ia harus terjadi. Contoh sistem perlindungan informal adalah donasi, pengumpulan bantuan, tradisi saling menolong, gotong-royong, dan sejenisnya. Sistem informal seperti ini telah ada sejak zaman dulu, bahkan ketika pemerintahan formal belum hadir di tengah masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas persoalan serta formalisasi berbagai bidang ekonomi dan sosial, mekanisme informal tersebut sering dianggap tidak cukup mampu untuk melindungi masyarakat miskin dari berbagai jenis risiko. Dalam konteks inilah kebijakan perlindungan sosial hadir sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas masyarakat miskin menghadapi berbagai risiko yang mungkin datang dalam kehidupan mereka.

4.2 Bentuk Perlindungan Sosial

Tujuan perlindungan sosial sangat beragam, seperti mengurangi kemiskinan dan kerentanan, membangun sumber daya manusia, memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak, meningkatkan penghidupan, dan merespon krisis ekonomi. Kelompok sasarannya biasanya terdiri dari masyarakat miskin dan kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, orang tua, penyandang disabilitas, orang sakit, pengungsi, dan pengangguran. Bentuk dan jenis program perlindungan sosial bisa sangat berbeda antar negara karena menyesuaikan tujuan dan kelompok sasaran masing-masing.

Terdapat banyak sekali jenis program perlindungan sosial. Browne (2015) mengklasifikasikannya menjadi lima kelompok utama, yaitu bantuan sosial, asuransi sosial, intervensi pasar tenaga kerja, perlindungan sosial tradisional, dan perlindungan sosial lainnya [Figure 4.1].

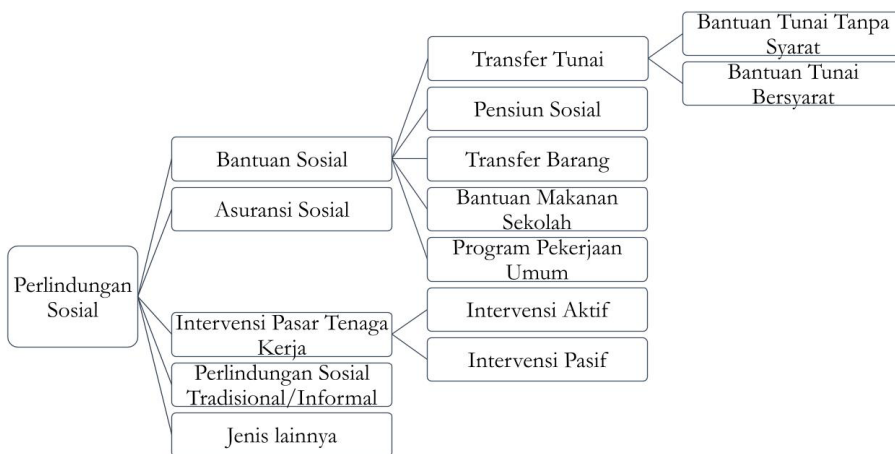


Figure 4.1 Klasifikasi Program Perlindungan Sosial

Penjelasan dari berbagai jenis perlindungan sosial adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial

Bantuan sosial berarti pemberian bantuan uang maupun barang kepada masyarakat rentan dan miskin secara langsung, teratur, dan terjadwal. Bantuan sosial dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. Transfer tunai, yaitu penyaluran bantuan uang dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli penerima. Transfer tunai dapat berbentuk:
- 1) Bantuan Tunai Tanpa Syarat atau *Unconditional Cash Transfer* (UCT). Penerima bantuan diberikan kebebasan untuk membelanjakan uang yang diterima sesuai dengan kebutuhannya. Contoh program yang sejenis di Indonesia adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)
 - 2) Bantuan Tunai Bersyarat atau *Conditional Cash Transfer* (CCT). Penerima bantuan harus memenuhi syarat tertentu, dan harus membelanjakan uang yang diterima untuk hal yang sesuai dengan tujuan program. Bantuan jenis ini biasanya bertujuan meningkatkan derajat pendidikan atau kesehatan. Contoh program sejenis di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH), di mana para penerima bantuan diharapkan membelanjakan uang yang diterima untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan keluarganya. Para penerima PKH diwajibkan untuk rutin mengunjungi klinik kesehatan atau memastikan anak-anaknya bersekolah. Jika syarat ini tidak dilakukan, maka bantuan PKH akan dihentikan.
- b. Pensiun sosial, yaitu transfer tunai yang diberikan berdasarkan usia penerima. Pensiun merupakan bentuk perlindungan sosial yang paling umum dan memiliki cakupan global terluas.
- c. Transfer barang, yaitu transfer barang atau aset ekonomi kepada penerima. Contohnya adalah bantuan pangan atau bantuan sembako.
- d. Pemberian makanan di sekolah, yaitu penyaluran makanan bergizi secara gratis di sekolah, misalnya sebagai makan siang ataupun untuk dibawa pulang. Program sejenis pernah dilakukan di Indonesia adalah Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) sebagai program perbaikan asupan gizi peserta didik di jenjang taman kanak-kanak dan sekolah dasar bagi daerah-daerah tertinggal.
- e. Program pekerjaan umum, yaitu penyediaan lapangan kerja pada proyek infrastruktur yang dibayar dengan uang atau bahan makanan. Program sejenis di Indonesia adalah Program Padat Karya, di mana pemerintah membangun infrastruktur seperti jalan dengan mempekerjakan banyak orang guna menekan angka pengangguran dan memberikan penghasilan. Program seperti ini sering dilakukan saat terjadi krisis moneter dan pemutusan hubungan kerja secara massal.

2. Asuransi Sosial

Asuransi sosial adalah program iuran di mana peserta melakukan pembayaran rutin guna mendapatkan ganti pembiayaan saat mengalami sakit, persalinan, kecelakaan atau kejadian lainnya sesuai perjanjian. Iuran asuransi sosial sepenuhnya atau sebagiannya dapat dibiayai oleh pribadi, tempat kerja, atau disubsidi oleh negara. Asuransi sosial di Indonesia meliputi beberapa jenis, antara lain: Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jasa Raharja, serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Iuran JKN bagi masyarakat miskin sepenuhnya ditanggung oleh negara.

3. Intervensi Pasar Tenaga Kerja

Intervensi pasar tenaga kerja (*Labour Market Intervention*) memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin yang masih mampu bekerja. Intervensi ini bisa dilakukan secara aktif dan pasif, sebagai berikut:

- a. Intervensi aktif dengan cara membantu para pencari kerja meningkatkan keterampilan mereka. Program sejenis di Indonesia adalah Kartu Pra Kerja, di mana pemerintah memberikan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat, terutama para pencari kerja baru yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya
- b. Intervensi pasif dengan cara memberikan tunjangan kehamilan, kompensasi cedera, dan tunjangan sakit bagi para pekerja yang dibiayai oleh pemberi kerja. Intervensi pasif dapat juga berbentuk kebijakan penetapan upah minimum yang layak atau kondisi kerja yang aman.

4. Perlindungan Sosial Tradisional atau Informal

Terdapat berbagai macam bentuk perlindungan sosial tradisional maupun informal yang dikelola oleh masyarakat langsung dan diatur berdasarkan tata cara, norma, dan nilai budaya setempat. Berbagai kelompok masyarakat biasanya memiliki sistem santunan untuk warga yang sakit, santunan meninggal dunia, atau santunan kecelakaan bagi anggotanya. Penelitian menemukan bahwa tradisi gotong-royong dan saling membantu pada masyarakat desa dapat menjadi bentuk perlindungan sosial informal (Sutiyo, Tri Raharjanto *et al.*, 2018; Sutiyo, 2023). Tradisi ini mengisi celah atau ruang yang belum terproteksi dan belum terjangkau oleh skema perlindungan sosial formal yang diberikan oleh pemerintah. Jenis perlindungan sosial

informal seperti ini biasanya cukup efektif di tingkat lokal, namun memiliki jangkauan yang terbatas.

5. Jenis perlindungan sosial lainnya

Subsidi pemerintah dalam hal tertentu dapat juga diklasifikasikan sebagai bagian dari perlindungan sosial jika kebijakan ini dibuat khusus dengan target masyarakat miskin dan rentan. Demikian juga pengaturan pemerintah terhadap harga barang tertentu yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perlindungan sosial. Program sejenis di Indonesia misalnya adalah subsidi listrik khusus bagi pelanggan 450 Watt yang biasanya hanya dimiliki oleh masyarakat miskin. Bantuan kuota internet bagi para siswa dari rumah tangga miskin supaya dapat mengikuti pembelajaran secara daring dapat juga diklasifikasikan sebagai bentuk bantuan sosial.

4.3 Fungsi Perlindungan Sosial

Menurut Devereux dan Sabates-Wheeler (2004), perlindungan sosial memiliki empat fungsi utama, yaitu protektif, preventif, promotif dan transformatif. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi Protektif

Program perlindungan sosial melindungi dan memberikan rasa aman bagi para penerimanya, dengan cara memberikan bantuan sosial secara rutin dan terprediksi untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Program memberikan bantuan kebutuhan dasar yang telah dihitung supaya cukup untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan minimal bagi para penerimanya. Ini adalah fungsi yang paling dasar jika upaya preventif dan promotif gagal mencapai tujuannya.

2. Fungsi Preventif

Program perlindungan sosial mencegah kelompok rentan jatuh miskin. Kerentanan merupakan penghambat pertumbuhan kesejahteraan yang berkelanjutan. Perlindungan sosial berfungsi sebagai bagian dari manajemen risiko, yang membantu menstabilkan pendapatan mereka. Dalam istilah statistik, hal ini berarti bahwa program akan membantu penerimanya tetap berada di atas garis kemiskinan. Komponen program meliputi semua skema pengelolaan risiko kehidupan, seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, atau pensiun dan jaminan hari tua.

3. Fungsi Promotif

Program perlindungan sosial memperkuat kapasitas penerima program untuk keluar dari kemiskinan, dan berupaya memutus mata rantai kemiskinan di masa yang akan datang. Upaya promotif dapat dilakukan secara langsung melalui penyaluran beasiswa pelajar miskin, bantuan nutrisi anak sekolah, atau asuransi atau pelayanan kesehatan. Upaya juga bisa bersifat tidak langsung melalui transfer uang tunai yang memungkinkan penerimanya membelanjakan sesuai kebutuhan masing-masing. Bentuk lainnya adalah program perbaikan kehidupan melalui lembaga keuangan mikro untuk menstabilisasi pendapatan masyarakat miskin. Seluruh upaya ini, baik langsung maupun tidak langsung, pada dasarnya berperan sebagai investasi modal manusia (*human capital*) guna membangun kapasitas dan produktivitas para penerima program di masa depan.

4. Fungsi Transformatif

Program perlindungan sosial berupaya mentransformasikan masyarakat sehingga lebih memperhatikan hak-hak dasar warga negara dan memprioritaskan prinsip keadilan sosial. Bantuan maupun asuransi sosial yang diberikan pada masyarakat marginal dapat mengurangi pengucilan sosial dan menyeimbangkan kembali hubungan kekuasaan yang timpang dan menyebabkan kerentanan. Perlindungan sosial ditetapkan melalui berbagai regulasi yang diharapkan membuka lebih banyak peluang dan kesempatan bagi kelompok rentan dan marginal. Hubungan antar pemangku kepentingan dapat ditingkatkan, sehingga berpotensi menginisiasi kebijakan yang lebih luas dalam penanggulangan kemiskinan.

Bab 5 | Perkembangan Kebijakan Perlindungan Sosial di Tingkat Global

5.1 Pada Masa Lalu

Bantuan sosial telah diberikan oleh berbagai pemerintahan di masa lampau untuk mempertahankan standar hidup rakyatnya. Pemerintahan Mesir Kuno membagikan gandum pada rakyat ketika terjadi bencana kekeringan, sebagaimana diceritakan dalam hikayat Nabi Yusuf. Pemerintahan Islam di daerah Arab yang mulai terbentuk di abad ketujuh masehi memperkenalkan sistem zakat untuk dibagikan pada kelompok masyarakat yang memenuhi syarat.

Di era modern, pemerintah Inggris pada tahun 1911 menetapkan *National Insurance Act*, menjadikannya sebagai negara pertama di dunia yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan asuransi sosial bagi para pekerja. Sistem asuransi bagi para pekerja ini juga diikuti oleh Pemerintah Jerman. Selama terjadi *Great Depression*, yaitu depresi ekonomi besar yang terjadi pada tahun 1930an, pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan darurat bagi masyarakat untuk membantu mereka menghadapi kesulitan hidup. Pada saat itu, perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah lebih berperan sebagai bantuan untuk menangani situasi darurat atau krisis.

Sampai dengan awal tahun 1990-an, pelembagaan program perlindungan sosial melalui institusi negara masih terbatas. Program seperti ini biasanya hanya ditemukan di negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Perlindungan sosial di negara berkembang biasanya hanya berbentuk amal atau *charity* yang disediakan bagi penduduk termiskin. Perlindungan sosial kadang-kadang juga diberikan dalam bentuk bantuan sosial dan jaring pengaman sosial yang terbatas pada masa krisis. Perluasan cakupan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat dianggap terlalu mahal dan mustahil dilaksanakan oleh negara. Banyak juga yang mengkhawatirkan bahwa program perlindungan sosial dapat menciptakan ketergantungan dan kemalasan bagi para penerimanya.

5.2 Dekade 1990-an

Perubahan persepsi publik terhadap perlindungan sosial mulai terjadi pada awal tahun 1990an. Krisis moneter Asia yang terjadi pada tahun 1998 telah memaksa pemerintah di berbagai negara untuk melaksanakan program perlindungan sosial melalui bantuan pangan, tambahan nutrisi anak sekolah, beasiswa, asuransi sosial, dan program padat karya. Berbagai studi menunjukkan bahwa program-program ini berdampak positif dalam mempertahankan standar hidup masyarakat serta mencegah penerimanya jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan (Sumarto & Widyanti, 2008).

Berbagai program terus dilanjutkan meskipun masih menghadapi berbagai persoalan dalam pendataan, penganggaran dan pendistribusian. Upaya perbaikan mekanisme pendataan dan pendistribusian serta pengorganisasian pelaksana program terus dilaksanakan oleh berbagai negara di dunia guna mewujudkan sistem perlindungan sosial yang semakin efektif.

Reformasi perlindungan sosial terjadi di Meksiko. Berbagai program awalnya dilaksanakan secara terpisah pada sepuluh kementerian dan badan federal. Pada tahun 1997, pemerintah membentuk satu lembaga khusus pelaksana perlindungan sosial. Dari sini kemudian lahir Program Bantuan Tunai Bersyarat bernama *Progresa* yang berfokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui bantuan pendidikan, kesehatan dan nutrisi bagi keluarga miskin. Biaya pelaksanaan program menjadi lebih efisien dibandingkan dengan skema sebelumnya. Program juga berdampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan serta peningkatan partisipasi sekolah dan derajat kesehatan. *Progresa* berganti nama menjadi *Oportunidades* pada tahun 2001, dan menjadi *Prospera* pada tahun 2014 (World Bank, 2014).

Reformasi perlindungan sosial juga terjadi di Brazil. Pada awalnya terdapat berbagai program yang dilaksanakan terpisah seperti *Bolsa Escola* (bantuan pendidikan), *Bolsa Alimentação* dan *Cartão Alimentação* (bantuan pangan), serta *Auxilio Gas* (kompensasi pencabutan subsidi bahan bakar). Kurangnya koordinasi dan integrasi antar program menyebabkan inefisiensi anggaran, lemahnya pendataan serta tumpang tindih manfaat. Pada tahun 2003, pemerintah Brasil mengintegrasikan berbagai program yang tersebar di banyak kementerian dan lembaga menjadi satu program tunggal bernama *Bolsa Familia*. Dengan pengintegrasian tersebut, pemerintah mampu meningkatkan efisiensi anggaran dan koordinasi kelembagaan. Selain itu, pemerintah Brasil juga melakukan unifikasi data penerima berbagai program

dalam satu database bernama *Cadastrro Unico*. Hal ini meningkatkan ketepatan distribusi dan mencegah duplikasi penerima. Pada akhirnya, pemerintah Brasil bukan hanya mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, tetapi juga efektivitasnya dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan (Lindert, 2005).

5.3 Advokasi di Tingkat Global

Keberhasilan reformasi perlindungan sosial di negara-negara Amerika Latin serta dampak positif program ketika krisis ekonomi telah meningkatkan reputasi program perlindungan sosial. Berbagai program mulai diadopsi dari pengalaman negara-negara Amerika Latin dan dipromosikan secara global oleh berbagai lembaga internasional. Perlindungan sosial dijadikan sebagai bagian integral dari *Millenium Development Goals* yang selanjutnya bertransformasi menjadi *Sustainable Development Goals*. *World Bank* mempromosikannya sebagai elemen kunci dari strategi pengurangan kemiskinan internasional. UNDP juga menggarisbawahi peran vital perlindungan sosial dalam kebijakan pembangunan.

Program menjadi sangat populer dalam dekade terakhir dan dilaksanakan oleh banyak negara untuk menjangkau masyarakat miskin dan kelompok rentan yang tidak diuntungkan dari program pembangunan konvensional. Perlindungan sosial di negara berkembang saat ini tidak lagi dianggap sebagai program darurat untuk menghadapi krisis, melainkan juga sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan, kerentanan dan kemiskinan.

Program perlindungan sosial menjadi semakin populer seiring dengan penerapan sistem demokrasi dan pemilihan langsung di banyak negara. Ketika pemilihan umum dilaksanakan dan masyarakat memegang hak pilih, maka setiap kandidat berlomba-lomba membuat program populer yang dapat menarik pemilih. Jenis dan cakupan program perlindungan sosial meningkat seiring dengan pelaksanaan pemilihan umum di suatu negara. Namun, hal ini bukanlah tanpa konsekuensi negatif. Bentuk dan tujuan program menjadi sangat rentan terhadap manipulasi politik. Perluasan cakupan yang signifikan tidak selalu diikuti dengan kemampuan negara dalam membiayai program.

Hal lain yang membuat program perlindungan sosial semakin populer di tingkat global adalah semakin seringnya terjadi krisis, seperti krisis ekonomi, bencana alam maupun pandemi. Pemerintah di berbagai negara telah menjadikan program perlindungan sosial sebagai strategi utama menghadapi persoalan penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan berbagai risiko ekonomi lainnya saat terjadi krisis. Sasaran utamanya adalah kelompok rentan

dan miskin. Pemerintah kemudian juga memperluas kelompok sasaran, meningkatkan manfaat serta memperkenalkan mekanisme baru dalam hal pendataan penerima dan pendistribusian program. Namun, keterbatasan kemampuan administrasi dan keuangan negara untuk melaksanakan perlindungan sosial masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pendistribusian program yang tepat sasaran.

Advokasi terus dilakukan untuk meningkatkan komitmen setiap negara dalam memberikan perlindungan sosial. Menurut laporan *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2020, sekitar 46,9 persen dari populasi global telah tercakup dalam setidaknya satu program perlindungan sosial. Namun, terdapat kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang dalam hal cakupan dan kelengkapan sistem perlindungan sosial. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendanaan pada negara berkembang, khususnya di wilayah Asia dan Afrika. Negara maju mengalokasikan anggaran sebesar 16,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk program perlindungan sosial. Dibandingkan dengan negara berpenghasilan rendah, angka ini 15 kali lebih banyak, di mana mereka hanya mengalokasikan sekitar 1,1 persen PDB untuk program sejenis (ILO, 2022).

5.4 Isu Kontemporer Perlindungan Sosial

Konsep dan kebijakan perlindungan sosial terus berkembang sesuai dengan gagasan-gagasan baru yang muncul untuk menjawab persoalan yang timbul, dan seiring dengan advokasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga di dunia. Saat ini terdapat beberapa isu yang mengemuka dan menjadi tema diskusi diantara para akademisi, peneliti dan perumus kebijakan terkait perlindungan sosial, sebagai berikut.

1. Universalisme Versus Penargetan

Salah satu isu yang terus dibahas adalah terkait jangkauan atau cakupan program perlindungan sosial. Sebagian berpandangan bahwa program perlindungan sosial seharusnya bersifat universal atau berlaku untuk semua. Sebagai contoh, *World Bank* memiliki visi perlindungan sosial universal dan inklusif, di mana semua orang mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dan tidak ada individu atau kelompok yang tertinggal.

Perlindungan sosial dipandang sebagai perwujudan hak dasar seorang warga negara. Hanya dengan menjadi warga negara, maka seseorang otomatis berhak mendapatkan program perlindungan sosial yang ada di negara tersebut tanpa harus melewati persyaratan apapun.

Di negara berkembang di mana kemiskinan dan kerentanan meluas dan hampir tidak ada perbedaan ekonomi yang nyata diantara anggota populasi, masyarakat sering beranggapan bahwa bantuan pemerintah adalah hak semua orang. Konsekuensinya, para pelaksana di tingkat lokal sering membagikan bantuan pada semua orang dengan cara mengurangi jumlah manfaatnya bagi para penerima yang resmi (Sutiyo, Tri Raharjanto *et al.*, 2018; Sutiyo, 2022; 2023).

Pelaksanaan universalisme perlindungan sosial biasanya mempersyaratkan kontribusi atau iuran dari masyarakat secara langsung. Para pendukung universalisme perlindungan sosial berpendapat bahwa sistem ini bermanfaat untuk pengembangan solidaritas sosial karena setiap orang berkontribusi secara kolaboratif pada sistem yang akan menguntungkan semua orang. Jaminan sosial adalah salah satu contohnya. Universalisme perlindungan sosial juga merupakan investasi modal manusia yang akan membangun satu bangsa secara keseluruhan.

Pendapat lainnya mengatakan bahwa universalisme perlindungan sosial tidak efisien dalam hal pembiayaan. Universalisme juga sulit diterapkan pada sebagian besar negara berkembang karena mereka tidak memiliki kemampuan anggaran untuk melaksanakannya. Karena itu, banyak juga yang berpendapat bahwa program perlindungan sosial hanya perlu didistribusikan bagi orang yang berhak saja, atau dengan kata lain adalah menerapkan sistem penargetan.

2. Ukuran Pendapatan

Bagi para pendukung sistem penargetan perlindungan sosial, isu yang diperdebatkan akan berlanjut pada metode yang paling tepat untuk memilih para penerima program. Hal ini terkait dengan bagian dari populasi yang seperti apa, atau siapa dan apa syaratnya, yang berhak menjadi penerima program.

Pada umumnya sebagian besar berpendapat bahwa tingkat pendapatan adalah acuan untuk menentukan apakah seseorang berhak mendapat program atau tidak. Pada negara maju di mana masyarakat bekerja di sektor formal dan pendapatan mereka telah dilaporkan dengan rapi dalam sistem perpajakan, pemerintah tidak menghadapi kesulitan dalam memilih para penerima program berdasarkan ukuran pendapatan. Hal sebaliknya terjadi di negara berkembang, di mana masyarakat umumnya bekerja di sektor informal dan pendapatan maupun pengeluaran mereka tidak terdeteksi oleh sistem administrasi pemerintah. Pemerintah di negara berkembang umumnya tidak

mengetahui secara pasti kondisi ekonomi warga negaranya, yaitu terkait siapa memiliki pendapatan berapa.

Untuk mengatasi persoalan tidak adanya data pendapatan masyarakat di negara berkembang, biasanya pendataan dilakukan guna menilai indikator *Proxy*, yaitu satu indikator lain yang dapat mencerminkan pendapatan itu sendiri. Indikator *proxy* yang paling umum digunakan adalah kondisi tempat tinggal dan kepemilikan aset, yang dianggap paling mencerminkan tingkat pendapatan seseorang. Dalam penerapannya, terdapat dua jenis metode penetapan penerima program, yaitu *Proxy Means Testing* (PMT) dan *Community Based Targeting* (CBT). Negara berkembang biasanya memilih salah satu dari metode ini (Sutiyo, 2022).

PMT berasumsi bahwa aset rumah tangga sulit disembunyikan dari petugas pendata. Karena itu, pemerintah melakukan pendataan secara nasional untuk mengumpulkan data profil demografi dan kepemilikan aset. Data tersebut diolah untuk menghitung skor indeks kesejahteraan setiap rumah tangga. Hanya mereka yang memiliki skor tertentu yang berhak menerima program perlindungan sosial.

Metode lainnya adalah CBT, yang berasumsi bahwa aset dan kekayaan seseorang tidak bisa disembunyikan dari para tetangga mereka. Karena itu, pemerintah melibatkan masyarakat dalam penetapan penerima program, merumuskan kriteria kemiskinan yang bersifat lokal, dan memvalidasi daftar yang dibuat oleh pemerintah.

3. Metode Penyaluran Program

Perlindungan sosial adalah program yang memerlukan anggaran besar dan pelaksanaannya sangat kompleks. Selalu ada pertanyaan tentang bagaimana cara terbaik untuk menyalurkan program tersebut. Apakah bantuan harus diberikan dalam bentuk *cash* atau barang? Jika dalam bentuk *cash*, bagaimanakah cara penyaluran yang terbaik? Apakah melalui transfer bank, atau diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai? Jika bantuan harus disalurkan dalam bentuk barang, misalnya bantuan Sembako, maka pada level administrasi yang manakah sebaiknya bantuan tersebut diproduksi? Apakah di level pemerintah pusat, ataukah pemerintah daerah yang melakukan pengadaan barang?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas terus mengemuka sampai saat ini. Berbagai metode penyaluran terus diperbaiki dari tahun ke tahun untuk menekan kebocoran dan meningkatkan ketepatan distribusi. Contohnya adalah

berbagai perubahan yang dilakukan pada program bantuan beras di Indonesia. Selama beberapa tahun ketika program ini masih bernama program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), bantuan diadakan secara terpusat (Sutiyo & Maharjan, 2011; Sutiyo, Tri Raharjanto *et al.*, 2018). Hal ini menyebabkan kualitas beras yang buruk dan bahkan tidak layak konsumsi bagi para penerima. Pemerintah kemudian memperbaikinya menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menerapkan sistem *voucher*. Para penerima diberi kartu *voucher* belanja senilai tertentu untuk ditukar di warung lokal. Hal ini dinilai lebih baik dalam menjamin kualitas bantuan dan menggerakkan perputaran ekonomi di tingkat lokal (Sutiyo, 2023).

4. Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat

Berbagai risiko dapat terjadi sepanjang hidup manusia, mulai dari lahir, Balita, menginjak usia sekolah, remaja, menjalani masa produktif sampai saat berusia lanjut. Terdapat satu gagasan bahwa skema perlindungan sosial harus dibikin sedemikian rupa sehingga melindungi seseorang sepanjang hayatnya. Hal ini penting karena perlindungan sosial harus juga dilihat sebagai investasi pada pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Berbagai studi menunjukkan bahwa kemiskinan berkaitan dengan faktor usia. Kemiskinan sebagian besar terjadi pada usia anak-anak dan pada usia lanjut. Karena itu, penanggulangan kemiskinan idealnya berfokus pada anak dan orang lanjut usia. Bantuan bagi anak dan para Lansia adalah dua jenis skema perlindungan sosial yang diproyeksikan akan berdampak tinggi bagi pengurangan kemiskinan. Program perlindungan sosial bertujuan melindungi masa depan seorang anak dari berbagai risiko kehidupan yang dapat terjadi sebelum dan pada saat memasuki lanjut usia.

5. Lantai Perlindungan Sosial

International Labour Organization (ILO) mendefinisikan *Social Protection Floor* (SPF) atau Lantai Perlindungan Sosial sebagai “...*nationally defined sets of basic social security guarantees that should ensure, as a minimum that, over the life cycle, all in need have access to essential health care and to basic income security which together secure effective access to goods and services defined as necessary at the national level*”¹. SPF berisi serangkaian program

1 Lihat laman resmi ILOP di <https://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/policy-development-and-applied-research/social-protection-floor/lang--en/index.htm> diakses tanggal 8 Januari 2023

perlindungan sosial dasar yang ditetapkan secara nasional untuk memastikan, minimal selama siklus hidup, semua orang yang membutuhkan memiliki akses ke perawatan kesehatan esensial dan jaminan pendapatan dasar.

Berbagai lembaga internasional seperti ILO, *United Nations* (PBB), *World Health Organization* (WHO), *World Bank* dan lain lain menganggap bahwa hak universal atas perlindungan sosial harus dijamin dalam undang-undang di setiap negara dan dalam kerangka kerja global. Pemerintah pada setiap negara diharapkan untuk memberikan SPF bagi warga negaranya. Menurut ILO, SPF setidaknya mencakup empat jaminan-jaminan sosial berikut:

- a. akses ke perawatan kesehatan esensial, termasuk perawatan persalinan;
- b. jaminan pendapatan dasar untuk anak-anak, juga penyediaan nutrisi, pengasuhan, pendidikan, dan barang dan jasa lain yang diperlukan;
- c. jaminan pendapatan dasar bagi masyarakat usia produktif namun tidak mampu memperoleh penghasilan memadai karena sakit, proses persalinan, disabilitas, atau menganggur;
- d. jaminan pendapatan dasar untuk usia lanjut.

Gagasan mengenai SPF dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka kemiskinan secara global. SPF diperlukan untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat dari risiko sosial, mengatasi tren penuaan penduduk yang terjadi di banyak negara, mempercepat pemulihan sosial-ekonomi akibat seringnya terjadi krisis, dan mengurangi angka kemiskinan dan kerentanan secara berkelanjutan.

Bab 6 | Perkembangan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia

6.1 Orde Lama (1945-1966)

Perlindungan sosial belum menjadi prioritas kebijakan di Indonesia sampai dengan tahun 1990 akhir. Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno sampai tahun 1966, upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dilakukan dengan kebijakan reformasi agraria atau *land reform* (Sutiyo & Maharjan, 2017a). Ketimpangan kepemilikan tanah telah menghambat petani miskin meningkatkan penghidupannya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bermaksud menciptakan distribusi tanah yang lebih merata. Sayangnya, perpecahan dalam tubuh pemerintah serta konflik antara golongan komunis, agama dan militer menyebabkan kekacauan implementasi yang mengarah pada aksi sepihak, kerusuhan, dan konflik horizontal (Anderson 1983). Sampai tahun 1966, *Landreform* hanya berhasil mendistribusikan tanah seluas rata-rata 0,42 Ha bagi 1.292.851 petani, termasuk 816.849 petani di Jawa (Prosterman & Mitchell 2002).

Tidak ada upaya yang serius untuk melanjutkan *landreform* setelah kepemimpinan nasional berganti. Ketimpangan kepemilikan tanah berlanjut dan terus mempengaruhi kemiskinan pedesaan, bahkan hingga saat ini. Mayoritas penduduk termiskin adalah buruh tani dan petani gurem dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 Ha (Mishra, 2009).

6.2 Orde Baru (1966-1998)

Pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan pada masa awal pemerintahan Presiden Suharto dilakukan melalui program Revolusi Hijau, atau yang lebih dikenal dengan nama Program Intensifikasi Massal (INMAS). Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian, terutama padi. Dibiayai oleh hasil ekspor minyak bumi dan bantuan luar negeri, pemerintah

mampu membangun bendungan, irigasi dan mensubsidi bibit dan pupuk. Produksi beras meningkat, demikian juga kesejahteraan petani. Angka kemiskinan turun dari 65% pada tahun 1968 menjadi 21,6% pada tahun 1984 (Sutiyo & Maharjan, 2017a). Namun, keberhasilan Revolusi Hijau lebih dinikmati oleh petani pemilik lahan daripada petani gurem dan buruh tani (Axelsson, 2008). Kondisi ini adalah konsekuensi dari kegagalan *landreform* pada pemerintahan sebelumnya yang tidak berhasil mengatasi ketimpangan pemilikan lahan.

Pemerintah mulai mengubah strategi pada tahun 1994 dengan menerapkan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Program pertama yang diluncurkan adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT), yang menyerahkan bantuan modal sebesar Rp. 20 juta pada kelompok masyarakat sebagai dana bergulir. Penerimaannya adalah masyarakat miskin yang tinggal di 20.633 desa tertinggal. Jumlah ini merupakan sepertiga dari seluruh desa di Indonesia. Sayangnya, program IDT menghadapi banyak kendala implementasi. Korupsi, rendahnya tingkat pengembalian dana, dan menurunnya partisipasi masyarakat miskin menghambat keberlanjutan program IDT. Meskipun kurang berhasil, program IDT menginspirasi pelaksanaan berbagai program lain seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada tahun 1998, yang kemudian diganti menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada tahun 2007. Pada tahun 2015, seluruh program pembangunan berbasis masyarakat diintegrasikan dalam Dana Desa, yaitu transfer anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah desa untuk membiayai pembangunan desa.

Sampai dengan kejatuhan pemerintahan Presiden Suharto pada tahun 1998, inisiatif pembangunan di Indonesia lebih difokuskan pada pembangunan pertanian, infrastruktur pedesaan, dan pembangunan berbasis masyarakat. Perlindungan sosial melalui asuransi kesehatan, bantuan pangan maupun bantuan tunai masih sangat terbatas. Skema asuransi kesehatan dan pensiun dilaksanakan hanya bagi anggota pegawai negeri dan TNI/Polri. Inisiatif lainnya adalah penetapan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang bertujuan memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya, yang hanya berlaku bagi para pekerja formal. Masyarakat miskin, para pekerja informal, dan kelompok rentan lainnya belum mendapatkan perlindungan dari berbagai risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi.

6.3 Krisis Moneter 1998

Pada tahun 1997-1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang diakibatkan oleh penurunan nilai tukar rupiah. Inflasi membumbung tinggi dan pengangguran meningkat. Krisis diperparah oleh fenomena alam (cuaca) El-Nino yang menyebabkan kemarau ekstrem di tahun 1997. Konsekuensi dari krisis ekonomi serta faktor alam ini adalah meningkatnya kemiskinan dari 11% pada tahun 1996 menjadi 24% pada tahun 1998²

Pemerintah meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Nets*) untuk membantu masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui bantuan beras, beasiswa, asuransi kesehatan, operasi pasar, dan program padat karya pembangunan infrastruktur desa. Program-program ini dirumuskan tergesa-gesa pada situasi krisis, di mana saat itu pemerintah belum memiliki data masyarakat miskin. Database yang tersedia hanya bersumber dari Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mengklasifikasikan setiap rumah tangga menjadi Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, atau Keluarga Sejahtera II. Indikator yang digunakan dalam klasifikasi ini pada dasarnya tidak terhubung langsung dengan kondisi kemiskinan. Meskipun kategorisasi dari BKKBN ini tidak mampu menggambarkan keadaan kemiskinan, pemerintah tidak punya pilihan lain selain menggunakannya sebagai basis pendistribusian program (Sutiyo & Maharjan, 2011).

Konsekuensi dari persoalan data dan ketidaksiapan pemerintah adalah kekacauan implementasi. Faktor penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi, ketidakjelasan pedoman pelaksanaan, metode penentuan penerima yang problematik, dan kurangnya mekanisme pengaduan (Sumarto & Widyanti 2008).

Pada proyek padat karya, tidak ada standar upah yang ditetapkan oleh pemerintah. Kadang-kadang upah dari program lebih tinggi dari upah lokal, sehingga mendorong mereka yang sudah bekerja untuk ikut bergabung (Sumarto dan Widyanti 2008).

Pada program Beras Miskin, banyak pemerintah desa membagikan beras secara merata kepada semua penduduk desa untuk mencegah kecemburuan sosial (Hastuti *et al.* 2008). Kecenderungan yang sama juga terjadi pada masa sesudahnya, di mana bantuan beras dibagikan bukan hanya kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima resmi program (Sutiyo, Tri Raharjanto *et al.*, 2018).

2 lihat data pada <https://bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#sub-jekViewTab3>, diakses tanggal 6 Januari 2023

Program Beasiswa Miskin belum mampu menjangkau anak-anak dari rumah tangga miskin yang tidak pernah bersekolah (Sumarto dan Widyanti 2008). Hal ini terjadi karena pendataan penerima dilakukan melalui institusi pendidikan, sehingga hanya menjangkau murid-murid yang telah terdaftar di sekolah.

Pada program Jaminan Kesehatan Masyarakat, sekitar 69,42% kartu peserta dibagikan pada 40% masyarakat termiskin, sedangkan 20,51% dibagikan pada 40% masyarakat dengan pendapatan tertinggi (Suryahadi *et al.* 2008). Artinya, terdapat banyak masyarakat mampu yang menerima program ini.

Dampak positif program Jaring Pengaman Sosial tetap dirasakan oleh masyarakat. Rumah tangga dengan setidaknya satu anggota yang bekerja di proyek padat karya mengalami peningkatan pendapatan 4% lebih tinggi. Total manfaat bantuan beras adalah sekitar Rp15.000–20.000 per bulan per rumah tangga, atau sekitar 5% dari pengeluaran rumah tangga dengan empat anggota keluarga. Sekitar 13% siswa tidak jadi putus sekolah karena mereka menerima beasiswa. Para penerima asuransi kesehatan mengalami peningkatan konsumsi sebesar 4% (Sumarto dan Widyanti 2008).

Momentum krisis moneter 1998 telah memperkenalkan program perlindungan sosial, yang sebelumnya tidak dikenal secara formal. Krisis telah memperkenalkan konsep ideal tentang tanggung jawab negara dalam perlindungan sosial. Jika negara tidak hadir selama krisis dengan membawa program bantuan dan perlindungan sosial, maka dipastikan akan semakin banyak warga yang jatuh miskin dan semakin menderita.

6.4 Sesudah Krisis Moneter 1998

Pemerintah berusaha menyempurnakan program Jaring Pengaman Sosial setelah krisis moneter 1998 berakhir. Beberapa program dimodifikasi dan dilanjutkan sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan. Program perlindungan sosial diatur dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Berbagai perubahan sosial politik dan momentum mendukung upaya perluasan program. Pemilihan langsung presiden, gubernur, dan walikota/bupati yang dilaksanakan mulai tahun 2005 telah meningkatkan jumlah dan jenis program. Kapasitas fiskal pemerintah semakin tinggi setelah paradigma

'subsidi barang' dalam APBN diubah menjadi 'subsidi orang'. Pencabutan subsidi bahan bakar pada tahun 2005, 2008, dan 2015 selalu diikuti dengan peningkatan anggaran untuk program perlindungan sosial (Sutiyo & Maharjan, 2011; Sutiyo, 2023).

Program perlindungan sosial di Indonesia ditargetkan untuk dua kelompok utama. Pertama, masyarakat miskin, yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional setara US\$ 2,20 PPP per hari. Kedua, kelompok rentan yang hidup di atas garis kemiskinan tetapi dengan risiko besar untuk kembali jatuh miskin, yaitu mereka dengan pendapatan setara US\$2,20-3,30 PPP per hari (Holmemo *et al.*, 2020).

BPS melakukan pendataan penerima program setiap tiga tahun, dan di-*update* pemerintah daerah setiap tahun. Para pencacah mengunjungi rumah tangga dan menilai kondisi lantai, dinding, atap, listrik, air bersih, kepemilikan aset. Data ini dipadukan dengan tingkat kesulitan geografis setiap wilayah guna menyusun indeks kesejahteraan rumah tangga. Hasilnya disatukan menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memuat nama, alamat, dan informasi sosial, ekonomi, dan kependudukan dari 40 persen penduduk dengan status kesejahteraan terbawah (TNP2K, 2015).

Setiap penerima program diberikan Kartu Perlindungan Sosial dengan nomor identitas unik. Penyaluran program perlindungan sosial saat ini menggunakan sistem transfer bank dan voucher.

Saat ini, terdapat berbagai program sebagai berikut:

1. Bantuan Pangan.

Berawal dari program Raskin tahun 1999, lalu bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

2. Asuransi kesehatan.

Berawal dari program Askeskin pada tahun 2005, berubah menjadi program Jamkesmas pada tahun 2008 dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014.

3. Beasiswa.

Bermula dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada tahun 2008, dan berubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2014.

4. Bantuan Tunai Bersyarat.

Difokuskan untuk pendidikan dan kesehatan, atau yang lebih dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH).

5. Bantuan Tunai Tanpa Syarat.

Program ini dilaksanakan secara sementara pada masa krisis, seperti saat pencabutan subsidi bahan bakar tahun 2005 dan 2008 atau ketika pandemi Covid di tahun 2020 dan 2021. Program ini lebih dikenal dengan nama Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Sosial Tunai (BST).

Beberapa program perlindungan sosial lainnya diberikan khusus pada para pekerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), yang meliputi: Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian. Berbagai macam perlindungan sosial ini merupakan kewajiban pemilik perusahaan untuk menyediakan bagi para pekerjanya.

Pada tahun 2022, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 427,5 Triliun, atau sekitar 16% dari total anggaran negara, untuk Program Perlindungan Sosial. Ini berarti bahwa Perlindungan Sosial menjadi belanja negara terbesar kedua setelah anggaran pendidikan yang oleh konstitusi diwajibkan minimal 20% APBN. Prioritas utama program perlindungan sosial diberikan kepada mereka yang berada pada kelompok miskin dan rentan miskin, yang kini jumlahnya berkisar antara 40% dari penduduk Indonesia.

Bab 7 | Idealisasi Program Perlindungan Sosial

7.1 Perspektif Keadilan Sosial

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, di mana pada Sila kelima dengan jelas menyatakan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Demikian juga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa negara Indonesia mengembangkan suatu sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, serta memberdayakan masyarakat yang lemah atau tidak mampu supaya dapat mencapai martabat kemanusiaan. Kedua hal tersebut merupakan landasan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk melaksanakan program perlindungan sosial.

Keadilan sosial mencerminkan distribusi yang adil dari manfaat pertumbuhan ekonomi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh United Nations (2006), bahwa: *“Social justice may be broadly understood as the fair and compassionate distribution of the fruits of economic growth.”*. Keadilan sosial dapat disamakan dengan keadilan distributif, yaitu keadaan di mana pendapatan, kebebasan, kesempatan dan penghargaan sosial terbagi secara merata kepada seluruh anggota masyarakat. Dalam kondisi keadilan sosial, orang tidak didiskriminasi berdasarkan alasan apapun. Kesejahteraan mereka tidak dibatasi karena gender, agama, usia, kesukuan, afiliasi politik, dan atau faktor lainnya.

Kemiskinan berkaitan erat dengan ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan adalah manifestasi dari ketidakadilan sosial. Ketimpangan terjadi karena adanya stratifikasi sosial, yang dengan sendirinya menunjukkan ketidaksetaraan. Kelas sosial sering dibuat berbasis kepemilikan atas sumber ekonomi.

Menurut United Nations (2006), ketimpangan sosial ekonomi biasanya terjadi pada enam bidang, sebagai berikut:

1. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan;
2. Ketimpangan dalam distribusi aset;
3. Ketimpangan dalam distribusi kesempatan kerja dan upah kerja;

4. Ketimpangan distribusi akses pengetahuan;
5. Ketimpangan distribusi pelayanan kesehatan, jaminan sosial dan penyediaan lingkungan yang aman;
6. Ketimpangan distribusi kesempatan partisipasi sipil dan politik.

Perlindungan sosial idealnya dilandasi oleh prinsip fundamental keadilan sosial, yaitu bahwa ketimpangan sosial adalah fenomena yang tidak dikehendaki dan bahwa negara wajib menciptakan pemerataan ekonomi. Berbagai jenis program perlindungan sosial diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang kurang diuntungkan dalam modernisasi, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pembangunan lainnya. Perlindungan sosial idealnya didesain secara khusus untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif, pengembangan sumber daya manusia, serta keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia.

Berbagai penelitian menunjukkan program perlindungan sosial dapat mengurangi ketimpangan. Hal ini ditemukan di Meksiko yang melaksanakan program Bantuan Tunai Bersyarat bernama *Prospera* (World Bank, 2014), dan di Brazil yang melaksanakan program sejenis bernama *Bolsa Familia* (Lindert, 2005). Penyempurnaan sistem perlindungan sosial diharapkan dapat membantu penurunan ketimpangan dan memperbaiki kohesivitas sosial di Indonesia.

7.2 Pendekatan Keberhakan (*Entitlement*)

Keberhakan berasal dari kata dasar berhak, dan atau hak. Pendekatan keberhakan dalam buku ini digunakan sebagai padanan dari istilah *Entitlement Approach* yang merupakan pemikiran dari Amartya Sen (1983). Pendekatan ini digagas oleh Amartya Sen setelah dia menganalisis berbagai bencana kelaparan massal (*famine*) yang terjadi pada beberapa negara. Ide dasar dari pendekatan keberhakan adalah bahwa kemiskinan terjadi bukan karena tidak tersedianya barang dan jasa di masyarakat, tetapi karena ketidakmampuan seseorang untuk mengaksesnya.

Selama ini, bencana kelaparan sering dipandang sebagai akibat kelangkaan produksi pangan. Hal ini merujuk pada pemikiran ahli kependudukan Robert Malthus, bahwa peningkatan produksi pangan terjadi sesuai deret hitung, sedangkan pertumbuhan penduduk terjadi sesuai deret ukur. Konsekuensi dari pemikiran Malthus ini adalah bahwa kekurangan makanan pasti akan terjadi karena produksi pangan tidak mampu mengimbangi pertumbuhan populasi.

Sen (1983) melihat bencana kelaparan dari perspektif yang berbeda. Sen menemukan bahwa bencana kelaparan terjadi bahkan ketika produksi pangan global mengalami surplus. Dari hal ini Sen berpendapat bahwa bencana terjadi bukan karena masalah pasokan, tetapi karena orang miskin tidak memiliki akses ke makanan, atau bahwa mereka tidak berhak untuk mengakses makanan.

Penyebab bencana kelaparan dapat dipahami melalui pendekatan keberhakan. Sen (1984, p 497) mendefinisikan keberhakan sebagai *“a set of alternative commodity bundles that a person can command in a society using the totality of rights and opportunities that he or she faces”*. Keberhakan adalah sekumpulan komoditas alternatif yang dapat dikuasai seseorang dalam masyarakat dengan menggunakan seluruh hak dan peluang yang dia miliki. Keberhakan meliputi barang dan jasa yang diperoleh seseorang dari memproduksi sendiri, membeli, atau menerima pemberian.

Pendekatan keberhakan awalnya digunakan untuk menganalisa bencana kelaparan, namun kemudian digunakan untuk memahami berbagai kasus kemiskinan secara luas. Berdasarkan pendekatan keberhakan, pengentasan kemiskinan tidak akan berhasil hanya melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Harus ada upaya untuk memastikan bahwa orang miskin memiliki akses terhadap barang dan jasa untuk mempertahankan standar hidup mereka (Sutiyo *et al.*, 2018).

Sen (1984) berpendapat bahwa untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme pasar. Pemerintah harus mengalihkan hak hukum dan ekonomi bagi masyarakat miskin untuk mengakses barang dan jasa yang mereka butuhkan. Program perlindungan sosial secara filosofis bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat miskin atas barang dan jasa untuk penghidupan yang layak. Program tersebut berperan sebagai pengalihan hak secara hukum dari negara. Ketika masyarakat miskin mendapatkan program perlindungan sosial, maka mereka akan dapat mengakses barang dan jasa tersebut.

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan, kesejahteraan serta standar hidup yang layak, dan bahwa hal ini adalah tugas dari negara untuk menyediakannya. Karena itu, bantuan sosial idealnya diberikan bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Program jaminan sosial lainnya diberikan kepada seluruh masyarakat guna melindungi mereka dari berbagai risiko yang terkait dengan siklus hidup manusia, seperti jaminan usia tua, kecelakaan kerja, kesehatan, dan kematian.

7.3 Efektivitas Program Perlindungan Sosial

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa persoalan yang paling sering mengemuka dalam pendistribusian program perlindungan sosial di Indonesia adalah terkait ketepatan sasaran (Sutiyo & Maharjan, 2011; Sutiyo, 2022; 2023). Pemerintah menghadapi kesulitan dalam penetapan sasaran karena profil dan karakter kemiskinan di Indonesia yang bermacam-macam dan sangat variatif antar daerah. Karakteristik kemiskinan di perkotaan berbeda dengan di pedesaan. Demikian juga, karakteristik kemiskinan di Pulau Jawa berbeda dengan profil kemiskinan di luar Pulau Jawa.

Pendistribusian berbagai program masih menghadapi persoalan ketidakakuratan data, masih adanya tumpang tindih target penerima, serta penyaluran yang lambat dan tidak tepat sasaran. Selain itu, pemerintah masih dihadapkan pada lemahnya komunikasi dan koordinasi kedaruratan, serta kurangnya kolaborasi dengan dunia bisnis dan pihak lainnya dalam penyaluran bantuan sosial. Secara umum desain kebijakan dan teknis pelaksanaan masih perlu terus disempurnakan untuk mengurangi kebocoran dan penyimpangan.

Berbagai upaya penyempurnaan kriteria penerima program melalui pendataan berkala yang dilakukan BPS serta penggunaan formula statistik untuk meranking kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya berhasil. Pemerintah saat ini menggunakan sebuah database terpadu bernama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihasilkan dari pendataan BPS. Namun, validitas DTKS sering dikritik karena proses pencacahan yang bermasalah. Pemerintah daerah dan masyarakat idealnya dilibatkan dalam memverifikasi data, sehingga dapat mengontrol keakuratan dan memahami bagaimana peringkat kesejahteraan dihitung.

Konsekuensi dari persoalan ketidaktepatan sasaran adalah kecemburuan sosial, berkurangnya jumlah bantuan, dan tidak optimalnya hasil program dalam menurunkan kemiskinan (Sutiyo & Maharjan, 2011; Sutiyo, Tri Raharjanto *et al.*, 2018; Sutiyo, 2023). Terjadi kecemburuan, protes, bahkan konflik karena banyak masyarakat yang merasa berhak namun tidak menerima bantuan. Para pelaksana program di lapangan akhirnya mengambil kebijakan untuk membagi rata bantuan, atau mengurangi bantuan dan diserahkan pada orang lain yang tidak masuk daftar penerima. Pada akhirnya, manfaat program dalam penanggulangan kemiskinan menjadi berkurang karena penerima mendapatkan bantuan dengan jumlah yang lebih kecil dari ketentuan.

Program perlindungan sosial idealnya dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah dalam situasi normal maupun darurat. Efektivitas program

perlindungan sosial merupakan gambaran sejauh mana program perlindungan sosial dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas program perlindungan sosial memiliki tiga dimensi, yaitu: ketepatan distribusi; dukungan publik; kemanfaatan hasil. Ketepatan distribusi berarti bahwa pendistribusian bantuan atau program harus tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Dukungan publik merujuk pada penerimaan masyarakat terhadap program, dan bahwa program tersebut tidak menimbulkan konflik atau perpecahan di tengah masyarakat. Kemanfaatan hasil merujuk pada penggunaan program oleh penerima yang harus tepat manfaat, dan bahwa program dapat berkontribusi bagi penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.1 Dimensi dan Indikator Efektivitas Program Perlindungan Sosial

Dimensi	Indikator
1. Ketepatan distribusi	a. Tepat Sasaran
	b. Tepat Jumlah
	c. Tepat Waktu
2. Dukungan publik	d. Tidak Menimbulkan Konflik
3. Kemanfaatan hasil	e. Tepat Manfaat
	f. Berkontribusi Terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Penjelasannya sebagai berikut:

1. Tepat Sasaran.

Hal ini terkait dengan siapakah yang menjadi penerima program. Dalam kondisi normal, program perlindungan sosial diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan. Dalam situasi darurat atau bencana, program diberikan kepada para semua korban yang membutuhkan. Untuk mewujudkan ketepatan sasaran ini, diperlukan pengaturan yang jelas tentang kriteria penerima program.

2. Tepat Jumlah

Besaran bantuan yang sampai di tangan para penerima harus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Jika jumlah yang diterima berkurang, dikhawatirkan manfaat dari bantuan tersebut tidak maksimal dalam membantu para penerimanya. Perhatian harus diberikan pada program

berbentuk bantuan sosial seperti bantuan pangan, bantuan kebutuhan hidup, bantuan tunai bersyarat, dan bantuan tunai tidak bersyarat. Bantuan dalam bentuk barang dan uang tunai biasanya paling rentan terhadap kebocoran. Bantuan uang yang diberikan melalui transfer bank, atau bantuan makanan yang diberikan dengan *voucher* pembelian pada toko, biasanya lebih terhindar dari kebocoran.

3. Tepat Waktu

Hal ini terkait dengan waktu penyerahan program yang harus terprediksi. Program perlindungan sosial idealnya diberikan tepat waktu. Jika bantuan sampai datang terlambat, maka nilai manfaatnya menjadi berkurang, dan para penerima kemungkinan akan mengalami situasi yang lebih buruk ketika bantuan terlambat datang.

Sedikit kesalahan waktu dalam penyaluran bantuan dapat berakibat tidak maksimalnya manfaat program. Sebagai contoh, bantuan beasiswa yang biasanya diberikan secara merata setiap bulan dalam setahun. Hal ini sebetulnya kurang tepat karena pengeluaran pendidikan yang paling besar adalah di bulan Juni-Juli. Kedua bulan ini adalah awal tahun akademik baru, di mana siswa akan membeli berbagai peralatan sekolah dan baju seragam. Seharusnya, jumlah beasiswa yang diberikan lebih besar pada bulan Juni-Juli dibandingkan bulan lainnya, dan penyalurannya tidak boleh terlambat.

4. Tidak Menimbulkan Konflik

Pendistribusian program perlindungan sosial tidak boleh menimbulkan kecemburuan sosial, konflik, atau perpecahan di tengah masyarakat. Kecemburuan sosial dapat terjadi karena ketidakjelasan kriteria yang digunakan untuk menentukan penerima program.

Ukuran kemiskinan kadang bersifat subjektif. Seseorang mungkin digolongkan tidak miskin oleh masyarakat, namun dalam pandangan pribadi orang tersebut bisa berbeda. Demikian juga faktor lokalitas, di mana gambaran dan profil kemiskinan akan berbeda dari satu daerah dan daerah lainnya.

Penggunaan satu kriteria nasional yang dipaksakan untuk diterapkan di semua daerah adalah tidak tepat. Jika kriteria penerima program tidak dirumuskan dengan jelas, tepat, dan sesuai dengan kondisi lokal, maka pelaksanaan program dapat memicu kecemburuan di tengah masyarakat.

5. Tepat Manfaat

Hal ini terkait dengan penggunaan bantuan oleh para penerima. Para penerima program idealnya menggunakan bantuan yang diberikan sesuai dengan pemanfaatannya. Sebagai contoh, beasiswa seharusnya digunakan untuk biaya sekolah. Bantuan Tunai Tanpa Syarat digunakan untuk kebutuhan konsumsi yang sesuai, bukan untuk membeli rokok dan minuman beralkohol.

6. Berkontribusi terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Sebuah program dikatakan berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan jika mampu mencegah penerimanya jatuh lebih dalam pada kemiskinan, atau bahkan membantu penerimanya keluar dari kemiskinan. Pada situasi krisis atau bencana, tujuan program dapat difokuskan pada mencegah korban semakin menderita atau jatuh lebih dalam pada kemiskinan. Hal ini berarti bahwa program berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar supaya para penerima dapat mempertahankan standar hidupnya dalam situasi darurat tersebut. Pada situasi normal, program harus dapat membantu para penerima untuk keluar dari kemiskinan.

7.4 Perpaduan Perlindungan Sosial dengan Skema Pembangunan Lain

Program perlindungan sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin dan rentan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Program ini bertujuan mengurangi beban hidup, memperbaiki kualitas hidup, dan memenuhi hak dasar atas pangan, kesehatan, dan pendidikan. Namun, program perlindungan sosial saja belum cukup untuk mengentaskan kemiskinan. Perlindungan sosial harus dilengkapi dengan skema pembangunan lainnya, yaitu pemberdayaan masyarakat.

Penyebab kemiskinan dan kerentanan bukan hanya faktor material, tetapi juga ketidakberdayaan dan struktur sosial politik yang timpang. Program pemberdayaan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas para penerima. Pemberdayaan juga bertujuan untuk membuat struktur sosial dan politik menjadi lebih setara dan terbuka bagi masyarakat miskin untuk menyuarakan kepentingannya. Program pemberdayaan bukan hanya menyadarkan masyarakat miskin tentang potensinya, tapi juga mendorong mereka berpartisipasi dalam skala yang lebih luas pada pemerintahan lokal. Program ini harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Skema perlindungan sosial idealnya dikembangkan menjadi lebih adaptif terhadap berbagai krisis, seperti bencana alam, krisis sosial-ekonomi, maupun kesehatan seperti pandemi Covid-19. Program-program perlindungan sosial perlu terus disempurnakan sehingga tidak terkesan sebagai *charity* atau donasi semata, tetapi harus mampu memperkuat kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Seluruh elemen bangsa perlu berkolaborasi bersama dalam upaya penanggulangan kemiskinan ini. Di samping menggunakan APBN, penanggulangan kemiskinan seharusnya juga berkolaborasi dengan dunia bisnis melalui program *Corporate Social Responsibility*, maupun berbagai lembaga pengelola zakat dan donasi lainnya serta para aktivis dan pendamping sosial. Tugas pemerintah adalah untuk mengkolaborasikan semua elemen bangsa dalam suatu manajemen kolaboratif penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga:



Bab 8 | Konsep Pemberdayaan Masyarakat

8.1 Definisi

Istilah pemberdayaan kini cukup sering terdengar oleh publik, terutama ketika pemerintah mensosialisasikan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan bahkan tidak terbatas pada satu bidang saja. Pemberdayaan menjadi tema utama di semua sektor, seperti kesehatan, ekonomi, hingga politik. Lalu, apa sejatinya makna dari pemberdayaan itu sendiri?

Sejumlah pakar melihat pemberdayaan secara berbeda. Artikel klasik dari Page dan Czuba (1999) mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah proses multidimensional yang membantu seseorang untuk meningkatkan kapasitasnya. Proses ini lebih lanjut akan memungkinkan orang tersebut dalam mengontrol segala keputusan hidupnya.

Berbeda dengan Page dan Czuba yang menempatkan subjek pemberdayaan secara umum, pakar dari World Bank mengartikan pemberdayaan sebagai upaya perluasan aset dan kemampuan orang miskin untuk berpartisipasi, bernegosiasi dengan, memengaruhi, mengontrol, dan meminta pertanggungjawaban institusi-institusi yang memengaruhi kehidupan mereka (Narayan, 2007). Bagi Narayan, pemberdayaan merupakan upaya pihak ketiga untuk membantu peningkatan kesejahteraan kaum kurang mampu dengan memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka.

Konsep lain terkait pemberdayaan ditawarkan oleh Tenglend, yang melihat bahwa pemberdayaan bukan sekadar tujuan saja. Pemberdayaan adalah proses timbal balik, yang bukan hanya yang terjadi pada satu individu saja, tapi bisa juga antar individu ke kelompok, maupun sebaliknya. Baginya, pemberdayaan melibatkan banyak pihak yang saling bekerja sama untuk membantu pihak yang kurang mampu supaya dapat mencukupi kebutuhan mereka terutama dalam meningkatkan taraf kesejahteraan (Tenglend, 2008).

Selain Tenglend, Wallerstein turut berpendapat bahwa pemberdayaan berhubungan erat dengan hubungan sosial dalam masyarakat. Bagi Wallerstein

(1992), pemberdayaan dimaknai sebagai proses dalam suatu upaya sosial untuk mempromosikan partisipasi individu, organisasi, dan komunitas dengan tujuan meningkatkan kendali individu dan komunitas, efikasi politik atau keyakinan bahwa tiap individu memiliki pengaruh terhadap keputusan politik, serta bertambahnya kualitas kehidupan komunitas, dan keadilan sosial.

Sedikit berbeda dari yang lain, seorang akademisi bernama Manoranjan Mohanty menilai bahwa pemberdayaan lebih mengimplikasikan kekuasaan formal daripada kekuasaan substantial. Ia melihat bahwa program pemberdayaan melibatkan agensi tingkat atas atau pihak eksternal untuk memberikan kekuasaan kepada orang-orang dari kelas bawah. Pemberian atau pembagian kekuasaan tadi juga bukan cuma-cuma. Ia menilai hal tersebut kadang merupakan mekanisme ketergantungan yang sengaja dibuat oleh kelompok elite untuk mempertahankan kekuasaan alih-alih benar-benar berbagi kekuasaan. Konsep ini bahkan Mohanty lihat sebagai bagian dari kapitalisme barat. Meski begitu, ia tak menampik bahwa pemberdayaan tetap memiliki dampak positif meski hanya dalam skala kecil (Mohanty, 1995).

Apa yang diungkapkan oleh para akademisi tadi menandakan bahwa pemberdayaan bisa dilihat dari perspektif berbeda, tergantung dari subjek, mekanisme, dan apa yang ingin dicapai. Namun, secara umum dapat digarisbawahi bahwa inti pemberdayaan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan potensi seseorang maupun kelompok supaya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, fisik, emosional, dan sosial.

8.2 Level Pemberdayaan

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial tidak hidup sendiri. Individu selalu berinteraksi dengan individu lainnya dalam sebuah kelompok maupun masyarakat. Ia tidaklah betul-betul bebas, namun dibatasi oleh aturan main atau *rule of the game* yang ada di lingkungannya. Justru lingkungan inilah yang akan menjadi faktor yang memungkinkan (*enabling*) atau menghambat (*constraining*) seseorang dalam merealisasikan kemampuannya.

Kenyataan di atas membawa implikasi tersendiri bagi proses pemberdayaan. Pemberdayaan tidak mungkin bisa berhasil jika hanya dilakukan terhadap manusianya saja. Pemberdayaan harus disertai dengan upaya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan dan aktualisasi potensi seseorang, yaitu lingkungan organisasi atau kelompok dan lingkungan masyarakatnya.

Pemberdayaan pada bidang apapun, baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain sejatinya harus dilakukan secara terintegrasi dan bertingkat pada tiga level, yaitu level individu, kelompok, dan masyarakat. Jenis intervensi atau kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pada setiap level akan berbeda. Secara ringkas hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.1 Pemberdayaan berdasarkan Level dan Jenis Keegiatannya

No	Level Pemberdayaan	Jenis Intervensi yang dibutuhkan
1	Individu	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengetahuan • Peningkatan keterampilan • Perbaikan sikap dan perilaku • Pembentukan kepercayaan diri • Pendampingan penyelesaian masalah
2	Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas organisasi • Penciptaan sistem kerja yang mendukung pengembangan potensi anggota • Perbaikan kinerja organisasi
3	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesetaraan politik • Peningkatan kesetaraan ekonomi • Peningkatan kesetaraan sosial

1. Pemberdayaan Level Individu

Pemberdayaan di tingkat individu lebih berfokus pada aspek *human capital* seperti pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku, dan kepercayaan diri. Di samping itu, individu juga harus didampingi supaya bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, sampai ia menjadi mandiri.

Pemberdayaan di level individu bukan hanya mencakup aspek material seperti pendapatan semata, namun yang tidak kalah penting adalah supaya ia dapat mengembangkan potensi dalam diri baik dari fisik hingga emosional. Pemberdayaan di level personal dapat dikatakan berhasil ketika seseorang mampu memiliki kesadaran kritis, dapat mengasah kemampuan mengolah strategi, dapat berkecimpung dalam dinamika relasi sosial hingga memiliki kesadaran untuk dapat mengembangkan daya partisipasinya dalam lingkup sosial kemasyarakatan.

2. Pemberdayaan Level Kelompok

Jika pemberdayaan di tingkat individu menekankan pada banyak aspek terkait psikologis sosial, pemberdayaan di tingkat kelompok lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas organisasi dan sistem kerja yang mendukung anggotanya merealisasikan potensi yang dimilikinya. Tidak kalah penting adalah upaya meningkatkan kinerja organisasi, supaya tujuan pembentukannya tercapai.

Terkait dengan pemberdayaan organisasi, Schulz, *et al.* (1995) berpendapat bahwa hal ini sebaiknya dilakukan tidak hanya satu arah, tapi dua arah. Dengan kata lain, pemberdayaan yang efektif berarti tidak hanya memberdayakan anggota organisasi tapi juga memberdayakan organisasi itu sendiri.

Dari sini, bisa diartikan bahwa organisasi yang memberdayakan adalah organisasi yang memberikan peluang pertumbuhan kepada individu dan memberikan akses anggotanya dalam proses pengambilan keputusan. Organisasi ini idealnya dikelola secara kooperatif oleh anggotanya, dan bekerja untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh para anggota. Pembentukan sistem interaksi/kerja yang mendukung akan membuat individu tidak sungkan mengembangkan keterampilan dan menyampaikan aspirasinya melalui partisipasi aktif.

Sebaliknya, organisasi yang diberdayakan adalah organisasi yang memiliki kendali dan pengaruh terhadap lingkungan mereka serta mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi distribusi sumber daya sosial dan ekonomi. Aturan dalam organisasi harus memberikan peluang yang sama dan setara kepada anggotanya untuk mengembangkan potensinya. Kinerja organisasi ditingkatkan, dan manfaatnya diberikan sebesar-besarnya bagi para anggotanya.

Gambaran konsepsi tentang organisasi sebagai yang diberdayakan dan yang memberdayakan tadi memperlihatkan bagaimana hubungan tingkat pemberdayaan individu dan kolektif. Individu bekerja dalam organisasi yang dikelola secara kooperatif dan menjadi diberdayakan melalui pengembangan keterampilan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan tujuan bersama dengan anggota lain dalam kelompok. Sebaliknya, individu-individu ini memberdayakan organisasi untuk efektif bekerja menuju tujuan organisasi dalam konteks lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan politik di mana mereka ada.

3. Pemberdayaan Level Masyarakat

Pemberdayaan yang berhasil di tingkat masyarakat ditandai dengan diberikannya ruang seluas-luasnya terhadap pengembangan kapasitas di tingkat individu dan kelompok. Dengan peningkatan kapasitas tadi, kemudian terbangun masyarakat yang berdaya karena di dalamnya ada individu-individu dan kelompok-kelompok yang bahu-membahu untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih baik.

Pemberdayaan pada level masyarakat dilakukan dengan membenahi struktur sosial, politik dan ekonomi supaya lebih setara. Ketimpangan kekuasaan dianggap sebagai sumber dari ketidakberdayaan masyarakat atau kelompok tertentu. Sebagai ilustrasi, pada saat ada sekelompok orang, misalnya pimpinan masyarakat, yang sangat berkuasa, maka pada saat yang sama ada kelompok lain, yaitu masyarakat yang dipimpin, yang sangat tidak berdaya. Dari logika ini, pemberdayaan di level masyarakat sangat berhubungan dengan upaya melibatkan individu, kelompok minoritas, atau masyarakat pada umumnya dalam proses pengambilan keputusan publik. Pemberdayaan di level ini juga berkaitan dengan upaya membuat distribusi sumber daya ekonomi menjadi lebih adil diantara anggota masyarakat.

Menurut Amrutkar (2016), masyarakat dianggap berdaya jika mereka:

- a. memiliki akses terhadap informasi;
- b. diikutsertakan dan berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan;
- c. dapat meminta pertanggungjawaban pengambil keputusan atas pilihan dan tindakan mereka;
- d. memiliki kapasitas dan sumber daya untuk berorganisasi guna mengekspresikan kepentingan mereka.

4. Hubungan antar Level Pemberdayaan

Dari penjabaran terkait tiga level pemberdayaan tadi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemberdayaan adalah suatu proses yang berkaitan satu sama lain di level individu, kelompok, hingga masyarakat. Konsep pemberdayaan multilevel ini menggambarkan bagaimana interaksi di antara ketiganya saling mempengaruhi. Menurut model ini, ketika tindakan di tingkat kelompok atau masyarakat menghasilkan pengaruh yang efektif, individu yang terlibat dalam proses tersebut akan secara tidak langsung diberdayakan, karena ia kemudian memiliki kendali yang lebih besar dibandingkan sebelumnya dan juga telah meningkatkan kapasitasnya.

Dalam banyak kasus, kelompok yang bersifat sukarelawan, seperti Koalisi Pemuda Hijau yang bergerak di isu lingkungan, memainkan peran penting antara individu dan masyarakat. Mereka memberikan kesempatan bagi individu untuk berkumpul dengan orang lain yang memiliki tujuan atau pengalaman serupa, dan dari pertemuan itu selanjutnya terbentuk kesempatan dan struktur untuk mendukung upaya individu dalam meningkatkan keterampilan. Upaya individu pada gilirannya memungkinkan organisasi untuk mempengaruhi alokasi sumber daya sosial dalam masyarakat yang lebih besar.

Elemen-elemen dari setiap level pemberdayaan ini tidak terbatas pada daya kendali atau efikasi personal semata. Elemen tersebut merambah pada ketersediaan sumber daya, termasuk keterampilan personal dan akses ke sumber daya organisasi, sosial, dan ekonomi, untuk mempengaruhi isu-isu kelompok dan masyarakat, serta komitmen agar dapat meningkatkan kekuatan dan kapasitas yang dimiliki individu, kelompok, dan masyarakat secara bersamaan.

8.3 Pemberdayaan Masyarakat dan Modal Sosial

Praktik pemberdayaan masyarakat merupakan upaya sistematis dan saling terkait untuk meningkatkan kapasitas individu, keberfungsian kelompok, dan kesetaraan dalam masyarakat. Upaya ini secara teoritis sangat terkait dengan penciptaan, pengembangan dan pemanfaatan modal sosial. Merujuk teori modal sosial dari Fukuyama (2001), program pemberdayaan akan lebih mudah diterapkan jika sekelompok masyarakat memiliki jaringan sosial, norma, kepercayaan, dan hubungan saling ketergantungan antara individu maupun kelompok. Aspek ini mencakup kualitas dan kekuatan hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, seperti kepercayaan, saling ketergantungan, partisipasi, kolaborasi, dan solidaritas. Dengan kata lain, modal sosial membentuk dasar untuk kerja sama, komunikasi, dan interaksi yang saling menguntungkan antara individu dan kelompok dalam suatu masyarakat.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, modal sosial memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk mengatasi tantangan, memecahkan masalah, dan mengambil tindakan kolektif. Modal sosial memberikan dukungan bagi masyarakat dalam berbagi pengetahuan, sumber daya, dan informasi yang relevan. Ini memungkinkan terbentuknya jaringan yang kuat, yang dapat digunakan untuk akses ke peluang, sumber daya, dan pengaruh yang lebih besar.

Melalui modal sosial, masyarakat dapat membentuk norma dan nilai yang mempromosikan partisipasi, keadilan, kepercayaan, dan saling peduli. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemberdayaan, di mana individu dan kelompok merasa didukung, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan kesempatan. Selain itu, modal sosial juga dapat digunakan sebagai alat untuk memobilisasi dan mengorganisir masyarakat, memperkuat keterlibatan mereka dalam proses pembuatan keputusan, dan mendorong kolaborasi antaranggota masyarakat. Modal sosial yang terbentuk lambat laun kemudian memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Dengan membangun modal sosial yang kuat, masyarakat dapat mencapai pemberdayaan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas mereka untuk menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik, serta mewujudkan perubahan positif dalam kehidupan mereka sendiri dan komunitas mereka secara keseluruhan (Fukuyama, 2001).

Dalam konteks lokal, modal sosial dan pemberdayaan komunitas memainkan peran yang signifikan dalam pengembangan komunitas. Tak heran, kini semakin banyak instansi pemerintah maupun LSM yang berlomba-lomba untuk mendorong modal sosial sebagai alat implementasi program pemberdayaan masyarakat, yang harapannya dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan.

Pada kasus-kasus di sejumlah negara berkembang, modal sosial dapat dihasilkan melalui harapan orang miskin di pedesaan yang menjadi korban kegagalan pemerintah dan pasar. Misalnya, tuntutan orang miskin di pedesaan Bangladesh terhadap barang dan layanan ekonomi dan sosial yang terjangkau telah memaksa mereka untuk saling bergandengan tangan untuk berkontribusi pada penciptaan jenis modal lainnya, terutama modal ekonomi dan modal sumber daya manusia, yang berguna untuk bertahan hidup (Mondal, 2001).

Bab 9 | Sejarah Pemberdayaan

9.1 Di Tingkat Global

Konsep pemberdayaan (*empowerment*), menurut *American Heritage Dictionary of the English Language*, berasal dari kata *empower*, atau berarti memberdayakan, yang mulai digunakan dari pertengahan abad ketujuh belas. Pada masa itu makna memberdayakan berhubungan erat dengan upaya untuk menghubungi pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah dan pemilik modal. Dalam perkembangan selanjutnya, kata tersebut lebih banyak dimaknai dalam konteks untuk mengaktifkan atau mengizinkan suatu hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Namun, penggunaannya yang lebih kontemporer berakar pada gerakan politik yang marak terjadi pada tahun 1960an dan 1970an, saat kelompok pembebasan perempuan dan kulit hitam di Amerika Serikat mulai mengungkapkan aspirasinya melalui forum-forum publik (Cruikshank 1999).

Bila ditilik dari akar sejarahnya, lahirnya pemberdayaan berawal dari gerakan komunitas kulit hitam di Amerika yang menginginkan mereka mendapatkan akses dan pelayanan publik yang sama dengan mayoritas warga kulit putih. Terlebih pada awal Amerika Serikat berdiri, pelayanan dasar yang diperoleh warga kulit putih dan kulit hitam tidaklah sama. Warga kulit hitam dipandang sebagai masyarakat kelas dua. Mereka distigmakan malas dan bodoh, terutama yang bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Stigma negatif tadi kian memperparah kondisi mereka. Komunitas kulit hitam juga harus dihadapkan oleh pembatasan sejumlah akses layanan dasar dan hak politik, seperti tidak diperbolehkan mengikuti pemilihan umum dan memasuki beberapa tempat publik. Diskriminasi yang mereka peroleh selanjutnya mendorong terbentuknya gerakan untuk memperjuangkan hak-hak setara agar kehidupan mereka jauh lebih baik.

Tuntutan supaya kelompok kulit hitam mendapat perlakuan yang sama kemudian mendorong gerakan *empowerment*. Gerakan ini tidak hanya meminta pemerintah untuk menghapuskan kebijakan diskriminatif, tetapi juga mendesak pemerintah mengakomodasi aspirasi masyarakat yang selama ini

termarjinalkan. Melihat fenomena yang ada saat itu, Solomon (1976) kemudian mendefinisikan proses pemberdayaan kelompok minoritas ini sebagai upaya membantu mereka yang terpinggirkan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang layak sekaligus mendampingi warga lokal untuk lebih berdaya sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan mereka. Konsep pemberdayaan Solomon tadi kemudian mendapat perhatian khalayak luas terutama di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Bahkan dalam perjalanannya, semakin banyak akademisi yang menyetujui pendapat Solomon hingga kemudian memperluas konsep pemberdayaan tersebut.

Di Eropa, terutama di Inggris Raya hingga tahun 1980-an, penggunaan istilah pemberdayaan kurang populer karena acap kali dihubungkan dengan gerakan sosial politik di Amerika Serikat yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok miskin dan marjinal. Pemberdayaan menjadi populer ketika Perdana Menteri Inggris mulai menyebut-nyebutnya dalam beberapa kegiatan kenegaraan, seperti pada publikasi pemerintah, promosi program kesehatan, hingga kampanye kebijakan ekonomi (McLaughlin 2016).

Pengenalan pemberdayaan melalui acara kenegaraan membuat istilah ini mengglobal. Kemunculannya hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, hingga personalisme. Tak lama setelah aliran tadi berkembang, terbitlah teori baru lain, seperti konsep-konsep elite, kekuasaan, *anti-establishment*, gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi pembebasan dan juga gagasan mengenai masyarakat sipil. Karena itulah, konsep pemberdayaan dipandang sebagai bagian dari aliran post-modernisme, dengan penekanan sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur, dan anti-determinisme, yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan (Widayanti 2012).

9.2 Indonesia

Berbeda dengan gerakan di negeri-negeri barat yang mengenalkan pemberdayaan dari bawah ke atas, perkembangan konsep pemberdayaan di Indonesia tak terlepas dari program-program pada masa pemerintahan Orde Baru yang menitikberatkan pada pembangunan. Sebelum disebut pemberdayaan, pemerintah Indonesia dulu mempopulerkannya dengan nama pembangunan masyarakat (Adnin, 2015). Istilah pembangunan masyarakat berangkat dari persepsi bahwa mereka belum punya sumber daya yang cukup untuk mengembangkan kapasitas dan potensi dirinya, sehingga pemerintah memilih istilah membangun masyarakat.

Pemerintahan Orde Baru sejak berkuasa di akhir 1960an telah menjadikan pembangunan sebagai salah satu kebijakan utama pemerintah. Dengan jaringan keamanan yang kuat, Presiden Soeharto mampu menciptakan situasi politik yang stabil hampir sepanjang masa pemerintahannya. Dilandasi stabilitas politik dan pemerintahan kuat inilah kemudian Orde Baru menerima banyak investasi asing (Pratikno, 1998) yang digunakan untuk membiayai program peningkatan infrastruktur skala besar dan program pembangunan masyarakat.

Pergeseran istilah dari pembangunan masyarakat menjadi pemberdayaan dimulai ketika Bank Dunia mencanangkan agenda *Millenium Development Goals* (MDG's) 1990-2015. Salah satu agenda yang menjadi prioritas adalah pengentasan kemiskinan. Paradigma pengentasan kemiskinan melalui program pembangunan yang ditekankan oleh Bank Dunia sendiri bukan bersifat *top-down*, tapi lebih ke arah partisipatif, memberdayakan dan berjangka panjang. Sejak itu upaya penurunan angka kemiskinan melalui usaha pemberdayaan akhirnya mulai familiar di telinga masyarakat.

Pada tahun 1993, pemerintah melaksanakan Program Inpres No. 5/1993, atau yang lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Masyarakat miskin yang berada di desa-desa tertinggal diberikan dana kelompok untuk dikelola sesuai potensi setempat. Dari sini, pemberdayaan kian populer dan menjadi tema utama ketika membicarakan program pembangunan (Mardikanto & Soebiato 2019).

Program IDT berhenti pada tahun 1997. Penelitian yang dilakukan oleh Yamauchi (2007) menemukan bahwa sekitar 80% penerima program IDT menginvestasikan dananya untuk kegiatan pertanian seperti peternakan, budidaya tanaman pangan dan perikanan. Sisanya, mereka menggunakan uang yang diterima untuk perdagangan dan usaha mikro dan kecil. Dengan menganalisa kondisi ekonomi penerima program pada tahun 1998, Yamauchi (2007) menyimpulkan bahwa dampak IDT terhadap perbaikan ekonomi masyarakat miskin relatif kecil dan hanya bertahan dalam jangka pendek.

Pada tahun 1999, pemerintah melaksanakan program pemberdayaan bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Gabungan pemerintah desa dalam satu kecamatan diberikan dana untuk dimanfaatkan bagi pembangunan infrastruktur dan pengembangan kelompok simpan pinjam perempuan. Program ini menerapkan pendekatan partisipatif dengan menyerahkan pengambilan keputusan terkait pemanfaatan dana kepada masyarakat setempat.

Pada periode selanjutnya, PPK berganti nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di tahun 2006. PNPM dilaksanakan di seluruh kecamatan di Indonesia dengan menerapkan mekanisme dan sistem kerja yang hampir sama dengan PPK. Selanjutnya, sebagai implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada tahun 2015 PNPM di wilayah pedesaan dihentikan dan dialihkan menjadi program Dana Desa. Pemerintah pusat mentransfer dana bagi pemerintah desa untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara partisipatif.

Dari sejarah penerapan konsep dan program pemberdayaan sebagaimana diuraikan di atas, terlihat bahwa pemberdayaan di Indonesia telah dipahami sebagai pendekatan pembangunan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat lebih dimaknai sebagai pendekatan pembangunan untuk menyelesaikan kemiskinan, ketimpangan dan persoalan lain yang tidak mampu ditangani oleh pendekatan modernisasi dan pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

9.3 Miskonsepsi Pemberdayaan di Indonesia

Pendekatan pemerintah Indonesia dalam menerapkan pemberdayaan jauh berbeda dari sejarah awal pemberdayaan yang berakar dari kelompok-kelompok marjinal yang permulaannya terjadi di Amerika Serikat. *Empowerment* yang mereka gerakkan menuntut terdistribusinya kekuasaan karena selama negara Amerika berdiri, aspirasi dan partisipasi mereka sangat dibatasi.

Karena banyak program pemerintah Orde Baru mendapatkan dana dari negara-negara donor bersistem demokrasi, akhirnya program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Indonesia menyesuaikan dengan mengkombinasikan sistem demokrasi dan otoriter. Alih-alih menekankan pada transfer kekuasaan dan memberikan ruang masyarakat untuk bersuara, program pemberdayaan tetap diimplementasikan melalui sistem satu komando, namun tujuannya tetap sama, yaitu mengentaskan kelompok rentan dan miskin.

Latar belakang di atas mempengaruhi strategi program-program pemberdayaan di Indonesia. Program yang ada umumnya bersifat pembinaan kepada masyarakat supaya mengikuti rencana dan ketetapan yang diputuskan oleh pemerintah dan pihak berwenang lainnya. Padahal, jika dilihat dari maknanya, pemberdayaan dan pembinaan memiliki makna berbeda. Pembinaan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti:

usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dari pengertian tadi, yang lebih difokuskan bukan pada memberikan *power* kepada masyarakat, tapi lebih merujuk pada hasil akhir yang didapatkan.

Pemberdayaan versi pemerintah ini berbanding terbalik dengan konsep-konsep awal pemberdayaan yang digagas oleh aktivis dan akademisi. Friedman (1992) berpendapat bahwa pemberdayaan menekankan pada partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi langsung. Pemberdayaan dikatakan sukses bukan hanya jika ia telah berhasil menekan angka kemiskinan, namun juga ketika ia telah memampukan dan memandirikan masyarakat. Oleh karena itu, pencapaian tujuan pemberdayaan perlu ditekankan pada tiga aspek. Pertama, penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat dapat terus berkembang secara jangka panjang. Kedua, penguatan potensi dan kapasitas masyarakat melalui penyediaan akses sumber daya. Ketiga, pencegahan kesenjangan antara yang kaya dan miskin dengan menerapkan kebijakan yang menempatkan semua warga negara secara setara.

Sejalan dengan Friedman, Sumodiningrat (1997) menguraikan bahwa pemberdayaan sejatinya tidak membuat masyarakat selalu bergantung pada pemerintah. Sebaliknya, pemberdayaan adalah upaya memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat disertai dengan pemberian fasilitas dasar pelayanan publik untuk memperbaiki kondisi mereka sendiri, yang disesuaikan dengan sumber daya lokal. Sehingga ke depannya, tidak hanya tercipta peningkatan ekonomi, tapi juga perbaikan kesejahteraan seperti di bidang pendidikan hingga kesehatan.

Sayangnya, hakikat dasar pemberdayaan tersebut di atas belum sepenuhnya diletakkan sebagai fondasi berbagai program pemerintah. Redefinisi konsep pemberdayaan dan perbaikan esensi program supaya dapat memandirikan masyarakat belum sepenuhnya mampu dilakukan di Indonesia, meski sekarang kita telah memasuki era demokrasi.

Bab 10 | Prinsip, Tujuan, dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

10.1 Prinsip Pemberdayaan

Program pemberdayaan masyarakat dari sejak pemerintahan Orde Baru hingga sekarang terus menjadi strategi unggulan pemerintah dalam penanganan kemiskinan. Bentuk dan ragamnya tak terbatas satu jenis. Tiap tahun, isu dan target program selalu berkembang secara dinamis.

Pemberdayaan masyarakat idealnya didasarkan pada prinsip partisipasi, kesetaraan, akses terhadap sumber daya, penguatan kapasitas, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Keenam prinsip ini saling terkait satu dengan lainnya, dan penerapannya diawali dengan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri (Figure 10.1).



Figure 10.1 Prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat

1. Partisipasi

Masyarakat harus memiliki kesempatan dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi

kehidupan mereka. Partisipasi yang inklusif dan demokratis memungkinkan warga masyarakat menyampaikan pendapat mereka, memberikan masukan, dan berperan aktif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Tapi, perlu dicatat bahwa partisipasi tidaklah selalu berbentuk formal seperti menghadiri rapat musyawarah desa secara fisik. Partisipasi pun bisa dijalankan secara informal, seperti melalui media sosial, pimpinan lokal yang menjemput bola dengan datang dari rumah ke rumah, atau ketika bercengkrama saat ronda malam. Sebab, jika didasarkan pada kultur kerja masyarakat Indonesia, tidak semua individu bisa hadir langsung ketika rapat dilaksanakan. Alternatifnya, partisipasi tidak perlu selalu dipaksakan dalam bentuk kehadiran fisik dalam acara formal, tapi bisa juga dalam bentuk lain dan menyesuaikan adat, situasi kondisi masyarakat setempat.

Partisipasi masyarakat idealnya terjadi mulai dari tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi, sampai dengan pemanfaatan program. Hal yang sering terjadi di Indonesia adalah bahwa masyarakat umum pedesaan hanya dilibatkan pada saat pelaksanaan program melalui mobilisasi tenaga dan sumber daya lainnya (Sutiyo & Maharjan, 2012; Sutiyo *et al.*, 2020). Mereka kurang terlibat pada saat perencanaan dan evaluasi program. Akibatnya, manfaat dari program pemberdayaan kurang dirasakan oleh masyarakat.

2. Kesetaraan

Prinsip kesetaraan menekankan pentingnya menghormati dan memperlakukan semua anggota masyarakat secara adil dan tanpa diskriminasi. Setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari program dan kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini, kelompok mayoritas harus mendengarkan kelompok minoritas. Salah satu caranya yaitu menanyakan kepada mereka terkait poin regulasi dan mengakomodasi hak dasar mereka sebagai warga negara. Apapun bentuk program pemberdayaannya, semua kelompok masyarakat mendapatkan informasi dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya ketika terlibat dalam program.

3. Akses terhadap Sumber Daya

Masyarakat harus memiliki akses yang setara terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kemandirian. Hal ini termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, layanan dasar, tanah, modal, teknologi, dan informasi.

Persoalan akses ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang belum terselesaikan di Indonesia. Akses sumber daya masih sering dimonopoli oleh kaum elite dan kelas menengah. Kelompok masyarakat dengan taraf ekonomi bawah dan mereka yang tinggal di daerah dengan akses transportasi terbatas mengalami banyak kendala untuk mengakses sumber daya. Jika pun ada sumber daya melimpah di sekitar mereka, mereka kadang dihadapkan pada problem 'politik jatah preman', di mana pengambilan dan pemanfaatan sumber daya mengharuskan mereka untuk membayar uang tambahan kepada pihak-pihak tertentu seperti organisasi pengelola sumber daya, pemilik lahan, pihak keamanan, perwakilan pemerintah, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu bagi pemerintah tidak hanya sekadar melakukan inovasi di bidang teknologi semata, tapi menciptakan sistem yang membuat masyarakat, terutama kelas bawah dapat memiliki akses yang sama seperti kelompok masyarakat lainnya.

4. Penguatan Kapasitas

Pemberdayaan masyarakat melibatkan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang. Hal ini melibatkan pendidikan, pelatihan, dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok masyarakat.

Dalam pelaksanaan aktivitas penguatan kapasitas, penting untuk mempertimbangkan kultur dan sumber daya lokal. Sehingga, ketika masa pendampingan dari pihak ketiga telah usai, dampak program pemberdayaan terus berjalan atau tidak bersifat sementara. Dalam sejumlah kasus program pemberdayaan, efek program pemberdayaan sering hanya sebatas ketika program berjalan saja. Setelah periode program usai, para pelaku atau target penerima program pemberdayaan tidak melanjutkan pengetahuan yang mereka peroleh karena keterbatasan akses, sumber daya, dan faktor utama lainnya (Lesnussa & Kunci 2019)

5. Pembangunan Berkelanjutan

Pemberdayaan masyarakat harus bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini mencakup upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat saat ini dan generasi masa depan, serta menghormati dan melindungi lingkungan alam. Prinsip ini penting untuk diterapkan karena

pemberdayaan seringkali hanya dikaitkan dengan peningkatan taraf ekonomi, tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan sosial.

6. Keadilan Sosial

Prinsip keadilan sosial menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Pemberdayaan masyarakat harus berfokus pada upaya untuk menciptakan kesempatan yang setara dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat mengambil bagian dalam pembangunan secara adil dan merata.

Frasa 'adil' dalam konteks pemberdayaan berarti bahwa kelompok minoritas atau kelompok menengah ke bawah bisa mendapatkan dispensasi untuk kemudian mengejar ketertinggalan, agar kondisi pemberdayaan yang tercipta tidak bias kelas. Contohnya, ketika ada program pelatihan mengetik dengan perlengkapan laptop/komputer, panitia harus menyediakan perangkat laptop/komputer bagi para peserta. Jika memaksa peserta membawa sendiri-sendiri, akhirnya yang bisa mengikuti hanya individu yang taraf ekonominya baik, sedangkan mereka yang tidak memiliki perangkat teknologi akan gagal untuk mengikuti program.

10.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah membuat masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian berarti mampu mengambil keputusan dengan benar dan bertindak tanpa tergantung pada pihak lain.

Adams (2008) mempertegas tujuan pemberdayaan dengan merinci bahwa pemberdayaan dikatakan telah berhasil jika kapasitas individu, kelompok, dan masyarakat terus bertambah secara kualitas, yang lalu berdampak pada kemampuan mereka untuk mengontrol otoritas dan kemudian memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan.

Sama dengan Adams, Thompson (2007) mencoba meluruskan bahwa basis dari pemberdayaan adalah membantu masyarakat meningkatkan derajat kesejahteraannya dengan menyesuaikan nilai-nilai dan kebutuhan yang mereka perlukan, bukan membantu masyarakat dengan cara paksaan atau sesuai kehendak penguasa. Dalam konteks ini, Thompson menegaskan bahwa pemberdayaan seharusnya dilakukan secara sukarela dengan menerapkan interaksi dua arah antara pekerja sosial dengan target masyarakat yang akan diberdayakan.

Secara sederhana, dalam konteks masyarakat Indonesia yang heterogen, Mardikanto dan Soebiato (2019) menyimpulkan pemberdayaan sebagai upaya memampukan dan memandirikan masyarakat yang hasilnya akan dapat membantu pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Pemberdayaan bisa diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi yang dinamis.

10.3 Strategi Pemberdayaan

Masyarakat rentan dan miskin tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri. Pemerintah perlu menyiapkan tim pendamping yang memfasilitasi masyarakat menakar, memetakan kebutuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Namun tim pendamping ini sebaiknya tidak permanen melekat. Kontribusi mereka memang akan cukup signifikan di awal program, tetapi seiring berjalannya waktu para petugas sosial akan digantikan oleh warga lokal yang memiliki kapasitas untuk memimpin dan menggerakkan masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat tidak selalu bergantung pada pihak ketiga. Meski begitu, bila ada kesulitan dalam praktiknya, ruang komunikasi antara pihak eksternal dengan target masyarakat penerima program tetap terbuka supaya program yang dilaksanakan tetap berkesinambungan.

Dalam prosesnya, tim pendamping perlu menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pemberdayaan. Aspirasi lokal yang ada menjadi masukan untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam membantu warga mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, masyarakat didampingi untuk merumuskan solusi berdasarkan sumber daya internal dan eksternal yang ada.

Program pemberdayaan masyarakat akan berhasil jika dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek penting, yang akan dijelaskan satu persatu pada uraian berikutnya. Perlu diperhatikan bahwa keenam aspek ini tidak dapat dilakukan secara terpisah, namun perlu diimplementasikan secara bersama agar kemudian bisa saling mendukung demi mencapai tujuan final program. Keenam aspek penting dalam strategi pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Disusun sendiri oleh masyarakat

Dalam program pemberdayaan, salah satu kunci penting untuk mencapai keberhasilan adalah bagaimana program tersebut disusun oleh masyarakat sendiri. Konsep ini dikenal sebagai pendekatan partisipatif dalam

pengembangan program pemberdayaan. Ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam merencanakan, merancang, dan melaksanakan program pemberdayaan, mereka memiliki perasaan memiliki terhadap program tersebut. Situasi ini diarahkan supaya masyarakat memiliki kontrol dan tanggung jawab langsung terhadap jalannya program, yang pada gilirannya meningkatkan peluang keberhasilan jangka panjang.

Ketika program pemberdayaan digagas dan dikerjakan bersama oleh masyarakat yang menjadi sasaran, program tersebut cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ini membantu memastikan bahwa solusi yang diusulkan lebih relevan, berkelanjutan, dan dapat diadopsi oleh masyarakat karena didasarkan pada pengetahuan lokal dan pemahaman mendalam tentang masalah yang dihadapi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga memperkuat rasa tanggung jawab dan solidaritas di antara anggota komunitas, yang merupakan faktor penting dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan kata lain, ketika masyarakat memiliki peran sentral dalam pembentukan dan pelaksanaan program pemberdayaan, peluang kesuksesan program tersebut menjadi lebih tinggi karena sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka. Hal ini memungkinkan pemecahan masalah yang lebih efektif, dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif ini merupakan aspek penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

2. Pemberdayaan yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat

Dalam konteks program pemberdayaan, keberhasilan program sangat erat kaitannya dengan kemampuannya untuk merespons dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi sasaran program. Kebutuhan dasar ini mencakup aspek-aspek seperti akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, akses terhadap air bersih, sanitasi yang baik, serta keamanan pangan. Ketika program pemberdayaan mampu mengidentifikasi, memahami, dan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan ini, maka program tersebut memiliki landasan yang kuat untuk mencapai tujuannya.

Mengapa kebutuhan dasar ini penting? Karena keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya diukur dari indikator-indikator ekonomi semata, tetapi juga dari dampak sosial dan kualitas hidup yang ditingkatkan bagi

masyarakat sasaran. Ketika program membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti akses terhadap pendidikan yang berkualitas, masyarakat dapat meningkatkan kapasitas mereka sendiri, membuka peluang baru, dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Tidak hanya itu, ketika layanan kesehatan yang baik tersedia, maka masyarakat menjadi lebih sehat dan produktif. Pekerjaan yang layak dan penghasilan yang stabil juga memberikan keamanan ekonomi yang dapat memutus siklus kemiskinan.

Oleh karena itu, keselarasan antara program pemberdayaan dengan kebutuhan dasar masyarakat adalah inti dari kesuksesan program tersebut. Pemberdayaan tanpa lebih dahulu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sama saja akan menambah masalah baru. Di samping itu, perlu diingat bahwa pemberdayaan memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Dengan demikian, program pemberdayaan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dapat membantu masyarakat mencapai kemandirian yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

3. Berakar dari sumber daya lokal

Keberhasilan program pemberdayaan seringkali terkait erat dengan sejauh mana program tersebut mengakar pada sumber daya lokal. Ini berarti bahwa program tersebut harus memahami, memanfaatkan, dan memperkuat aset dan potensi yang sudah ada di dalam komunitas yang menjadi sasaran program. Ketika program pemberdayaan mampu memanfaatkan sumber daya lokal, seperti pengetahuan lokal, keterampilan, tradisi, budaya, serta jaringan sosial, maka program tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai dampak yang berkelanjutan.

Ketika pemberdayaan dilakukan, sumber daya lokal bukan hanya alat untuk mencapai tujuan program, tetapi juga merupakan fondasi yang kuat untuk membangun keberlanjutan. Memahami konteks lokal membantu program menyesuaikan pendekatan mereka sehingga lebih relevan dan diterima oleh masyarakat sasaran. Sumber daya lokal juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal yang justru bila dipaksakan hanya akan membuat program pemberdayaan memiliki durasi pendek dan tidak berkesinambungan. Selain itu, optimalisasi sumber daya lokal akan memungkinkan masyarakat untuk mengambil kendali atas proses pemberdayaan yang mereka lakukan sendiri.

Dampak positif lainnya ketika program pemberdayaan berakar pada sumber daya lokal adalah terciptanya peluang kolaborasi yang lebih kuat antar anggota komunitas. Masyarakat yang paham betul bagaimana potensi besar yang mereka miliki bisa diarahkan untuk menjadi mitra aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap hasil program.

Dengan kata lain, program pemberdayaan yang berakar pada sumber daya lokal mendorong keberlanjutan, relevansi, dan partisipasi yang lebih besar. Hal ini semua merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan yang berkelanjutan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

4. Mengakomodasi nilai-nilai budaya setempat

Dalam konteks program pemberdayaan, keberhasilan seringkali sangat tergantung pada sejauh mana program tersebut mampu mengakomodasi nilai-nilai budaya setempat. Setiap komunitas memiliki sistem nilai, norma, dan budaya yang unik. Program pemberdayaan yang menghormati dan memahami nilai-nilai ini cenderung lebih efektif dan diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran program.

Mengakomodasi nilai-nilai budaya setempat berarti memahami dan menghormati tradisi, keyakinan, bahasa, serta norma-norma sosial yang mendefinisikan masyarakat tersebut. Program pemberdayaan yang berusaha untuk memahami dan menghormati aspek-aspek ini memiliki peluang yang lebih besar untuk membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, sehingga lebih mudah untuk memfasilitasi perubahan positif.

Selain itu, ketika program pemberdayaan mengintegrasikan nilai-nilai budaya setempat dalam desain dan pelaksanaannya, pemberdayaan yang dilaksanakan akan dapat memperkuat rasa identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap program tersebut. Ini juga membantu masyarakat merasa bahwa program tersebut bukanlah suatu unsur asing yang diimpor dari luar, tetapi merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperkuat dan mempertahankan warisan budaya mereka. Sehingga, masyarakat jauh lebih mudah menerima dan melaksanakan program.

Mengakomodasi nilai-nilai budaya setempat juga dapat membantu masyarakat merasa lebih nyaman dalam berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan, karena mereka tidak merasa harus mengorbankan atau mengubah nilai-nilai budaya mereka. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat partisipasi, keterlibatan, dan akseptabilitas program.

5. Ramah lingkungan

Dalam program pemberdayaan, penting untuk mempertimbangkan dan memenuhi aspek ramah lingkungan sebagai salah satu kunci keberhasilan. Kelestarian lingkungan adalah faktor penting dalam mencapai pemberdayaan yang berkelanjutan. Program pemberdayaan berfokus pada upaya yang ramah lingkungan akan menghasilkan dampak yang positif baik bagi masyarakat maupun ekosistem mereka.

Program yang mempertimbangkan aspek ramah lingkungan mungkin mencakup praktik-praktik yang berkelanjutan seperti pengelolaan sumber daya alam dengan bijak, penggunaan energi yang efisien, pengurangan limbah, dan pemeliharaan lingkungan yang sehat. Hal ini tidak hanya membantu melindungi alam dan ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan jangka panjang dari program itu sendiri.

Selain itu, aspek ramah lingkungan dalam program pemberdayaan dapat menciptakan peluang baru untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan. Misalnya, pendekatan berkelanjutan dalam pertanian atau produksi barang-barang lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sambil menjaga keseimbangan ekosistem.

Poin positif lainnya adalah masyarakat yang sadar akan lingkungan cenderung lebih terlibat dalam melindungi alam dan menjaga keberlanjutan sumber daya. Dengan demikian, program pemberdayaan yang mempromosikan kesadaran lingkungan dan tindakan berkelanjutan juga dapat menciptakan perubahan sosial positif dalam komunitas yang dilayani.

6. Berkesinambungan namun tidak menyebabkan ketergantungan terus menerus kepada pihak ketiga

Dalam program pemberdayaan, menjaga keberlanjutan program dan menghindari ketergantungan terus-menerus kepada pihak ketiga merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Tujuan pemberdayaan adalah memberikan alat dan keterampilan yang diperlukan masyarakat untuk mengelola kehidupan mereka sendiri dengan mandiri. Oleh karena itu, program pemberdayaan yang berhasil harus dirancang sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat secara bertahap mengambil kendali atas upaya-upaya mereka sendiri.

Sebagian besar program pemberdayaan memang didanai pihak ketiga, baik dari pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Namun jika setelah program berlangsung, tidak ada kemandirian komunitas yang terbentuk dan programnya terlalu terfokus pada bantuan eksternal yang berkelanjutan, ada risiko bahwa masyarakat akan menjadi terlalu tergantung pada sumber daya dan dukungan dari luar. Hal ini selanjutnya akan menghambat kemampuan mereka untuk merencanakan, mengambil tindakan, dan memecahkan masalah secara mandiri. Seiring berjalannya waktu, ketergantungan ini bisa mengurangi rasa tanggung jawab dan inisiatif masyarakat dalam mencapai perubahan positif.

Program pemberdayaan yang efektif harus berfokus pada membangun kapasitas masyarakat, memberikan pelatihan dan pendidikan, serta mendorong partisipasi aktif. Program tersebut seharusnya bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang diperlukan agar masyarakat dapat secara mandiri mengatasi tantangan dan meraih peluang yang ada. Sehingga pihak ketiga hanya berperan di awal program saja, tidak terus menerus.

Selain itu, penting untuk merancang program pemberdayaan dengan strategi yang dapat membuat masyarakat secara bertahap mengambil alih kepemilikan dan pengelolaan program itu sendiri. Ini dapat melibatkan pembentukan kelompok-kelompok mandiri, pengembangan model bisnis berkelanjutan, atau pengenalan sumber daya lokal yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan demikian, program pemberdayaan yang berhasil harus memprioritaskan aspek berkelanjutan dan pengurangan ketergantungan, sehingga masyarakat dapat menjadi subjek yang lebih aktif dan mandiri dalam upaya perubahan mereka sendiri. Hal ini memungkinkan pencapaian keberhasilan jangka panjang yang berkelanjutan dalam pemberdayaan masyarakat.

Bab 11 | Aktor dan Peranan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Inisiasi program pemberdayaan masyarakat dapat berasal dari mana saja, baik pemerintah, organisasi non pemerintah, maupun masyarakat. Ketiga aktor utama pemberdayaan masyarakat ini diharapkan bekerja sama untuk bahu-membahu melaksanakan program pemberdayaan supaya tujuan pembangunan dapat tercapai. Setiap aktor memiliki peran masing-masing, yang akan diuraikan pada sub bab berikut.

11.1 Pemerintah

Peran pemerintah dalam program pemberdayaan terdiri dari tiga hal, yaitu sebagai perumus, pelaksana, dan evaluator program. Ketiga peran ini dapat dilaksanakan bersama-sama dalam satu level, ataupun dapat dilaksanakan terpisah. Misalnya, level pemerintahan yang lebih tinggi sebagai perumus dan atau evaluator kebijakan, sedangkan level pemerintahan yang lebih rendah sebagai pelaksana kebijakan.

1. Pemerintah sebagai Perumus Program Pemberdayaan

Pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung pemberdayaan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Kebijakan ini dapat mencakup perlindungan hak-hak individu, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, pelatihan keterampilan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif.

Dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan, pemerintah sebaiknya tidak hanya mengandalkan analisis situasi dari kondisi sosial politik ekonomi nasional semata. Ia juga perlu mempertimbangkan secara komprehensif situasi global, nasional, daerah dan lokal.

Di tingkat global dalam satu dekade terakhir misalnya, sejumlah guncangan ekonomi terjadi di tingkat internasional, seperti krisis keuangan global, perang dagang antara Amerika dan China, konflik Rusia-Ukraina, pandemi Covid-19, serta resesi ekonomi di tahun 2023. Semua ini telah memberikan dampak ekonomi yang dahsyat pada masyarakat Indonesia. Hal

tersebut kemudian memicu kenaikan angka kemiskinan serta pengangguran secara beruntun.

Selain peristiwa global, sejumlah kebijakan pemerintah di tanah air juga sempat menciptakan kesulitan ekonomi pada masyarakat, utamanya yang berkaitan dengan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada tahun 2005, terjadi kenaikan harga bahan bakar sebesar 128%, dan selanjutnya naik lagi sebesar 29% pada tahun 2008. Selain itu, pada tahun 2020-2022, terjadi pandemi Covid-19 yang diikuti pembatasan mobilisasi dan aktivitas masyarakat di luar rumah. Pada akhir tahun 2023, terjadi fenomena kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan, penundaan masa tanam pertanian, dan kelangkaan beberapa komoditas pangan.

Peristiwa tersebut di atas tentu saja telah berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat, namun hasilnya kadang kurang optimal. Sebagai perumus kebijakan, pemerintah perlu memetik pelajaran dari berbagai persoalan selama program dilaksanakan.

Sebagaimana diketahui, untuk membantu masyarakat menghadapi guncangan ekonomi yang terjadi, berbagai program perlindungan sosial telah dilaksanakan. Sayangnya, pemerintah cenderung hanya fokus memberikan Bantuan Langsung Tunai, tanpa memberikan program pendamping lain yang mengarah pada peningkatan kapasitas, dan manajemen keuangan (Sutiyo & Maharjan, 2011). Program yang sama juga dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021 ketika terjadi pandemi Covid-19 (Sutiyo, 2023). Namun, program ini gagal mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 dan tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh minimnya program peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk memberdayakan warga secara mandiri yang kemudian bisa berdampak pada tingkat daya tahan mereka dalam menghadapi krisis.

Dari gambaran situasi di atas, secara umum dalam merumuskan kebijakannya, pemerintah kadang abai untuk mempertimbangkan faktor pemenuhan kebutuhan jangka panjang. Bagi masyarakat, mendapatkan bantuan sosial ketika krisis memang membantu menyelesaikan masalah darurat yang sedang dihadapi. Namun, dalam jangka waktu yang lebih lama, kebijakan temporer ini belum bisa memberikan jawaban pengentasan masalah yang kelompok menengah ke bawah hadapi di masa-masa mendatang. Sehingga, kebijakan yang ada hanya mampu menjadi obat penenang sementara di masa sulit.

2. Pemerintah sebagai Pelaksana Program Pemberdayaan

Dalam program pemberdayaan, pemerintah kadang juga bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program melalui instansi yang relevan. Misalnya, program-program pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan pemerintah kabupaten. Dinas Koperasi dan UMKM secara langsung dapat melaksanakan penyediaan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, bantuan teknis, dan akses ke pasar.

Pemberdayaan bukanlah proses yang instan. Tahapan implementasi pemberdayaan oleh pemerintah idealnya dilaksanakan secara berkesinambungan. Jangan sampai euforia program hanya terlihat di awal, namun kemudian hari-hari berikutnya tidak dilakukan secara optimal.

Pemerintah sebagai pelaksana program pemberdayaan melaksanakan fungsi koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti sektor swasta, lembaga masyarakat sipil, dan organisasi internasional, untuk bekerja sama dalam program pemberdayaan. Kolaborasi ini penting untuk memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang berbeda-beda guna mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Meski terkesan sepele, koordinasi dan kolaborasi sangatlah berperan dalam keberhasilan program pemberdayaan. Seringkali ego sektoral dan kompleksnya permasalahan dalam birokrasi mengakibatkan koordinasi tidak berjalan optimal. Secara spesifiknya, terdapat lima alasan mengapa koordinasi dan kolaborasi pemerintah acap kali kurang optimal, yaitu:

a. Struktur pemerintahan yang kompleks

Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga desa. Struktur pemerintahan yang kompleks ini seringkali menyulitkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga dan tingkatan pemerintahan. Terdapat tantangan dalam menyatukan kepentingan, visi, dan rencana aksi antar instansi yang berbeda. Belum lagi, bila ada benturan kepentingan politik yang terjadi antara elit atau pejabat instansi. Akhirnya, integrasi dan tujuan akhir program pemberdayaan bisa dikorbankan untuk mengamankan kepentingan pribadi atau kelompok.

b. Fragmentasi kebijakan

Adanya fragmentasi kebijakan, di mana berbagai kementerian, lembaga, dan badan pemerintah memiliki wewenang dan kebijakan yang terpisah, juga dapat menghambat koordinasi dan kolaborasi.

Setiap kementerian atau lembaga mungkin memiliki fokus dan tujuan yang berbeda, sehingga terkadang sulit untuk mencapai keselarasan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Ketika memiliki kebijakan yang tujuannya hampir sama, ego sektoral lebih sering dipentingkan supaya nama lembaga atau pejabat yang berwenang lebih menonjol, dibandingkan harus berkolaborasi dengan instansi terkait.

c. Keterbatasan sumber daya

Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, juga dapat menjadi hambatan dalam koordinasi dan kolaborasi. Pemerintah seringkali mengalami keterbatasan anggaran dan personel yang menurunkan kemampuan mereka untuk melibatkan semua pihak yang relevan dan memastikan kolaborasi yang efektif dalam program pemberdayaan masyarakat.

d. Tantangan budaya dan *mindset*

Tantangan budaya dan *mindset* juga dapat menjadi hambatan dalam kolaborasi dan koordinasi program pemberdayaan. Budaya hierarkis dan ketergantungan pada pemerintah pusat masih tinggi meski Indonesia telah menerapkan desentralisasi. Faktor ini tidak dapat dipungkiri akhirnya menghambat komunikasi dan kolaborasi antar instansi. Selain itu, adanya kepentingan politik dan kekuasaan yang beragam juga dapat berpengaruh buruk. Dalam mengatasi hambatan yang ada, pemimpin yang berintegritas, handal dan visioner akan menjadi kunci utama.

Berbagai penelitian menemukan bahwa tatanan kelembagaan masyarakat pedesaan sangat mengandalkan faktor kepemimpinan (Sutiyo & Maharjan, 2014; Sutiyo & Maharjan, 2017b). Pemimpin adalah pemilik otoritas terbesar dan sumber utama berbagai keputusan penting pemerintahan setempat. Faktor dominasi kepemimpinan dengan sendirinya memberikan peluang maupun tantangan bagi proses pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan riset yang ditulis oleh von Luebke (2009), keberhasilan sejumlah daerah dalam memajukan program pembangunan dan pemberdayaannya ternyata dipengaruhi oleh sosok pemimpin lokal. Temuannya secara rinci mengungkapkan bahwa variasi keberhasilan ekonomi di tingkat lokal sejatinya mencerminkan interaksi antara norma-norma demokratis dan non-demokratis, yang diwarnai dengan adanya pemilihan bebas dan praktik patronase.

Penelitian von Luebke (2009) menemukan bahwa tekanan sosial dari perusahaan lokal, asosiasi bisnis, dan anggota dewan memiliki pengaruh yang kurang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan. Bisnis lokal seringkali merasa bahwa biaya yang dikeluarkan untuk terlibat dalam upaya reformasi melebihi manfaat yang mereka akan peroleh, sehingga partisipasi mereka cenderung terbatas. Baik kamar dagang lokal maupun dewan di tingkat daerah belum berhasil menangani masalah ini dengan efektif.

Para pemimpin pemerintah setempat adalah aktor yang paling termotivasi dan mendapat insentif yang lebih besar untuk melakukan reformasi kebijakan. Mereka menyadari bahwa reformasi tersebut berguna untuk menarik dukungan pemilih serta mendapat pengakuan nasional dan pendanaan dari donor. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan prospek karier mereka ke depan, apalagi jika mereka akan mencalonkan diri kembali pada periode selanjutnya (von Luebke, 2009).

e. Kurangnya keterampilan dan kapasitas

Tidak semua pejabat pemerintah memiliki keterampilan dan kapasitas yang memadai dalam koordinasi dan kolaborasi. Keterampilan manajerial, komunikasi, negosiasi, dan kepemimpinan yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang efektif mungkin kurang dikembangkan atau tidak dimiliki sepenuhnya oleh beberapa aktor pemerintah.

f. Pendanaan dan anggaran

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan dana dan sumber daya yang cukup untuk mendukung program-program pemberdayaan. Ini melibatkan perencanaan anggaran yang memadai dan pengalokasian dana yang tepat untuk sektor-sektor yang membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur. Sayangnya, pemerintah sering kekurangan anggaran dan mengalokasikan dana tidak berdasarkan skala prioritas.

g. Advokasi dan konsultasi

Pemerintah dapat berperan sebagai advokat dan pelindung kepentingan masyarakat yang rentan dan terpinggirkan. Pemerintah idealnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik dan partisipasi aktif, sehingga kebijakan dan

program yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun, hal ini terkendala oleh pemimpin yang cenderung mengedepankan suara mayoritas untuk memenangkan Pemilu. Sistem pemilu yang mengunggulkan voting terbanyak membuat pejabat yang berkuasa cenderung pragmatis dalam melihat hak-hak minoritas (Hänni 2017). Penguasa yang mengabaikan preferensi minoritas akan menurunkan responsivitas terhadap persoalan kaum minoritas.

3. Pemerintah sebagai Evaluator Program Pemberdayaan

Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program-program pemberdayaan yang dijalankan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dan evaluasi juga membantu mengidentifikasi kekurangan dan peluang perbaikan dalam implementasi program.

Evaluasi yang komprehensif diperlukan supaya program pemberdayaan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat yang dilayani. Evaluasi dalam program pemberdayaan masyarakat idealnya melibatkan beberapa aspek, sebagai berikut:

- a. Ketercapaian tujuan
Evaluasi harus memeriksa apakah program telah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- b. Tingkat partisipasi
Keterlibatan masyarakat perlu dinilai, termasuk jumlah peserta, tingkat kehadiran, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan program.
- c. Perbaikan kesejahteraan
Evaluasi harus mampu mengukur dampak program terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti peningkatan pendapatan atau penurunan tingkat kemiskinan.
- d. Peningkatan kapasitas
Evaluasi harus mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, melihat keberlanjutan program, menilai efisiensi dan efektivitas program, serta mengevaluasi pengembangan kapasitas masyarakat dan mendapatkan umpan balik dari peserta program.

e. Faktor kontekstual

Evaluasi harus mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan hasil program, seperti faktor budaya, sosial, politik, dan ekonomi.

11.2 Organisasi Non Pemerintah

Peran Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam program pemberdayaan masyarakat meliputi banyak aspek, dari perumusan program hingga evaluasi dan pengendalian. Dalam pendekatan dan strategi yang diterapkan, banyak LSM mendorong modal sosial dengan bekerja sama dengan individu dan komunitas dalam memberikan dukungan pembangunan kapasitas.

Di Indonesia, Sasongko dan Wahyuni (2013) menemukan bahwa praktik komunikasi dan berbagi pengetahuan warga perantauan Madura dapat memperkuat keterhubungan di antara mereka untuk kemudian menciptakan rantai pasokan warung kelontong yang buka 24 jam. Modal sosial seperti inilah yang diidentifikasi dan dimanfaatkan oleh LSM untuk diintegrasikan dengan program pemberdayaan yang mereka tawarkan.

Dalam kasus lainnya, LSM tidak hanya sebatas menjadi organisasi penyalur bantuan, tapi mereka juga melaksanakan transfer pengetahuan, menjalin kemitraan dengan pemerintah, melakukan rencana partisipatif, dan juga memperkuat lingkaran komunitas lokal yang ada (Sitanggang, Harahap, & Kadir 2021). Contoh dari kegiatan penguatan Kelompok Petani di Desa Sinambela, Kabupaten Humbang Hasundutan menunjukkan bahwa LSM memainkan peranan penting dalam memperkuat organisasi dan administrasi kelompok petani di Desa Sinambela, Provinsi Sumatera Utara.

Selain relasi baik antara LSM dan komunitas lokal, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat juga tak terlepas dari desentralisasi dan sistem manajemen otonom. Islam (2014) memberikan contoh bagaimana LSM dalam sejumlah kasus pemberdayaan telah membantu masyarakat dengan menginisiasi terbentuknya modal sosial melalui pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro, meski terkesan sepele, nyatanya banyak digunakan target penerima program pemberdayaan sebagai kesempatan untuk membangun jaringan yang baik di antara anggota kelompok, yang selanjutnya mereka gunakan jaringan tersebut untuk mengembangkan bisnis.

Inisiatif tadi bahkan tidak hanya terbatas pada kaum laki-laki saja. Para perempuan dengan modal sosial yang solid juga mendapat kesempatan untuk

dapat duduk bersama dan membahas masalah mereka. Melalui ruang yang diciptakan bersama dengan warga lokal, LSM membantu kelompok perempuan untuk dapat berbagi pengetahuan, yang berefek pada terbangunnya kepercayaan dan solidaritas tinggi antar sesama mereka (Islam 2014).

11.3 Masyarakat

Satu hal yang sering dilupakan pihak ketiga dalam melaksanakan program pemberdayaan adalah posisi masyarakat itu sendiri. Masyarakat penerima program sering dianggap sebagai pihak pasif yang tak perlu didengarkan suaranya. Target penerima program sering diacuhkan karena persoalan kelas, ekonomi, dan tingkat pendidikan. Padahal, jika melihat esensi dari program pemberdayaan, sesungguhnya merekalah yang seharusnya menjadi aktor utama.

Lantas, mengapa masyarakat kerap dipinggirkan dalam implementasi program? Alasan klasiknya adalah persoalan sistem birokrasi sentralistik yang masih diterapkan oleh pihak pengelola program. Di saat yang sama, sumber daya lokal tidak dipertimbangkan dalam merancang program. Hal ini kemudian berujung pada kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan (Soetomo, 2006).

Saat ini masih ditemukan program pemberdayaan yang ingin menyeragamkan implementasi tanpa mempertimbangkan lokalitas dan budaya setempat. Latar belakang tersebut, tentu akan semakin menjauhkan warga dari partisipasi penuh (Adamson & Bromiley, 2013). Sebab, warga merasa bahwa mereka hanya dijadikan objek semata. Pada akhirnya jika pola yang sama diterapkan dalam program pemberdayaan, warga akan melihat bahwa diri mereka sebagai penerima bantuan semata.

Peran warga sangat penting dalam program pemberdayaan masyarakat karena mereka adalah pemangku kepentingan dan penerima manfaat utama. Keterlibatan, komitmen, dan kolaborasi mereka dapat berkontribusi pada keberhasilan dan keberlanjutan program pemberdayaan. Secara rinci, berikut beberapa peran utama warga dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Partisipasi aktif dan pengambilan keputusan

Warga harus berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Masukan mereka membantu memastikan bahwa inisiatif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Partisipasi mereka juga tidak harus selalu dihitung melalui kehadiran fisik dalam acara formal saja, tapi juga bisa melalui platform informal

seperti acara hajatan, ronda, penyampaian pendapat melalui media sosial, dan sebagainya. Ketika akan mengambil keputusan, pimpinan setempat dan pengelola program harus menjelaskan bagaimana mekanisme terbaik. Opsi yang bisa dipilih adalah melalui musyawarah mufakat atau diserahkan pada kepala desa bersama dengan lembaga perwakilan yang ada. Keputusan yang diambil harus diumumkan kepada publik secara transparan.

2. Pengembangan kapasitas

Warga dapat mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas seperti pelatihan, lokakarya, dan program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan mereka dalam mengatasi persoalan. Dalam konteks pengembangan kapasitas, harapannya pengelola program juga memperhatikan tingkat keberlanjutan. Ketika program pemberdayaan telah selesai, masyarakat dapat dilatih supaya dapat meneruskan kegiatan secara mandiri meski pihak donor atau pemberi program telah selesai dengan proyek mereka. Dalam hal ini, penting bagi donor untuk mempertimbangkan unsur sumber daya lokal dalam implementasi agar memudahkan kelangsungan program.

3. Kolaborasi

Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan, warga harus berkolaborasi dengan anggota masyarakat lainnya, kelompok, dan institusi untuk mencapai tujuan bersama. Mereka perlu membangun hubungan dan jaringan yang kuat yang dapat mendorong rasa persatuan dan dukungan timbal balik.

4. Advokasi.

Warga dapat mengadvokasi hak, kebutuhan, dan kepentingan mereka, serta kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat. Ini termasuk meningkatkan kesadaran, terlibat dalam dialog, dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Dalam proses ini, pimpinan di tingkat lokal atau penyalur program juga harus bersikap terbuka. Keterbukaan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di lapangan. Sebab, seringkali advokasi yang masyarakat lakukan justru dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau sikap kurang bersyukur terhadap apa yang telah diberikan pemerintah. Padahal advokasi adalah cara masyarakat untuk dapat mengakses dan memenuhi hak-hak dasar mereka.

5. Pemantauan dan evaluasi

Warga dapat berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan. Meski pemantauan dan evaluasi ini esensial, masyarakat kerap lupa untuk melakukannya karena menganggap program telah selesai. Jika ini dianggap lumrah, akhirnya tiap program pemberdayaan tidak mendapat evaluasi kritis dari penerima program. Konsekuensinya adalah pemerintah dan pihak donor selalu melakukan kesalahan yang sama dalam tahap implementasi karena menganggap mereka telah bekerja dengan maksimal.

6. Berbagi pengetahuan dan pengalaman

Warga dapat berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka dengan orang lain di masyarakat, mendorong budaya belajar dan dukungan timbal balik. Hubungan mutualisme warga dalam beberapa kondisi tidak dapat muncul dalam sendirinya. Oleh karena itu, pihak pengelola program harus berinisiatif untuk mendorong penerima program pemberdayaan untuk tidak bersikap egois. Jika perlu, mereka harus memberikan contoh dan memperlihatkan praktik baiknya supaya masyarakat dapat melakukan hal yang sama.

7. Menjadi teladan

Dengan mencontohkan perilaku, nilai, dan sikap positif, seorang warga dapat menginspirasi orang lain dan berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang berdaya dan tangguh. Dalam menginternalisasi peran ini, pengelola program pemberdayaan perlu menekan bahwa tiap individu bisa menjadi teladan. Tidak harus menunggu menjadi pemimpin dulu, sehingga masyarakat akan memiliki inisiatif untuk menginspirasi orang lain di sekitar mereka.

Bab 12 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pada berbagai bidang penghidupan. Masing-masing memiliki penekanan sendiri sesuai dengan akar masalah dan karakteristik kelompok sasaran. Berbagai bidang yang perlu dijadikan prioritas dalam program pemberdayaan di Indonesia antara lain adalah bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang lingkungan hidup.

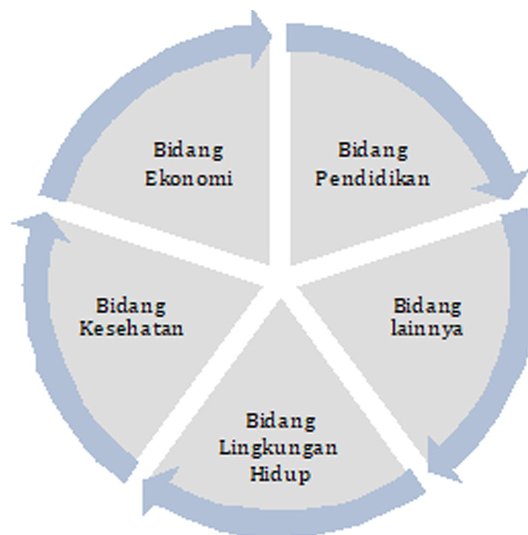


Figure 12.1 Bidang Prioritas dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia

12.1 Bidang Ekonomi

Jika melihat sasaran dan prioritas program pemberdayaan masyarakat, salah satu bidang yang banyak mendapatkan perhatian adalah bidang ekonomi. Pemberdayaan bidang ekonomi bagi masyarakat memiliki tujuan yang penting dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi mereka. Salah satu adalah mengurangi kemiskinan dengan memberikan kesempatan

kepada masyarakat untuk mengembangkan keterampilan, akses keuangan, dan peluang usaha. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi, mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka sendiri dan mengurangi tingkat kemiskinan di dalam komunitas.

Pemberdayaan di bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mencari pendapatan. Masyarakat didorong untuk mengelola sumber daya mereka sendiri, mengembangkan usaha, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, mereka menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka tanpa harus tergantung pada bantuan eksternal.

Pemberdayaan ekonomi juga penting dalam meratakan kesempatan di antara anggota masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi, setiap individu, terutama yang marginal dan rentan, memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses sumber daya dan peluang ekonomi. Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan inklusi ekonomi di dalam masyarakat.

Pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi, masyarakat menjadi kontributor yang aktif dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah serta ketersediaan lapangan kerja lokal dapat mendorong kegiatan ekonomi, investasi, dan peningkatan pendapatan secara menyeluruh.

Pemberdayaan ekonomi juga membantu mengembangkan potensi lokal yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat didorong untuk mengenali dan mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti sumber daya alam, keterampilan tradisional, atau pariwisata. Hal ini berdampak positif pada pembangunan lokal, pelestarian budaya, dan pengembangan komunitas.

Terakhir, pemberdayaan ekonomi berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik ke pangan, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Hal ini secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, pemberdayaan ekonomi dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih kuat, berkelanjutan, dan adil secara ekonomi. Pencapaian ini bahkan sudah diraih oleh sejumlah masyarakat penerima program pemberdayaan.

12.2 Best Practices Pemberdayaan di Bidang Ekonomi

Salah satu contoh pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dilaksanakan di Desa Wajak Lor, Tulungagung, Jawa Timur. Mereka tiap bulan telah berhasil melakukan ekspor ikan mas koki sejumlah 40.000 ekor. Meski jumlah tersebut terkesan cukup besar, angka tadi belum memenuhi permintaan pasar yang mencapai dua kali lipat dari hasil mereka. Oleh karenanya, kini pemerintah dan sejumlah pihak sedang mengupayakan untuk melakukan program yang sama di desa-desa sekitar untuk kemudian dapat memenuhi permintaan ekspor.

Tidak hanya di Desa Wajak Lor saja yang berhasil mencicipi profit dari pemberdayaan bersumber daya lokal, di Desa Boyolangu, pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan hias juga membuahkan hasil yang cukup besar.

Merujuk pada hasil riset Rosajenar (2022), pemberdayaan ekonomi pada dua kelompok masyarakat tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta berdaya guna karena mereka menerapkan sejumlah landasan penting dalam implementasinya, yaitu:

1. Pengetahuan dan keterampilan

Peserta program telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang memadai untuk memahami teknik budidaya, manajemen kolam, perawatan ikan, dan pemilihan bibit yang baik. Pengetahuan yang dibagikan oleh pendamping program akhirnya membantu peserta dalam mengelola usaha budidaya ikan mas koki dengan optimal.

2. Akses ke pasar

Program budidaya terbantu oleh jajaran pemerintah dan pihak swasta yang bahu-membahu dengan peserta program dalam menjalin hubungan dengan pedagang ikan lokal serta saluran distribusi yang relevan. Ditambah pula dengan dibukakannya akses ke pasar ekspor oleh pemerintah daerah dan pihak swasta setempat. Melalui akses pasar yang baik, peserta program dapat memasarkan produk budidaya ikan mas koki mereka dengan lebih efektif dan meningkatkan peluang penjualan.

3. Kualitas produk

Peserta program selama pelatihan ditekankan untuk memahami pentingnya menjaga kualitas ikan mas koki yang dihasilkan. Hal ini mencakup aspek seperti warna yang menarik, bentuk yang indah, dan ukuran yang

sesuai dengan permintaan pasar. Kualitas produk yang baik akan memberikan keunggulan kompetitif dan mendukung keberlanjutan usaha peserta program. Dengan mengikuti skema yang ditetapkan, para pelaku budidaya akhirnya mampu menghasilkan ikan mas koki yang kualitasnya bahkan mencapai level internasional.

4. Kolaborasi

Pemberdayaan masyarakat dalam budidaya ikan mas koki juga telah mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar peserta program. Dengan membangun jaringan dan kerja sama di antara para pelaku usaha, mereka dapat saling mendukung, berbagi pengalaman, dan memperluas peluang pasar.

5. Manajemen

Efisiensi manajemen menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Peserta program diberikan pemahaman tentang manajemen kolam, pemeliharaan ikan, dan pengendalian kualitas air dan pakan yang tepat. Dengan manajemen yang baik, peserta program kemudian dapat mengoptimalkan produksi ikan mas koki, mengurangi risiko kerugian, dan mencapai keberlanjutan usaha mereka.

Dengan memperhatikan semua aspek-aspek tadi, program pemberdayaan ekonomi pada budidaya ikan mas koki telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pembangunan lokal. Peserta program juga mampu mengelola usaha dengan baik, memasarkan produk dengan efektif, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di daerah mereka.

12.3 Bidang Pendidikan

Persoalan pendidikan dan keterampilan juga menjadi bidang prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ideal di bidang pendidikan sendiri harusnya mencakup berbagai aspek yang membantu meningkatkan akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan bagi semua anggota masyarakat.

Sejumlah elemen dapat membentuk program pemberdayaan masyarakat yang ideal di bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut.

1. Akses pendidikan yang inklusif
Program yang ideal akan memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, atau latar belakang budaya, memiliki akses yang sama ke pendidikan berkualitas.
2. Infrastruktur pendidikan yang baik
Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti sekolah, perpustakaan, dan laboratorium, perlu menjadi prioritas dalam mewujudkan program pemberdayaan masyarakat yang ideal.
3. Kurikulum yang relevan dan kontekstual
Program pendidikan yang ideal akan menyediakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata.
4. Tenaga pendidik yang profesional
Tidak hanya peserta program yang wajib disiapkan, pengembangan kapasitas guru juga perlu ditekankan. Pelatihan berkala dan pengembangan profesional bagi guru akan menjadi komponen penting untuk memastikan kualitas pengajaran yang tinggi dan memotivasi guru untuk terus belajar dan berkembang.
5. Pendidikan berbasis masyarakat
Program yang ideal akan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak mereka.

12.4 Best Practices Pemberdayaan di Bidang Pendidikan

Praktik baik dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan telah diterapkan oleh sejumlah komunitas masyarakat, salah satunya adalah Yayasan Peduli Kasih. Yayasan ini bergerak untuk membantu memberdayakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) supaya dapat memaksimalkan potensi diri. Dalam kesehariannya, Yayasan Peduli Kasih ABK juga memberikan layanan dan kegiatan yang dapat membantu keluarga dengan anak berkebutuhan khusus, masyarakat, dan fasilitas kesehatan untuk optimalisasi deteksi dini serta penanganan dasar bagi ABK. Mereka juga melakukan pengembangan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak berkebutuhan khusus di wilayah Kecamatan Mulyorejo Surabaya (Pairan & Abdullah 2021).

Dalam praktiknya, Yayasan melakukan berbagai kegiatan untuk mengoptimalkan kapasitas ABK, di antaranya yaitu: diskusi kelompok, partisipasi ABK dan keluarga, sosialisasi, penilaian, konseling, pelatihan untuk tenaga kesehatan, bantuan bakat untuk anak-anak dan orang tua. Dari apa yang telah dilakukan yayasan, bisa disimpulkan bahwa mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan prinsip-prinsip pendidikan yang inklusif dan setara.

12.5 Bidang Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan paling tidak memiliki tiga tujuan utama. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan menerapkan perilaku hidup sehat melalui edukasi dan kampanye kesehatan. Kedua, mewujudkan akses yang merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Ketiga, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola kesehatan mereka sendiri.

Pemberdayaan di bidang ini perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait layanan kesehatan dan berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program kesehatan. Untuk mencapai tujuan utama pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, prinsip utama yang perlu ditekankan adalah masyarakat dapat menjadi lebih sadar akan kesehatan, memiliki akses yang merata terhadap layanan kesehatan, dan menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup mereka sendiri.

Membentuk kesadaran tinggi akan kesehatan tidaklah mudah. Sulitnya menyadarkan masyarakat tentang kesehatan disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi, antara lain sebagai berikut.

1. Kurangnya pengetahuan

Banyak orang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang kesehatan dan tidak menyadari betapa pentingnya menjaga gaya hidup sehat. Kekurangan pengetahuan tentang risiko penyakit dan konsekuensi dari kebiasaan tidak sehat membuat sulit bagi mereka untuk memahami dan menghargai pentingnya kesehatan.

2. Adanya mitos dan keyakinan yang salah

Beberapa orang mungkin memegang keyakinan yang keliru, seperti anggapan bahwa sakit adalah takdir atau mitos tentang pengobatan alami yang

dianggap dapat menyembuhkan segala penyakit tanpa perlunya perawatan medis yang sesuai. Di sejumlah daerah, praktik dokter dianggap kurang holistik, sehingga masyarakat terkadang jauh lebih mempercayai tabib atau dukun setempat dengan pendekatan tradisional. Belum lagi, akses yang jauh dari daerah tempat tinggal warga, sehingga pengobatan modern akhirnya melahirkan stigma mahal dan tidak sebanding dengan upaya mengakses layanan yang disediakan.

3. Kompleksitas informasi

Dalam era informasi yang begitu luas, masyarakat seringkali kesulitan memahami dan menyaring informasi yang benar dan dapat dipercaya. Terkadang, adanya informasi yang bertentangan atau membingungkan membuat orang ragu-ragu atau bahkan mengabaikan saran kesehatan yang penting. Apalagi kini mudah sekali ditemukan informasi kesehatan melalui media sosial yang validitasnya belum terbukti, namun karena bahasanya yang bombastis, akhirnya warga sontak membagikannya ke berbagai platform. Akibatnya, sesuatu hal yang tersebar luas meski kebenarannya belum terbukti, malah menjadi hal yang diyakini benar adanya.

4. Aspek budaya dan lingkungan

Beberapa kelompok masyarakat mungkin memiliki kebiasaan dan pola pikir yang sulit diubah karena faktor budaya, tradisi, atau lingkungan sosial yang mempengaruhi mereka. Kondisi ini semakin sulit diubah ketika ketidaktahuan tentang dampak jangka panjang juga menjadi kendala. Beberapa orang mungkin tidak menyadari dampak negatif dari kebiasaan tidak sehat secara langsung atau tidak menyadari risiko yang akan dihadapi di masa depan. Hal ini membuat mereka kurang termotivasi untuk mengubah perilaku mereka.

5. Motivasi yang rendah

Mengubah perilaku dan mengadopsi gaya hidup sehat membutuhkan motivasi yang kuat dan kesadaran akan manfaat jangka panjang. Namun, banyak orang merasa terbebani oleh tekanan sehari-hari dan kurang memiliki motivasi yang cukup untuk mengubah kebiasaan yang sudah mapan.

Contoh nyata terkait gaya hidup modern yang tidak sehat adalah tren makanan instan yang kian mendominasi kehidupan masyarakat sehari-hari. Makanan instan ini dipilih karena dari segi rasa, kepraktisan, harga, dan durasi simpan jauh lebih unggul dibandingkan makanan segar yang diolah secara rumahan. Namun, perlu dicatat segala kelebihan tadi menyimpan sisi negatif

yang perlu diwaspadai. Sejumlah riset membuktikan bahwa makanan instan yang melalui pemrosesan berlapis membuat tingkat gizinya semakin rendah dan bahkan hilang sama sekali (Marti 2019; Rohrmann & Linseisen 2016). Bahkan, jika dikonsumsi berlebihan makanan jenis ini akan menimbulkan risiko kanker hingga kelainan jantung (Srouf *et al.* 2019).

6. Tantangan dari aspek sosial dan ekonomi

Faktor seperti akses terbatas ke fasilitas kesehatan, keterbatasan sumber daya, dan tekanan sosial dapat menjadi hambatan bagi individu untuk mengadopsi gaya hidup sehat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, pendidik, dan masyarakat umum. Informasi yang akurat, terjangkau, dan mudah dimengerti tentang pentingnya kesehatan perlu disediakan. Pendekatan yang sensitif terhadap aspek budaya dan sosial juga perlu diterapkan untuk mencapai kesadaran yang lebih baik dalam masyarakat.

Dalam banyak kasus, ahli kesehatan seperti dokter, bidan, dan perawat, kerap menggunakan strategi yang salah dalam menyampaikan pesan penting terkait pemberdayaan masyarakat. Seperti contohnya ketika viral persoalan memberikan bekal anak dengan nasi serta mie instan di media sosial. Ketidaktahuan orang tua terkait efek negatif karbohidrat berlebih dan persoalan kepraktisan, ditanggapi dengan nada menghakimi oleh seorang tenaga medis. Alih-alih mencari akar permasalahan dan memberikan saran yang bijak, ia justru menuduh orang tua anak tersebut tidak mempertimbangkan faktor gizi dalam menyiapkan asupan kepada generasi penerusnya. Alhasil, tujuan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu menggerakkan publik agar lebih memprioritaskan asupan nutrisi akhirnya gagal. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa penyampaian pesan pemberdayaan perlu dilakukan dengan hati-hati. Perilaku masyarakat tidak bisa dilihat dari satu sisi. Pola sikap dan perilaku mereka dibentuk dari berbagai faktor: tingkat pendapatan, kelas, nilai-nilai budaya hingga agama. Seluruhnya terjalin kompleks yang berujung pada terbentuknya kebiasaan tertentu di kalangan masyarakat. Tanpa menyadari kompleksitas aspek tersebut, sosialisasi kesehatan yang dilakukan akhirnya hanya menjadi jargon semata.

Dengan kata lain, memahami perilaku masyarakat tidaklah sederhana. Ketika merencanakan upaya sosialisasi kesehatan, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana individu berada. Tingkat pendapatan dan kelas sosial dapat mempengaruhi akses mereka terhadap

informasi dan sumber daya kesehatan. Nilai-nilai budaya dan keyakinan agama juga berperan dalam membentuk kebiasaan masyarakat terkait kesehatan. Tanpa memperhatikan faktor-faktor ini, upaya sosialisasi kesehatan tidak dapat mencapai tujuan awal dengan maksimal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan yang holistik dan mempertimbangkan kerumitan aspek-aspek ini dalam merancang program sosialisasi kesehatan yang efektif dan relevan bagi masyarakat.

12.6 Best Practices Pemberdayaan di Bidang Kesehatan

Dalam beberapa kasus seperti ketika terjadi pandemi pada awal tahun 2020 lalu, sejumlah pihak di beberapa daerah di Indonesia telah dapat menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan di bidang kesehatan. Contohnya terjadi ketika masa pandemi lalu di Surakarta, Jawa Tengah. Walaupun dihadapkan pada situasi yang sangat kompleks dan mendesak, pemerintah setempat mampu melaksanakan prinsip-prinsip pemberdayaan kesehatan dengan baik. Mereka mengambil tindakan cepat dan efektif dalam mengatur strategi kesehatan masyarakat, seperti meningkatkan akses terhadap informasi kesehatan yang akurat, mendirikan posko-posko kesehatan, dan melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam pengendalian penyebaran virus. Selain itu, Surakarta juga melibatkan komunitas lokal, organisasi sukarela, dan tokoh masyarakat untuk bekerja sama dalam kampanye kesehatan dan memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat terpenuhi. Tindakan pemberdayaan kesehatan yang dilakukan Surakarta ini membuktikan bahwa meskipun situasi kompleks, dengan pendekatan yang tepat dan kolaboratif, masyarakat dapat diberdayakan untuk menghadapi tantangan kesehatan yang besar.

Dengan menerapkan “jogo tonggo” yang bermakna harfiah “jaga tetangga”, para warga dan pihak-pihak terkait saling membantu untuk melindungi mereka dari virus Covid-19. Ketika ada warga yang positif, akan segera dipanggilkan ambulans. Anggota keluarga lain yang tidak terjangkit virus tetap diminta berada di rumah. Selama masa isolasi, mereka mendapatkan donasi hasil bantuan warga. Semua koordinasi dilakukan melalui WhatsApp, baik itu di tingkat Rukun Tetangga maupun Rukun Warga. Melalui jalur koordinasi yang sederhana, masyarakat dengan mudah bekerja sama dan bahu-membahu menekan penyebaran virus. Efek positifnya, angka kematian dan kasus Covid-19 di sana dapat ditekan secara cepat (Pranasta 2022).

12.7 Bidang Lingkungan Hidup

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang lingkungan hidup telah menjadi isu yang semakin mendesak dan penting saat ini. Lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan menjadi kunci kesuksesan. Meski dampaknya sangat signifikan, pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup menghadapi sejumlah tantangan yang membuat implementasinya sulit dilakukan.

Pertama, kesadaran dan pemahaman yang rendah tentang isu lingkungan serta keberlanjutan menjadi hambatan utama. Kurangnya pendidikan dan informasi yang memadai membuat masyarakat kurang akrab dengan pentingnya upaya pelestarian lingkungan. Kedua, terdapat kesenjangan pengetahuan antara para ahli lingkungan dan masyarakat umum. Informasi ilmiah dan teknis sulit diakses dan dipahami, sehingga komunikasi yang efektif dan pengambilan keputusan berbasis pengetahuan yang akurat menjadi sulit. Ketiga, keterbatasan sumber daya seperti dana, waktu, dan tenaga kerja juga mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang rentan atau tinggal di daerah terpencil mungkin mengalami kesulitan dalam berpartisipasi aktif dalam inisiatif lingkungan. Selanjutnya, perbedaan nilai dan minat di antara masyarakat juga dapat menghambat pemberdayaan. Konflik kepentingan ekonomi atau politik juga dapat menjadi kendala dalam mencapai konsensus dan mobilisasi partisipasi aktif masyarakat. Terakhir, keterbatasan kapasitas institusi pemerintah atau organisasi lingkungan juga dapat menghambat pemberdayaan masyarakat, karena mereka mungkin kesulitan memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan.

Dengan pendidikan, komunikasi efektif, dan partisipasi inklusif, upaya pemberdayaan masyarakat dalam lingkungan hidup dapat dilaksanakan guna menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Namun, perlu dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup adalah proses yang melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pelestarian, pengelolaan, dan perbaikan lingkungan serta sumber daya alam, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, sehat, dan tahan lama. Pendekatan ini mengakui dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan menciptakan rasa tanggung jawab dan kepemilikan atas sumber daya alam serta kesejahteraan lingkungan.

Kegagalan pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup sering disebabkan karena otoritas dan opini masyarakat tidak diakui. Terlebih, jika mereka merupakan suku asli yang dari segi pendidikan dan tingkat pendapatan jauh lebih rendah dibandingkan pihak berkepentingan lain seperti pemerintah dan pihak swasta. Oleh karena itu, diperlukan dialog intensif dengan anggota masyarakat untuk mengidentifikasi opsi kebijakan yang efektif. Hal ini akan mendorong komunitas di lingkungan sekitar untuk terlibat aktif dalam pengawasan jika ada proyek lingkungan yang dilakukan.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang telah dijalankan di Indonesia selama ini antara lain adalah penyuluhan dan edukasi lingkungan, pertanian berkelanjutan, dan konservasi alam. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan informasi, pelatihan, dan dukungan kepada masyarakat tentang isu-isu lingkungan, teknologi ramah lingkungan, dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kunci utama keberhasilan pemberdayaan bidang lingkungan hidup adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan pelestarian sumber air. Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam akan membuat mereka mendapatkan dukungan ekonomi dan sumber daya dalam melestarikan lingkungan hidup.

Prinsip lainnya yang tak kalah penting ialah kemitraan dan kolaborasi. Membangun kemitraan antara masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah perlu dilakukan untuk menciptakan sinergi pelestarian lingkungan. Dengan pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup, anggota masyarakat menjadi agen perubahan yang aktif dalam menjaga dan melindungi lingkungan, memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

12.8 Best Practices Pemberdayaan di Bidang Lingkungan Hidup

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam program, di mana mereka menjadi bagian penting dari solusi untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Sebab, pada akhirnya program bertujuan untuk membantu mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup.

Saat ini terdapat beberapa contoh program pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang dapat diadopsi, antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat bisa dikatakan sebagai program yang paling banyak diadopsi. Program yang melibatkan masyarakat dalam mengurangi, mengolah, dan mendaur ulang sampah ini digemari karena ongkosnya relatif rendah dan mudah dipraktikkan. Kegiatan pengelolaan sampah sendiri amatlah beragam. Contoh rincinya adalah sejumlah warga akan mendirikan bank sampah atau pusat daur ulang di tingkat komunitas, kemudian pihak dari pemerintah atau ahli lingkungan berperan untuk melatih anggota masyarakat dalam teknik komposting. Mereka juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi konsumsi plastik sekali pakai (Duadji *et al.* 2022; Dwi Purnomo *et al.* 2022; Nasirudin *et al.* 2014).

2. Reforestasi dan penghijauan

Kegiatan pemberdayaan lainnya dapat berbentuk reforestasi dan penghijauan. Program ini bertujuan untuk menciptakan kembali hutan dan area hijau dengan melibatkan masyarakat lokal dalam penanaman pohon dan kegiatan konservasi. Dalam program ini, masyarakat diajarkan tentang teknik penanaman yang benar dan pemeliharaan pohon. Pemberdayaan masyarakat terkait lahan hijau berkaitan erat dengan pelestarian sumber air. Sama halnya dengan reboisasi, program ini turut melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan sumber air, seperti sungai, danau, dan mata air. Kegiatan dilakukan dengan membersihkan sungai, penghijauan di sekitar sumber air, dan kampanye kesadaran tentang penggunaan air yang efisien dan ramah lingkungan.

3. Konservasi keanekaragaman hayati

Program ini melibatkan masyarakat dalam kegiatan konservasi flora dan fauna lokal serta melindungi habitat mereka. Contohnya termasuk program pengelolaan ekowisata, pelatihan masyarakat dalam teknik pemantauan keanekaragaman hayati, dan pendidikan tentang pentingnya konservasi bagi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

4. Pengelolaan energi terbarukan

Program ini melibatkan masyarakat dalam penggunaan dan pengelolaan energi terbarukan, seperti energi matahari, angin, dan biomassa. Misalnya,

pelatihan tentang instalasi dan pemeliharaan panel surya atau pembangkit listrik tenaga angin, dan dukungan dalam mengakses teknologi energi terbarukan yang terjangkau.

5. Pertanian berkelanjutan

Program ini melibatkan masyarakat dalam praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti pertanian organik, agroforestry, dan pertanian konservasi. Misalnya, pelatihan tentang teknik pertanian yang efisien, penggunaan pupuk organik, dan pengelolaan hama secara alami.

Bab 13 | Idealisasi Program Pemberdayaan Masyarakat

13.1 Tantangan

Hakikat pemberdayaan sejatinya menitikberatkan pada peningkatan kapasitas individu, keberfungsian kelompok, dan kesetaraan dalam masyarakat. Sayangnya, sampai saat ini masih terjadi kesenjangan antara teori dan implementasi program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah masih saja mengacu pada teori pembangunan model lama dengan gaya otoriter melalui penerapan program pemberdayaan yang hanya menekankan pada dimensi material dan ekonomi semata. Dimensi penting lain, seperti dimensi kelembagaan serta sosial masyarakat kerap dikesampingkan.

Analisis dari Lubis (2016) terhadap program pemberdayaan masyarakat, utamanya pada masa Orde Baru, memperlihatkan bahwa kapasitas masyarakat belum dapat berkembang dengan baik karena program pemberdayaan masih ditujukan sebagai alat mobilisasi politik, dan bukan untuk mencapai esensi utama pemberdayaan itu sendiri. Program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah lebih fokus pada *blueprint* dari pemerintah yang sifatnya satu arah, daripada mengakomodasi aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kultur yang heterogen. Konsekuensinya, kebijakan pemberdayaan menjadi tidak efektif karena kurang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat setempat.

Sependapat dengan Lubis, Mardikanto dan Soebiato (2019) menambahkan bahwa seringkali masyarakat di lapisan bawah dianggap tidak tahu apa yang mereka perlukan dan bagaimana memperbaiki nasibnya. Perspektif pemerintah mengenai warganya ini kemudian memunculkan stigma bahwa masyarakat, terutama di pedesaan bersifat malas dan bodoh. Dengan persepsi ini program-program pemberdayaan pemerintah lalu dirancang dengan melihat masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Contohnya adalah program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang tidak membuka ruang bagi masyarakat miskin untuk memilih sendiri pemanfaatan dana bantuan yang

mereka peroleh. Tanpa melihat kebutuhan masyarakat penerima, program IDT banyak yang salah alamat dan bahkan menimbulkan kerugian di masyarakat.

Masih berkaitan dengan persepsi keliru dalam memandang masyarakat, program pemerintah akhirnya menempatkan program pemberdayaan bukan sebagai upaya peningkatan kapasitas tetapi lebih kepada usaha sosial berbentuk pemberian bantuan yang hanya menyelesaikan masalah dalam jangka waktu pendek. Pijakan program pun kemudian bersifat sangat teknis dan mengesampingkan sisi-sisi sosial budaya dan potensi rakyat sebagai fondasi dasar pembangunan.

Bagi masyarakat yang bekerja pada sektor agraris, stigma buruk tersebut bertalian erat dengan prospek masa depan penghidupan mereka. Tak hanya dipandang tradisional dan kuno, sektor ini juga tidak pernah diperhitungkan dampak panjangnya. Pemerintah belum memberikan investasi yang cukup untuk membangun sektor ini di pedesaan dengan anggapan bahwa keuntungannya terbatas. Padahal jika mencermati negara-negara tetangga dengan sektor sama, jika manajemen programnya tepat dan berkesinambungan, investasi agraris di pedesaan dapat memberikan dampak positif skala besar. Keuntungannya antara lain, mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang ada di pedesaan, seperti yang dilakukan oleh Thailand, Taiwan, dan Jepang.

Selain problematika di atas, tantangan pemberdayaan masyarakat di Indonesia meliputi beberapa aspek lain yang kompleks, di antaranya yaitu ketimpangan ekonomi. Ini adalah salah satu tantangan utama, di mana kesenjangan pendapatan dan distribusi sumber daya tidak merata di antara masyarakat. Hal ini diperparah dengan akses terbatas ke pelayanan dasar seperti pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil, yang membuat upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan menjadi jauh lebih sulit. Selanjutnya, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka menghambat partisipasi aktif dan efektif dalam upaya pemberdayaan. Belum lagi, masalah lingkungan seperti deforestasi dan polusi mengancam kesejahteraan masyarakat serta menghambat upaya pemberdayaan demi kepentingan industri. Terakhir, ketidakhadiran infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi yang memadai membatasi peluang ekonomi dan akses ke layanan dasar.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut di atas, tentu mengandalkan masyarakat saja tidak akan cukup. Diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk membangun fondasi yang kuat bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

13.2 Peluang

Tujuan pemberdayaan yang diuraikan pada sub bab sebelumnya tentu tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Dalam banyak kasus, hasil pemberdayaan diperoleh secara bertahap dan bahkan capaiannya baru akan terlihat setelah beberapa tahun. Hal ini seringkali membuat pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat tidak sabar dan kerap kali salah mengukur pencapaian tujuan. Dalam implementasi program, alih-alih melihat pemberdayaan sebagai proses, pemerintah justru memilih cara instan dengan hanya merancang program pemberdayaan sebagai pemberian bantuan pemerintah semata.

Penerapan strategi keliru dalam mengeksekusi program pemberdayaan ini akhirnya dalam jangka panjang membentuk sikap ketidakberdayaan lain, yakni masyarakat melihat program pemberdayaan hanya sebagai program pembagian donasi. Padahal harapan dari pemberdayaan sesungguhnya adalah membantu kelompok rentan dan lemah sehingga mereka dapat memiliki kekuatan dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Lebih lanjut, ketika hal-hal pokok sudah terpenuhi, mereka kemudian akan dapat mencapai kebebasan (*freedom*) dari segala aspek: bebas dari kemiskinan, kebodohan, hingga kesakitan. Sehingga, kebebasan dalam rangka pemberdayaan masyarakat bukan sebatas bebas berbicara. Esensi sesungguhnya adalah bebas dari lingkaran setan kemiskinan yang menjerat mereka.

Selain kriteria terpenuhinya kesejahteraan dasar tadi, pemberdayaan yang berhasil juga bisa diukur dari peningkatan akses kelompok rentan untuk menjangkau fasilitas dasar, pelayanan publik, dan sumber-sumber daya lain yang membantu mereka untuk meningkatkan pendapatan agar taraf hidup mereka dapat lebih baik. Dalam peningkatan akses, pihak ketiga seperti pemerintah dan LSM dapat berperan besar. Ketika pemberdayaan dilaksanakan, masyarakat rentan diberikan pengetahuan dan informasi memadai tentang bagaimana mereka dapat memaksimalkan potensi dan partisipasi mereka. Namun, peningkatan kapasitas ini tentu bukan mengacu pada proses satu arah. Proses pemberdayaan yang ideal merupakan proses kesalingan atau

timbang balik di antara dua pihak untuk merumuskan solusi terbaik dengan bersandar pada perspektif masyarakat sebagai subjek program.

Melihat karakteristik Indonesia yang religius atau menempatkan agama sebagai landasan penting dalam hidup, seluruh prioritas pemberdayaan masyarakat baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan bisa mempertimbangkan nilai-nilai agama selain juga budaya setempat. Dengan fondasi ini, diharapkan program pemberdayaan yang ada lebih relevan konteksnya dengan kondisi sosial masyarakat. Sehingga, program pemberdayaan jauh lebih diterima dan harapannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.

Selain mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai kultural yang dianut oleh masyarakat, program-program pemberdayaan masyarakat di Indonesia memiliki peluang yang signifikan untuk menciptakan perubahan positif ketika dirancang dengan memberikan akses terhadap pelayanan dasar atau membantu mereka menciptakan modal terlebih dahulu. Secara rinci, peluang pertama yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dan pihak donor yaitu melakukan pengembangan kewirausahaan dan pelatihan keterampilan yang dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan memberikan akses ke pelatihan, pendanaan, dan jaringan bisnis, program-program ini dapat membantu masyarakat memperluas mata pencaharian, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Peluang kedua yang dapat dilakukan yaitu penguatan pendidikan inklusif dan berkualitas. Hal ini merupakan peluang penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan akses dan mutu pendidikan di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil. Program sejenis dapat memberikan landasan yang kuat bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, penguatan pendidikan akan dapat mempromosikan kesetaraan gender, mengurangi anak putus sekolah, dan menurunkan kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Pemberdayaan akan lebih maksimal jika program-program tersebut mendorong keterlibatan aktif dan efektif masyarakat. Oleh karenanya forum kemasyarakatan perlu rutin diselenggarakan. Bentuk acaranya tidak harus formal dengan mengundang perwakilan pemerintah, atau dijadwalkan secara terstruktur seperti rapat. Tapi, ini bisa berbentuk informal seperti forum dialog, musyawarah bersama, dan mekanisme partisipatif lainnya. Inti dari aktivitas

ini sejatinya adalah untuk memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembangunan, sekaligus mendorong rasa kepemilikan, tanggung jawab bersama, dan inisiatif lokal untuk mencapai perkembangan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai masyarakat setempat.

Selanjutnya, upaya pemberdayaan masyarakat juga dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi. Program-program yang memperluas akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan akan mendukung pengembangan kewirausahaan digital. Adopsi teknologi dapat memberikan peluang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan jaringan, dan mengakses informasi serta peluang ekonomi yang lebih luas.

Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, program pemberdayaan masyarakat di Indonesia dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk merancang dan melaksanakan program-program ini secara efektif, sehingga dapat mencapai perubahan yang berkelanjutan dan menyeluruh bagi masyarakat Indonesia.

13.3 Pekerjaan Prioritas

Dunia saat ini sedang mengalami perubahan yang sangat cepat. Globalisasi telah menciptakan dunia tanpa batas di mana arus informasi, mobilitas orang maupun modal tidak lagi disekat oleh batas-batas wilayah. Dampak positifnya adalah peningkatan volume perdagangan antar negara, berkembangnya industri pariwisata, transportasi, dan komunikasi.

Pada sisi lainnya, globalisasi juga meningkatkan risiko dan persoalan yang menyebar dari negara lain. Krisis keuangan global, perang dagang antara Amerika dan China, pandemi Covid-19, konflik Rusia dan Ukraina, Konflik Israel dan Gaza, serta resesi global 2023 telah mengakibatkan penurunan ekonomi di banyak negara. Perdagangan antar negara dan nilai ekspor-impor terus fluktuatif. Investasi di negara berkembang kurang menggairahkan. Hal ini berdampak pada keberlangsungan usaha, penurunan harga komoditas dan ekspor dari Indonesia. Perekonomian yang lesu menurunkan daya beli masyarakat. Berbagai kelompok ekonomi lemah kesulitan membiayai kebutuhan sehari-hari.

Uraian di atas menunjukkan bahwa globalisasi memiliki dua sisi yang berbeda. Pada satu sisi, ia meningkatkan perdagangan, investasi, dan keuntungan lintas negara. Integrasi global akan dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial. Pada sisi yang lainnya, globalisasi meningkatkan risiko ekonomi dan sosial. Hampir tidak ada satupun segmen masyarakat yang mampu mengelak dari globalisasi. Setiap dari mereka menghadapinya dengan kekuatan yang berbeda.

Untuk mengantisipasi berbagai problem yang bersumber dari guncangan global tadi, seluruh pihak baik pemerintah, pihak swasta, LSM hingga masyarakat perlu bahu-membahu untuk saling berkolaborasi agar persoalan di tingkat internasional tidak destruktif bagi kapasitas masyarakat, utamanya kelas bawah. Oleh karena itu, amatlah penting bagi pemerintah untuk menetapkan sasaran dan prioritas program pemberdayaan yang nantinya diharapkan menjadi tameng masyarakat yang dapat melindungi mereka dari keterpurukan.

Sasaran dan prioritas program sendiri bervariasi tergantung pada kebutuhan dan konteks masing-masing komunitas. Namun, ada beberapa sasaran dan prioritas umum yang sering menjadi fokus dalam program pemberdayaan masyarakat.

Pertama, pengurangan kemiskinan. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan akses ke penghasilan dan sumber daya. Dengan kata lain, pemberdayaan selain membantu meningkatkan kapasitas masyarakat, perlu disokong oleh pemberian bantuan sosial dan finansial yang mendorong masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan dan kesehatan. Meski sepele, namun sejumlah riset membuktikan bahwa penerima bantuan tunai terbantu oleh insentif finansial yang diberikan pemerintah untuk menyokong kebutuhan dasar mereka (Sofi 2021), walau dalam banyak kasus pemberian bantuan masih terkendala oleh sistem penyaluran yang kurang transparan dan tidak tepat sasaran (Suparman, Washillah, & Juana 2021).

Kedua, pendidikan dan pengembangan kapasitas. Pemberdayaan masyarakat secara esensi adalah upaya menyediakan akses yang lebih baik kepada pendidikan berkualitas dan membuka peluang pengembangan kapasitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi anggota masyarakat. Pendidikan dalam hal ini tidak harus melalui jenjang sekolah formal, tetapi bisa saja melalui pelatihan atau forum kemasyarakatan yang menitikberatkan pada tujuan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan

informasi. Selama ini banyak pihak yang hanya melihat pendidikan hanya sebatas sekolah formal. Pemberdayaan sesungguhnya adalah peningkatan kapasitas masyarakat sesuai kebutuhannya. Jenjang pendidikan formal bukanlah satu-satunya jalan untuk memandirikan masyarakat secara berkelanjutan.

Ketiga adalah bidang kesehatan. Pemberdayaan masyarakat pada aspek kesehatan bermakna bahwa berbagai pihak perlu berupaya untuk meningkatkan akses layanan kesehatan berkualitas kepada tiap warga negara. Dalam mencapai tujuan ini, pertimbangan nilai budaya juga harus diperhatikan agar upaya pemberdayaan masyarakat tidak disalahpahami oleh pihak penerima program. Contohnya di wilayah Kasepuhan Ciptagelar, daerah perbatasan Banten dan Jawa Barat. Puskesmas tidak berjalan optimal di sana karena pemerintah setempat tidak memperhatikan nilai-nilai budaya yang dianut oleh warga lokal. Bagi penduduk Kasepuhan Ciptagelar, sakit adalah bentuk karma. Sehingga pergi berobat bukanlah sebuah solusi. Namun, di saat yang sama, warga Kasepuhan Ciptagelar adalah individu yang taat pada pemimpinnya. Sehingga, jika memperhatikan struktur dan kultur yang ada, upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat seharusnya dimulai dengan pendekatan personal antara pihak pemerintah dan pemimpin wilayah agar tujuan pemberdayaan kesehatan dapat berjalan lebih optimal.

Keempat adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam aspek ini, upaya pemberdayaan diwujudkan melalui usaha untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, peluang ekonomi, dan partisipasi politik. Sebab, dalam realitasnya, hak-hak dasar perempuan seringkali tidak diakomodasi dalam pelayanan dasar yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan perempuan sering lebih rendah dibandingkan kelompok laki-laki.

Ketika merealisasikan prioritas pemberdayaan perempuan, perlu dipahami bahwa tujuannya bukan untuk membuat perempuan jauh lebih berkuasa dibandingkan laki-laki. Esensinya adalah bagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan akses yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kondisi tersebut tercipta, diharapkan kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk saling memaksimalkan potensi demi kebermanfaatannya yang lebih luas.

Sayangnya, tujuan ini sering salah dipahami sebagai agenda liberal dan kebaratan. Padahal, keadilan adalah prinsip esensial yang semua individu ingin dapatkan. Terlepas agama, ras, warna kulit, hingga jenis kelamin yang melekat pada diri seseorang. Sehingga ketika ada orang yang tidak mendapatkan

layanan kesehatan karena identitas yang lahir pada dirinya, hal itu sama saja menegaskan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Dengan kata lain, pemberdayaan perempuan menitikberatkan pada implementasi mewujudkan keadilan sosial pada seluruh warga negara, tidak hanya pada laki-laki saja, tapi juga untuk kaum perempuan.

Kelima adalah perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Aspek yang kerap disepelekan karena efeknya bersifat jangka panjang tapi perlahan-lahan. Contohnya adalah bagaimana perusakan lingkungan seperti penggundulan hutan membawa lebih banyak bencana banjir dan longsor. Dampak negatifnya memang tidak langsung menimpa masyarakat, tapi ketika hujan lebat dan tidak ada lagi area hijau penyangga air, akhirnya aliran deras air menghancurkan perumahan penduduk. Solusi dari hal ini tidak sebatas memberdayakan masyarakat dari segi pengetahuan saja, tapi juga mengembangkan inisiatif yang ramah lingkungan dan mendorong pengelolaan sumber daya alam untuk menjaga keseimbangan ekologi dan memastikan keberlanjutan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Robert (2008). *Empowerment, Participation and Social Work*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Adamson, Dave, and Richard Bromiley (2013) Community Empowerment: Learning from Practice in Community Regeneration. *International Journal of Public Sector Management* 26(3): 190–202.
- Adnin, Nury Nabila Aulia (2015) *Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Kreatif Lingsawastu Untuk Menumbuhkan Masyarakat Gemar Belajar (Learning Society) (Skripsi)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Amrutkar, Prashant (2016) Political representation for the empowerment of tribals and constraints. In *Democratic Decentralization in India*, pp. 99-109. Routledge India.
- Anderson, Benedict R. (1983) Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective. *The Journal of Asian Study* 42(3):477–496. Available at <https://www.jstor.org/stable/2055514>
- Asian Development Bank (2003) *Social Protection*, Asian Development Bank. Available at <https://www.adb.org/documents/social-protection-strategy>
- Axelsson, Tobias (2008). Peasants and Policymakers, Agricultural Transformation in Java Under Suharto, *Lund Studies in Economic History* 45. Lund University. Available at <https://lup.lub.lu.se/record/1033278>
- BPS, Bappenas, UNDP (2001) *Indonesia Human Development Report 2001*. Jakarta: BPS
- BPS (2021) *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia, 2021*. Jakarta: BPS. Available at <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/9c24f43365d1e41c8619dfe4/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-indonesia-tahun-2021.html>
- BPS (2022) *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022*, Jakarta: BPS. Available at <https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/71ae912cc39088ead37c4b67/indikator-kesejahteraan-rakyat-2022.html>

- BPS (2022) *Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2021-2022*. Available at <https://bps.go.id/indicator/23/621/1/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-kabupaten-kota.html>
- BPS (2023) *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BPS
- Browne, Evie (2015). *Social Protection: Topic guide*. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham. Available at <https://gsdrc.org/topic-guides/social-protection-2/what-is-social-protection/>
- CADRI (2011) *Basics of Capacity Development for Disaster Risk Reduction*. Geneva: CADRI. <https://www.undrr.org/publication/basics-capacity-development-disaster-risk-reduction>
- Chambers, Robert (2006) 'What is Poverty? Who Asks? Who Answers?' In *Poverty in Focus: What is Poverty? Concepts and Measures*. UNDP, International Poverty Centre. Available at <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/120>
- Cruikshank, Barbara (1999) *The Will to Empower: Democratic Citizens and Other Subjects*. Cornell University Press.
- De León, Juan Carlos Villagrán (2006) *Vulnerability: A Conceptual and Methodological Review*, Bonn: UNU Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS). Available at <https://collections.unu.edu/eserv/unu:1871/pdf3904.pdf>
- Devereux, Stephen, Rachel Sabates-Wheeler (2004) *Transformative Social Protection*. Working paper series, 232. Brighton: Institute of Development Studies. Available at <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/4071>
- Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (2020) *Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 bagi Ekonomi RI*. Available at <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri>
- Duadji, Noverman, Novita Tresiana, M. Irsyad Fadoli, dan Eko Budi Sulistio (2022) Pendampingan: Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sampah Di SMAN 9 Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana* 3(3): 255–66.
- Fadhilah, Hasna Azmi, Sutiyo dan Zulkarnain Ilyas (2019). Institutional Approach For Adat Community Empowerment: Case of Kasepuhan Ciptagelar In West Java. *International Journal of Kyberology* 4 (1), 37-50. doi: 10.33701/ijok.v4i1.643

- Friedman, John (1992) *The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell Publishing Ltd.
- Fukuyama, Francis (2001) Social Capital, Civil Society and Development. *Third World Quarterly* 22(1): 7–20.
- Hänni, Miriam (2017) Responsiveness – To Whom? Why the Primacy of the Median Voter Alienates Minorities. *Political Studies* 65(3): 665–84.
- Hastuti, Hastuti, M. Sulton Mawardi, Bambang Sulaksono, Akhmadi, Silvia Devina, dan Rima Prama Artha (2008) *The Effectiveness of the Raskin Program*. Jakarta: The SMERU Research Institute. Available at <https://smeru.or.id/en/publication/effectiveness-raskin-program>
- Holmemo, Camilla, Pablo Acosta, Tina George, et al. (2020) *Investing in People: Social Protection for Indonesia's 2045 Vision*. Jakarta: World Bank Indonesia. Available at: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/investing-in-people-social-protection-for-indonesia-2045-vision>.
- ILO (2022) *World Social Protection Report 2020–22: Social Protection at the Crossroads – in Pursuit of a Better Future*, Geneva: ILO. Available at https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_817572/lang-en/index.htm
- ILO (2023) *Social Protection Floor*. Available at <https://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/policy-development-and-applied-research/social-protection-floor/lang--en/index.htm>
- Islam, M. Rezaul (2014). Improving Development Ownership among Vulnerable People: Challenges of NGOs' Community Empowerment Projects in Bangladesh. *Asian Social Work and Policy Review* 8(3): 193–209.
- Jolliffe, Dean, Daniel Gerszon Mahler, Christoph Lakner, Aziz Atamanov, dan Samuel Kofi Tetteh-Baah (2022). *Assessing the Impact of the 2017 PPPs on the International Poverty Line and Global Poverty*. Available at <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/353811645450974574/assessing-the-impact-of-the-2017-ppps-on-the-international-poverty-line-and-global-poverty>
- Lesnussa, Johny U (2019) Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di Negeri Halong Baguala Ambon. *Jurnal Sosio Sains*, 5 (2): 91-107. Doi:10.37541/sosiosains.v5i2.150.
- Lindert, Kathy (2005). Brazil: *Bolsa Familia Program—Scaling-up Cash Transfers for the Poor. Managing for Development Results Principles in Action:*

- Sourcebook on Emerging Good Practices*. Available at <https://www.heart-resources.org/wp-content/uploads/2015/06/Brazil-Bolsa-Familia-Program-%C3%A2%E2%82%AC%E2%80%9C-Scaling-up-Cash-Transfers-for-the-Poor.pdf>
- Lubis, Hisnuddin (2016) Pengentasan Kemiskinan: Belajar Dari Kegagalan Orde Baru. *Dimensi: Journal of Sociology* 9(1): 1–7.
- Mardikanto, Totok, dan Poerwoko Soebiato (2019) *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Marti, Amelia (2019) Ultra-Processed Foods Are Not ‘Real Food’ but Really Affect Your Health. *Nutrients* 11(8): 1-3.
- McLaughlin, Kenneth (2016) *Empowerment: A Critique*. Oxford: Routledge.
- Mishra, Satish C. (2009). *Economic Inequality in Indonesia: Trends, Causes and Policy Response*. Colombo: UNDP Regional Office.
- Mondal, Abdul Hye (2001) Social Capital Formation: The Role of NGO Rural Development Programs in Bangladesh. In *Social Capital as a Policy Resource*, eds. John D Montgomery dan Alex Inkeles, 233–49.
- Nasirudin, Shalahuddin Djalal Tandjung, Djoko Marsono, dan Sudibiyakto (2014) Pengelolaan Sampah 3R Dengan Pendekatan Zonasi Permukiman Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Rekayasa Lingkungan* 14(2): 63–81.
- Pairan dan Savira Auliya Abdullah (2021) Pengembangan Komunitas Dalam Mewujudkan Lingkungan Ramah Anak Berkebutuhan Khusus. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 9(2): 116–22.
- Pranasta, Viandhika (2022) *Efektivitas Program Jogo Tonggo dalam Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah (Skripsi)*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Pratikno (1998) Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 2(2): 18–33.
- Prosterman, Roy, and Robert Mitchell (2002). *Concept for Land Reform on Java*. Paper prepared under the Land Law Initiative funded by the United States Agency for International Development.
- Purnomo, Sodik D., Hari Winarto, dan Heris Kencana (2022) Pengelolaan Sampah Berbasis Jiwa Gotong Royong. *Wikuacity: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (1): 90-93. <https://wikuacity.unwiku.ac.id/JurnalWikuacity:JurnalPengabdianMasyarakat//90>.

- Rohrmann, Sabine, dan Jakob Linseisen (2016) Processed Meat: The Real Villain? In *Proceedings of the Nutrition Society*, Cambridge University Press, 233–41.
- Sasongko, Yakob A. T., dan Ekawati S. Wahyuni (2013) Diaspora Madura: Social Capital Analysis in The Business in Informal Sector of Madura Migrants in Tanah Sareal Subdistrict, Bogor District, West Java. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 1(01)*: 52–63.
- Schulz, Amy J., Barbara A. Israel, Marc A. Zimmerman, dan Barry N. Checkoway (1995) Empowerment as a Multi-level Construct: Perceived Control at the Individual, Organizational and Community Levels. *Health Education Research 10 (3)*: 309-327.
- Sen, Amartya (1983) *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford: Oxford University Press.
- Sen, Amartya (1984) Rights and Capabilities, in Amartya Sen (ed.), *Resources, Values and Development*, pp. 307–324, Oxford: Basil Blackwell.
- Sen, Amartya (2001) *Development as Freedom*. Oxford New York: Oxford University Press.
- Sitanggang, Hendrik, R Hamdani Harahap, dan Abdul Kadir (2021) The Role of Ngo’s In Strengthening The Farmer Groups (Research on the Role of Mercy Corps Indonesia In Humbang Hasundutan District). *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science 2(3)*: 463-473. <https://doi.org/10.31933/dijemss.v2i3>.
- Soetomo (2006) Persoalan Pengembangan Institusi Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik 10(1)*: 51–69.
- Sofi, Irfan (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review 6(3)*: 247–62.
- Solomon, Barbara Bryant (1976). *Black Empowerment: Social Work in Oppressed Communities*. New York: Columbia University Press.
- Srouf, Bernard *et al.* (2019) Ultra-Processed Food Intake and Risk of Cardiovascular Disease: Prospective Cohort Study (NutriNet-Santé). *BMJ (Clinical research ed.)*, 365, l1451. <https://doi.org/10.1136/bmj.l1451>
- Sumarto, Sudarno, dan Wenefrida Widyanti (2008) *Multidimensional Poverty in Indonesia: Trends, Interventions and Lessons Learned*. Paper presented at the 1st international symposium of “Asian cooperation, integration and human resources” for Waseda University Global COE Program:

- Global Institute for Asia Regional Institute (GIARI), Tokyo, 17–18 Jan 2008. Available at <https://ideas.repec.org/p/pramprapa/59468.html>
- Sumodiningrat, Gunawan (1997) *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Suparman, Nanang, Ghina Washillah, dan Tedi Juana (2021) Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. *Jurnal dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19(2): 44–60. <http://jurnaldialektika.com>.
- Suryahadi, Asep, Athia Yumna, Umbu Reku Raya, dan Deswanto Marbun (2008) *Review of Government's Poverty Reduction Strategies, Policies, and Programs in Indonesia*. SMERU Research Institute, Jakarta. Available at <https://smeru.or.id/en/publication/review-government%E2%80%99s-poverty-reduction-strategies-policies-and-programs-indonesia>
- Sutiyo (2022) On the Discourses of Social Protection Distribution: Insights from Indonesia. *Journal of Sociology & Social Welfare*, 49 (3): 4-24 <https://scholarworks.wmich.edu/jssw/vol49/iss3/2/>
- Sutiyo (2023) A Neo-Institutional Analysis of Social Protection: Insights from Indonesia. *Global Social Policy*, 23(2): 268–285. <https://doi.org/10.1177/14680181221144559>
- Sutiyo dan Maharjan Keshav Lall (2011). Rural poverty alleviation in Indonesia: programs and the implementation gap. *Journal of International Development and Cooperation*, 18(1): 13-22. <http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/en/00032448>
- Sutiyo dan Maharjan Keshav Lall (2013) *Community Participation in Decentralized Rural Development: A Case Study of Three Villages in Purbalingga District, Indonesia*. *Journal of International Development and Cooperation*, 18 (3): 99-110.
- Sutiyo dan Maharjan Keshav Lall (2014) Capacity of Rural Institutions in Implementing Decentralized Development in Indonesia: Case of Three Villages in Purbalingga District, Central Java Province. In: Maharjan, K. (eds) *Communities and Livelihood Strategies in Developing Countries*. Tokyo: Springer. https://doi.org/10.1007/978-4-431-54774-7_10
- Sutiyo dan Maharjan Keshav Lall (2017a). *Rural Development Policy in Indonesia*. In: *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Singapore: Springer. Available at https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0_4

- Sutiyo dan Maharjan Keshav Lall (2017b). Rural Community Leadership in Decentralization. In: *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0_8
- Sutiyo, Jona Sinaga, dan Tri Raharjanto (2020). Does Decentralisation in Indonesia Give the Poor a Voice? Evidence from the Purbalingga District. *Institutions and Economies*, 12(2): 41-66. <https://mjir.um.edu.my/index.php/ijie/article/view/17019>
- Sutiyo, Ondo Riyani, dan Meltarini (2018). Poverty, Entitlement Approach, and the Program of Health Insurance for the Poor in Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 9(1): 332-353. <https://jsp.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/99>
- Sutiyo, Tri Rahardjanto, Jona Sinaga, dan Agus Supriyadi Harahap (2018) Does Community Cohesion Present Challenges for Social Protection Programs? Case of the Program of Subsidized Rice for the Poor in Purbalingga District. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 10(2):225-232. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/14684>
- Thompson, Neil (2007) *Power and Empowerment*. Lyme Regis: Russel House.
- TNP2K (2015) *Indonesia's Unified Database for Social Protection Programmes: Management Standards*. Jakarta: Secretariat of the Vice President of the Republic of Indonesia. Available at: <http://www.tnp2k.go.id/downloads/indonesias-unified-database-for-social-protection-programmes-management-standards>.
- United Nations (2006) *Social Justice in an Open World The Role of the United Nations*
- von Luebke, Christian (2009) The Political Economy of Local Governance: Findings from an Indonesian Field Study. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 45(2): 201–30.
- Widayanti, Sri (2012) Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 1(1): 87–102.
- World Bank (2014) *A Model from Mexico for the World*. Available at <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/19/un-modelo-de-mexico-para-el-mundo>
- World Bank (2022) *Multidimensional Poverty Measure (4th edition, circa 2018)*, Washington, DC: World Bank. Available at <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/multidimensional-poverty-measure>

World Bank (2022) *Poverty & Equity Brief, East Asia & Pacific, Indonesia, October 2022*. Available at https://databankfiles.worldbank.org/data/download/poverty/987B9C90-CB9F-4D93-AE8C-750588BF00QA/current/Global_POVEQ_IDN.pdf

World Bank (2023) *Indonesia Poverty Assessment-Pathways towards Economic Security (English)*. Washington, D.C.: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/099041923101015385/P17567409bd69f01809b940840b40608e56>

Yamauchi, Chikako (2007) *Effects of Grants for Productive Investment on Employment and Poverty: Lessons from Indonesia's Left-Behind Village Program*. The Australian National University., Canberra

Sumber lain:

<https://bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>, diakses tanggal 6 Januari 2023

html#subjekViewTab3, diakses tanggal 6 Januari 2023

<https://bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>, diakses tanggal 6 Januari 2023

html#subjekViewTab3, diakses tanggal 6 Januari 2023

<https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=ID> diakses tanggal 6 Januari 2023

<https://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/policy-development-and-applied-research/social-protection-floor/lang--en/index.htm> diakses tanggal 8 Januari 2023

<https://mrbrackrog.wordpress.com/economics/grade-12-economics/introduction-to-economic-development/> diakses tanggal 08 Januari 2024

TENTANG PENULIS

Sutiyo, S.S.T.P., M.Si., Ph.D., saat ini adalah dosen di Institut Pemerintahan Daerah (IPDN), Indonesia. Penulis menamatkan jenjang Sarjana Terapan Pemerintahan dari IPDN pada tahun 2003, S2 dari Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2006, dan S3 dari *Graduate School for International Development and Cooperation* dari *Hiroshima University, Japan* pada tahun 2013. Penulis berpendapat bahwa untuk memahami masalah nasional, seseorang harus pergi ke tingkat lokal dan menggali realitas akar rumput dari masyarakat dan aparat setempat. Hal ini memotivasinya untuk selalu menjalin hubungan dengan pemerintah daerah, mendengarkan suara warga dan aparat setempat, serta belajar dari kearifan lokal dalam memecahkan masalah. Penulis telah menerbitkan beberapa artikel di jurnal ilmiah dan surat kabar untuk berbagi gagasan, serta menjadi reviewer pada beberapa jurnal ilmiah nasional dan internasional. Publikasi penulis dapat dilihat pada laman <https://scholar.google.co.id/citations?user=1D-VDzwAAAAJ&hl=id&oi=ao>, dan dapat dihubungi via email: sutiyo@ipdn.ac.id

Hasna Azmi Fadhillah, S.S.T.P., M.Res., merupakan dosen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Indonesia yang sekarang sedang menempuh program doktoral di Universiteit Van Amsterdam, Belanda. Sebelum meraih beasiswa untuk studi S3, penulis menyelesaikan studi magister riset politik di University of Essex, Inggris dan meraih gelar sarjana di Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada bidang ilmu yang sama. Selain tertarik pada kajian ilmu politik, penulis juga tertarik bagaimana isu politik berkorelasi dengan isu-isu lain seperti agama, budaya, dan gender. Selain berkecimpung di dunia akademis, penulis turut berkegiatan di sejumlah komunitas penulisan dan pemberdayaan perempuan. Penulis dapat dihubungi melalui media sosial twitter @sidhila atau email: hasna@ipdn.ac.id

Hakikat peran pemerintah terhadap kelompok masyarakat rentan adalah untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan. Kedua peran ini seperti dua sisi satu mata uang, berbeda secara konsepsional namun tidak bisa dipisahkan dalam implementasinya. Berbagai persoalan konsepsional tentang kerentanan serta fungsi ideal negara terhadap masyarakatnya telah menciptakan ketidakjelasan apa dan bagaimana yang harus dilakukan pemerintah.

Buku ini ditulis untuk memperjelas konsepsi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai fungsi utama Pemerintah terhadap masyarakat miskin dan rentan. Target utama pembaca buku adalah mahasiswa tingkat Sarjana dan Master, para praktisi pemerintahan di lapangan, serta aktivis dan sukarelawan pendamping program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, buku ini menyajikan konsep dasar, dimensi dan operasionalisasi dari suatu konsep serta framework yang menggambarkan hubungan antar konsep. Pada bagian tertentu untuk menambah wawasan, disajikan best practices.

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)

Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581

Telp/Fax : (0274) 4533427

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

✉ cs@deepublish.co.id

📘 Penerbit Deepublish

📍 @penerbitbuku_deepublish

🌐 www.penerbitdeepublish.com



Kategori : Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial

ISBN 978-623-02-8155-6



9 786230 281556